



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Jl. PEMUDA No. 294 TELP. 0272-321046 FAX. 322567
TELEKS 325637 KLATEN 57424

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2021 disusun sebagai suatu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dan tujuan Penyusunan LKjIP adalah untuk: (a) meningkatkan akuntabilitas Kinerja OPD, (b) sebagai umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah, (c) mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi, (d) mendorong OPD untuk melaksanakan tata penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan (e) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif, serta responsif terhadap *issue* yang berkembang.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten beserta analisis dan evaluasi sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah untuk menjamin berkelanjutan tata penyelenggaraan pemerintah diukur dari pencapaian target indikator kinerja jangka menengah Daerah, serta untuk mewujudkan: ***Masyarakat Kabupaten Klaten Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.***

Klaten, 28 Januari 2022
BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI, S.M.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Mayor Kusmanto 23 Semangak Klaten Kode Pos 57415
Telp. 0272 321040 Faksimile 0272 321040

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Daerah untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemda Kabupaten Klaten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KLATEN



Jelmu
JAJANG PRIHONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19810216 199912 1 001

Eksekutif Summary

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, di mana Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran 67 (*enam puluh tujuh*) yang terdiri dari: 60 (*enam puluh*) indikator yang sifatnya progresif, dan 7 (*tujuh*) indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. Indikator Progresif, dengan hasil:

- a. Sebanyak 42 (empat puluh dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 62,69% dengan Kriteria **Sangat Tinggi**;
- b. Sebanyak 9 (sembilan) atau sebanyak 13,43% dengan Kriteria **Tinggi**;
- c. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 4,48% dengan kriteria **Sedang**;
- d. Sebanyak 0 (nol) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 0% dengan kriteria **Rendah**; dan
- e. Sebanyak 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 8,96% dengan Kriteria **Sangat Rendah**.

Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

- a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Sangat Tinggi*** (atau interval nilai realisasi kinerja $\geq 90,1$) sebanyak 42 (empat puluh dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 62,69%, diantaranya:
 1. Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 2. Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 3. Usia Harapan Hidup;
 4. Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 5. Persentase penguatan kapasitas PSKS;
 6. Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda;
 7. Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga;
 8. Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya;
 9. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah;
 10. Prosentase Raperda yang disahkan tepat waktu;
 11. Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan;
 12. Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel;
 13. Level Maturitas SPIP;
 14. Level Kapabilitas APIP;
 15. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
 16. Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara;
 17. Indeks Kabupaten Peduli HAM;
 18. Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana);
 19. Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi;

20. Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah;
 21. Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah;
 22. Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah;
 23. Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra;
 24. Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek;
 25. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB;
 26. Persentase pertumbuhan realisasi investasi PMDN;
 27. Persentase pertumbuhan realisasi investasi PMA;
 28. Angka partisipasi angkatan kerja;
 29. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
 30. Persentase IKM yang memiliki daya saing;
 31. Indeks layanan infrastruktur;
 32. Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan;
 33. Indeks kualitas perumahan dan kawasan pemukiman;
 34. Ketaatan terhadap RTRW;
 35. Indeks Kualitas Air;
 36. Indeks Kualitas Udara;
 37. Indeks Demokrasi;
 38. Indeks Ketertiban Masyarakat;
 39. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
 40. Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan;
 41. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan dan
 42. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (Dukcapil).
- b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan **Kriteria Tinggi**, atau interval nilai realisasi kinerja **75,1 ≤ 90** sebanyak 9 (sembilan) atau sebanyak 13,43%, diantaranya:
1. Indeks Profesionalitas ASN;
 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 3. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB;
 4. Persentase UMKM yang memiliki daya saing;
 5. Prosentase inovasi yang diterapkan;
 6. Rasio daya serap tenaga kerja PMA;

7. Kelas Indeks Kapasitas Bencana;
 8. Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan); dan
 9. Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA).
- c. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan **Kriteria Sedang**, atau interval nilai realisasi kinerja $65,01 \leq 75$ sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 4,48%, yaitu:
1. Rasio penduduk yang bekerja;
 2. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta prgram BPJS Ketenagakerjaan; dan
 3. Indeks Tutupan Vegetasi (lahan).
- d. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan **Kriteria Rendah**, atau interval nilai realisasi kinerja $50,01 \leq 65$ sebanyak 0 (nol) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 0%.
- e. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria **Sangat Rendah**, atau interval nilai realisasi kinerja ≤ 50 sebanyak 6 (enam) indikator, diantara:
1. Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan;
 2. Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat;
 3. Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku;
 4. Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata;
 5. Rasio daya serap tenaga kerja PMDN; dan
 6. Persentase Besaran Peningkatan Minat Transmigrasi.

B. Indikator Regresif, dengan hasil:

Indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria **Tercapai (Berhasil Menekan)**, atau interval nilai realisasi kinerja skala $\leq 99,9$ sebanyak 3

(tiga) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 4,48%, diantaranya:

1. Angka Kematian Balita;
2. Tingkat Inflasi YoY; dan
3. Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*)/TFR.

Sedangkan yang ***Tidak Tercapai***, atau interval nilai realisasi kinerja skala ≥ 100 sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 5,97%, diantaranya:

1. Kasus kematian Ibu;
2. Angka Kematian Bayi;
3. Prevalensi gizi buruk (BB/U) ; dan
4. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Selanjutnya untuk mengimplementasikan sasaran jangka menengah Daerah, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun berkenaan, dan ditindaklanjuti dengan penetapan APBD tahun 2021 dengan sebanyak 330 program (berdasarkan jumlah program yang ada OPD) dengan 700 kegiatan dan subkegiatan 1778. Realisasi fisik tercapai 96% dari target rencana 98%. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.2.949.643.677.710,- dan terserap sebesar Rp.2.384.561.916.515,- (atau 80,84%).

Evaluasi atas data pendukung beserta berbagai permasalahan yang muncul dari setiap sasaran strategis perlu diantisipasi. Sebagaimana hasil menunjukkan berdasar tingkat efisiensi sumber daya diperoleh hasil: Jumlah sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi tinggi sebanyak 28 sasaran (atau 62,22% dari sebanyak 45 sasaran strategis), sedangkan jumlah indikator sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi tinggi sebanyak 59 indikator sasaran (atau 88,06% dari sebanyak 67 indikator kinerja sasaran).

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Pernyataan Telah Direviu	iv
Eksekutif Summary	v
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Grafik.....	xv
Daftar Diagram.....	xvii
Daftar Gambar.....	xviii

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar Belakang.....	I-1
	1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Trend Wilayah	I-3
	1.3 Kondisi Ekonomi Daerah	I-15
	1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten.....	I-20
	1.5 Isu Strategis.....	I-23
BAB II	PERENCANAAN	II-1
	2.1 Rencana Strategis	II-1
	2.2 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2021	II-15
	2.3 Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis.....	II-19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	III-2
	3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	III-13
	3.3 Akuntabilitas Anggaran.....	III-178
	3.4 Efektifitas Sumber Daya.....	III-224
BAB IV	PENUTUP	IV-1
	4.1 Kesimpulan.....	IV-1
	4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	IV-3

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	I-6
Tabel 1.2	Rasio Beban Tanggungan (RBT) Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	I-8
Tabel 1.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	I-10
Tabel 1.4	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	I-11
Tabel 1.5	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 (dalam Rp.Juta).....	I-16
Tabel 1.6	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 (dlm Juta Rupiah).....	I-18
Tabel 1.7	Jabatan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	I-21
Tabel 1.8	Jumlah dan Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017–2021.....	I-22
Tabel 1.9	Manajemen Pengelolaan ASN Tahun 2017-2021.....	I-23
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021.....	II-9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	II-15
Tabel 2.3	Program Pendukung Pencapaian Sasaran.....	II-20
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif.....	III-2
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif.....	III-2
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	III-3
Tabel 3.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal.....	III-14
Tabel 3.5	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021.....	III-17
Tabel 3.6	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021.....	III-18
Tabel 3.7	Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-18
Tabel 3.8	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-21
Tabel 3.9	Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi SI/D IV/S2 dan Bersertifikat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021.....	III-21

Tabel 3.10	Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-23
Tabel 3.11	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2020.....	III-24
Tabel 3.12	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan.....	III-27
Tabel 3.13	Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-28
Tabel 3.14	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Menurunnya Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>).....	III-34
Tabel 3.15	Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021....	III-34
Tabel 3.16	Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-35
Tabel 3.17	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitkan oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit.....	III-37
Tabel 3.18	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM.....	III-42
Tabel 3.19	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.....	III-46
Tabel 3.20	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-47
Tabel 3.21	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya.....	III-50
Tabel 3.22	Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-50
Tabel 3.23	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-51
Tabel 3.24	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan.....	III-54
Tabel 3.25	Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-54
Tabel 3.26	Perkembangan Jumlah Perpustakaan Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-55
Tabel 3.27	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.....	III-56
Tabel 3.28	Capaian Indeks Profesionalitas ASN.....	III-57
Tabel 3.29	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.....	III-60

Tabel 3.30	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016–2020.....	III-61
Tabel 3.31	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD.....	III-63
Tabel 3.32	Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD Tahun 2017-2021.....	III-64
Tabel 3.33	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.....	III-66
Tabel 3.34	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD.....	III-68
Tabel 3.35	Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-69
Tabel 3.36	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel.....	III-71
Tabel 3.37	Perkembangan Persentase Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021.....	III-71
Tabel 3.38	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	III-73
Tabel 3.39	Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten.....	III-76
Tabel 3.40	Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten.....	III-77
Tabel 3.41	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.....	III-81
Tabel 3.42	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM.....	III-84
Tabel 3.43	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan.....	III-86
Tabel 3.44	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Kredibel.....	III-88
Tabel 3.45	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan.....	III-90
Tabel 3.46	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitas dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian.....	III-92
Tabel 3.47	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat.....	III-95
Tabel 3.48	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	III-97
Tabel 3.49	Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Nin Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya Tahun 2020.....	III-98
Tabel 3.50	Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-99

Tabel 3.51	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2017-2021.....	III-99
Tabel 3.52	Produksi Perkebunan Tahun 2017-2021.....	III-100
Tabel 3.53	Populasi Ternak Tahun 2017-2021.....	III-101
Tabel 3.54	Produksi Susu, Daging, dan Telur Tahun 2017-2021.....	III-101
Tabel 3.55	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan.....	III-104
Tabel 3.56	Lembaga Ekonomi Perdesaan.....	III-105
Tabel 3.57	Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2017-2021.....	III-106
Tabel 3.58	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata.....	III-108
Tabel 3.59	Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2017-2021.....	III-109
Tabel 3.60	Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-110
Tabel 3.61	Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	III-111
Tabel 3.62	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UMKM.....	III-115
Tabel 3.63	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah.....	III-118
Tabel 3.64	Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten.....	III-118
Tabel 3.65	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal.....	III-125
Tabel 3.66	Jumlah Investasi PMA dan PMDN Tahun 2017-2021.....	III-126
Tabel 3.67	Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2017-2021.....	III-127
Tabel 3.68	Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2017-2021.....	III-127
Tabel 3.69	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan.....	III-129
Tabel 3.70	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan.....	III-132
Tabel 3.71	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian.	III-134

Tabel 3.72	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat.....	III-137
Tabel 3.73	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan.....	III-139
Tabel 3.74	Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Tahun 2017-2021.....	III-140
Tabel 3.75	Data Terminal Angkutan Penumpang Umum Di Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	III-140
Tabel 3.76	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman.....	III-143
Tabel 3.77	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Konsep Tata Ruang.....	III-145
Tabel 3.78	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup.....	III-147
Tabel 3.79	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana.....	III-151
Tabel 3.80	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi.....	III-154
Tabel 3.81	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya.....	III-156
Tabel 3.82	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	III-158
Tabel 3.83	Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2017-2021.....	III-160
Tabel 3.84	Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol Tahun 2016-2020.....	III-161
Tabel 3.85	Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum Tahun 2017-2021.....	III-161
Tabel 3.86	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak.....	III-165
Tabel 3.87	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-165
Tabel 3.88	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Periode 2017-2021.....	III-166
Tabel 3.89	Keikutsertaan Perempuan di dalam Jabatan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-167
Tabel 3.90	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2017-2021.....	III-168
Tabel 3.91	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan.....	III-170
Tabel 3.92	Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Tahun 2017-2021.....	III-170

Tabel 3.93	Data Terminal Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	III-171
Tabel 3.94	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat.....	III-172
Tabel 3.95	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas.....	III-174
Tabel 3.96	Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-175
Tabel 3.97	Penduduk Kabupaten Klaten yang Belum Ber-Akte Lahir dan KTP Elektronik Tahun 2017-2021.....	III-175
Tabel 3.98	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pengembangan Ketransmigrasian.....	III-177
Tabel 3.99	Realisasi Penempatan Transmigrasi Umum Menurut Daerah Penempatan Tahun 2017-2021.....	III-177
Tabel 3.100	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021.....	III-182
Tabel 3.101	Tingkat Efisiensi Sumber Daya.....	III-225
Tabel 3.102	Efektifitas Sumber Daya.....	III-261
Tabel 3.103	Tingkat Efektifitas Sumber Daya.....	III-262

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	I-9
Grafik 1.2	Perkembangan Angka IPM Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021.....	I-10
Grafik 1.3	Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021.....	I-12
Grafik 1.4	Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2021.....	I-13
Grafik 1.5	Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2021.....	I-14
Grafik 1.6	Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2016-2020.....	I-15
Grafik 1.7	Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	I-20
Grafik 1.8	Profil Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	I-21
Grafik 3.1	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-15
Grafik 3.2	Perkembangan Angka Rata-lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-16
Grafik 3.3	Angka Kelulusan (AL) Tahun 2017-2021.....	III-19
Grafik 3.4	Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun ke atas di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-20
Grafik 3.5	Rasio Guru Terhadap Murid untuk Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2017-2021.....	III-22
Grafik 3.6	Perkembangan Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-28
Grafik 3.7	Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-30
Grafik 3.8	Perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-30
Grafik 3.9	Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-31
Grafik 3.10	Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-38
Grafik 3.11	Perkembangan Indikator BOR Bulanan (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu).....	III-38
Grafik 3.12	Perkembangan Indikator BOR Tahunan (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu).....	III-39
Grafik 3.13	Jumlah Pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Bagas Waras.....	III-40

Grafik 3.14	PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2017–2021.....	III-43
Grafik 3.15	Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	III-93
Grafik 3.16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2018-2021.....	III-148
Grafik 3.17	Capaian Konservasi Penghijauan Daerah Sumber Mata Air Kabupaten Klaten Tahun 2018-2019 dan Target sampai tahun 2021.....	III-149

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan.....	I-4
------------	---	-----

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1	Tema/Agenda Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	II-13
Diagram 2.2	Korelasi antara Tujuan dan Misi Pembangunan Daerah.....	II-12
Diagram 3.1	Peringkat Kinerja Progresif.....	III-12
Diagram 3.2	Peringkat Kinerja Regresif.....	III-13

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bahwa untuk menjamin peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuntut adanya pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya *good governance* yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing Daerah (**Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**).

BAB I PENDAHULUAN,
terdiri dari:
1.1 Latar Belakang
1.2 Pembangunan
Menyeluruh dan Trend
Wilayah
1.3 Kondisi Ekonomi Daerah
1.4 Kapabilitas SDM
Pemerintah Kabupaten
Klaten
1.5 Isu Strategis

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka harus disusun *grand-design* perencanaan yang terpadu dari berbagai sektor, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehingga perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional harus dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penguatan pelaksanaan **otonomi daerah** dalam upaya peningkatan pelayanan publik secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, bahwa pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang disampaikan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2021.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2021 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam **Dokumen Penetapan Kinerja**. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi kinerja yang dihasilkan dari setiap sasaran strategis jangka menengah Daerah tahun 2016-2021.

Sehingga laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, Pemerintah Kabupaten Klaten menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan **Perjanjian Kinerja** yang disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan



Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Trend Wilayah

1.2.1 Kondisi Geografi dan Demografi

a. Letak Geografis

Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dikenal sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW). Dari sisi bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7°32`19" Lintang Selatan sampai 7°48`33" Lintang Selatan dan antara 110°26`14" Bujur Timur sampai 110°47`51" Bujur Timur.

b. Tata Letak dan Wilayah Administrasi

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah 65.556 ha (655,56 km²) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya 3.254.412 ha. Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY); dan



4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY).

Gambaran Peta Wilayah Kabupaten Klaten berdasar Kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan

Adapun pembagian wilayah ada 26 kecamatan, 391 desa, 10 kelurahan, 3.689 RW dan 9.592 RT.

c. Penggunaan Lahan

Dari sisi penggunaan lahan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2017-2021 terjadi perubahan pola penggunaan lahan sawah irigasi. Penggunaan lahan sawah dari 33.021 Ha pada tahun 2017, menjadi 31.943 Ha pada tahun 2018, menjadi 31.863 Ha pada tahun 2019, pada tahun 2020 menjadi 31.771 Ha, dan pada tahun 2021 menjadi 31.708 Ha.

Adapun perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian pada tahun 2020 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 93,1802 Ha, dengan perincian peruntukan: perumahan 56,1038 Ha, industri 10,3322 Ha, perusahaan 25,5163 Ha dan jasa 1,2279 Ha . Sedangkan tahun 2021 seluas 90,7141 Ha, dengan perincian peruntukan: perumahan



56,0902 Ha, industri 7,8797 Ha, perusahaan seluas 25,5163 Ha, dan jasa seluas 1,2279 Ha.

Besaran luas lahan dan persentase lahan sawah yang beririgasi di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa tanah pertanian di Kabupaten Klaten masih sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selama ini Kabupaten Klaten mendapat sebutan sebagai penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah. Pengembangan Kabupaten Klaten sebagai kawasan agropolitan, perlu adanya pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai produk unggulan yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah.

d. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2020 berdasarkan data bersih sebanyak 1.330.802 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan 0,54% dan kepadatan penduduk 2.030 jiwa/km², dan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 1.276.030 jiwa (atau turun 4,12 jiwa) dan kepadatan penduduk 1946 jiwa/km². Gambaran jumlah penduduk, laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 1.1.



Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun
2017-2021

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)					Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Luas wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk
		2017	2018	2019	2020	2021	2020-2021	2020-2021		
1	Prambanan	52.112	52.662	52.824	54.667	51.363	3.304	-6,04	24,43	2.102
2	Gantiwarno	41.060	40.609	40.696	44.262	38.642	5.620	-12,70	25,64	1.507
3	Wedi	54.068	54.681	54.507	57.338	52.039	5.299	-9,24	24,38	2.134
4	Bayat	64.680	65.148	65.649	69.554	63.486	6.068	-8,72	39,43	1.610
5	Cawas	60.047	61.359	60.690	62.222	57.548	4.674	-7,51	34,47	1.670
6	Trucuk	79.409	80.740	81.715	82.901	79.039	3.862	-4,66	33,81	2.338
7	Kalikotes	20.532	20.910	20.935	21.467	19.922	1.545	-7,20	12,98	1.535
8	Kebonarum	59.808	61.117	61.237	63.848	58.918	4.930	-7,72	9,67	6.093
9	Jogonalan	43.245	44.181	44.373	45.378	42.941	2.437	-5,37	26,7	1.608
10	Manisrenggo	37.371	38.247	38.096	39.087	36.760	2.327	-5,95	26,96	1.364
11	Karangnongko	66.196	66.963	67.619	70.048	65.094	4.954	-7,07	26,74	2.434
12	Ngawen	48.592	48.831	48.990	50.421	46.907	3.514	-6,97	16,97	2.764
13	Ceper	46.144	45.176	45.256	47.089	43.516	3.573	-7,59	24,45	1.780
14	Pedan	60.953	60.686	61.155	60.339	58.274	2.065	-3,42	19,17	3.040
15	Karangdowo	64.494	64.760	64.770	62.900	62.757	143	-0,23	29,23	2.147
16	Juwiring	43.917	43.248	43.661	42.267	42.124	143	-0,34	29,79	1.414
17	Wonosari	42.886	42.783	42.969	41.146	41.013	133	-0,32	31,14	1.317
18	Delanggu	47.102	47.585	47.602	46.270	46.270	-	0,00	18,78	2.464
19	Polanharjo	55.386	55.283	55.419	53.634	53.696	- 62	0,12	23,84	2.252
20	Karanganom	61.475	61.905	62.312	60.171	60.232	- 61	0,10	24,06	2.503
21	Tulung	39.467	39.721	40.064	39.299	39.447	- 148	0,38	32	1.233
22	Jatinom	46.697	46.697	47.368	45.860	45.856	4	-0,01	35,53	1.291

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)					Pertumbuhan Penduduk 2020-2021	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%) 2020-2021	Luas wilayah (km2)	Kepadatan Penduduk
		2017	2018	2019	2020	2021				
23	Kemalang	37.877	37.943	38.116	37.083	37.108	- 25	0,07	51,66	718
24	Klaten Selatan	48.315	48.416	49.265	48.023	47.945	78	-0,16	14,43	3.323
25	Klaten Tengah	42.361	42.264	42.634	41.620	41.206	414	-0,99	8,92	4.620
26	Klaten Utara	44.518	44.965	45.687	43.908	43.927	- 19	0,04	10,38	4.232
Jumlah		1.300.706	1.308.712	1.316.880	1.330.802	1.276.030	54.772	-4,12	655,56	1.946

Sumber: DISDUKCAPIL, Update per Januari 2022.

Catatan: Data Semester I-2021, karena proses updating.

Berdasarkan Tabel 1.1. sebagaimana tersebut di atas, jumlah penduduk pada tahun 2017 mengalami penurunan atau minus. Hal ini berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa diketemukan adanya data ganda dan/atau data tidak normal, sehingga perlu dilakukan dibersihkan/validasi administrasi data kependudukan. Pada tahun 2017 sebanyak 1.308.712 jiwa, tahun 2018 menjadi 1.316.880 jiwa, pada tahun 2019 menjadi 1.323.609 jiwa, tahun 2020 menjadi sebanyak 1.330.802 jiwa, dan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 1.276.030 jiwa.

Tingkat kemajuan/kesejahteraan penduduk salah satunya diukur dengan Rasio Beban Tanggungan (RBT), dimana semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, begitu pula sebaliknya semakin rendahnya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Gambaran perkembangan RBT Tahun 2017-2021 disajikan Tabel 1.2.

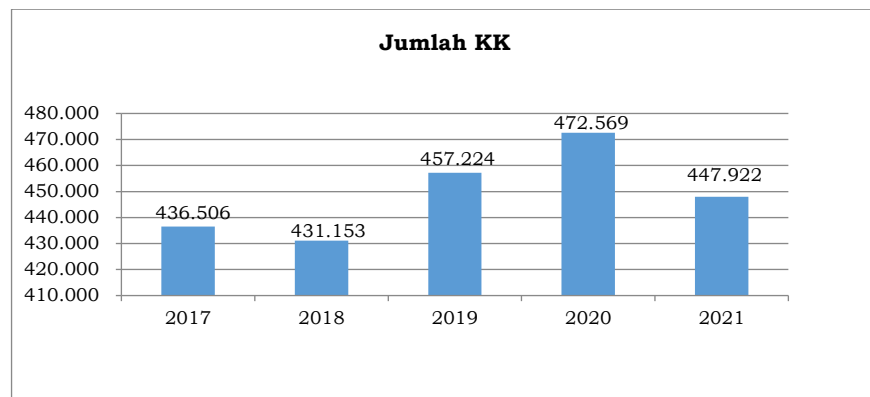
Tabel 1.2.
Rasio Beban Tanggungan (RBT)
Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

No	Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Jumlah Penduduk	Persentase RBT
		0-14	15-64	65+		
1	2017	275.208	907.665	125.839	1.308.712	44,18%
2	2018	263.474	911.174	142.232	1.316.880	44,53%
3	2019	272.466	941.241	109.902	1.323.609	40,62%
4	2020	274.675	1.192.919	137.883	1.330.802	34,58%
5	2021	272.279	881.070	122.681	1.276.030	44,83%

Sumber : DISDUKCAPIL Update per Januari 2022



Disamping RBT sebagaimana tersebut di atas, jumlah KK yang semula sejumlah 472.569 KK pada Tahun 2020 menjadi 447.922 KK pada Tahun 2021 (atau berkurang sebanyak 24.647 KK). Hal ini disebabkan adanya penertiban administrasi kependudukan. Gambaran perkembangan jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 disajikan pada Grafik 1.1.



Sumber : DISDUKCAPIL, Update per Januari 2021.

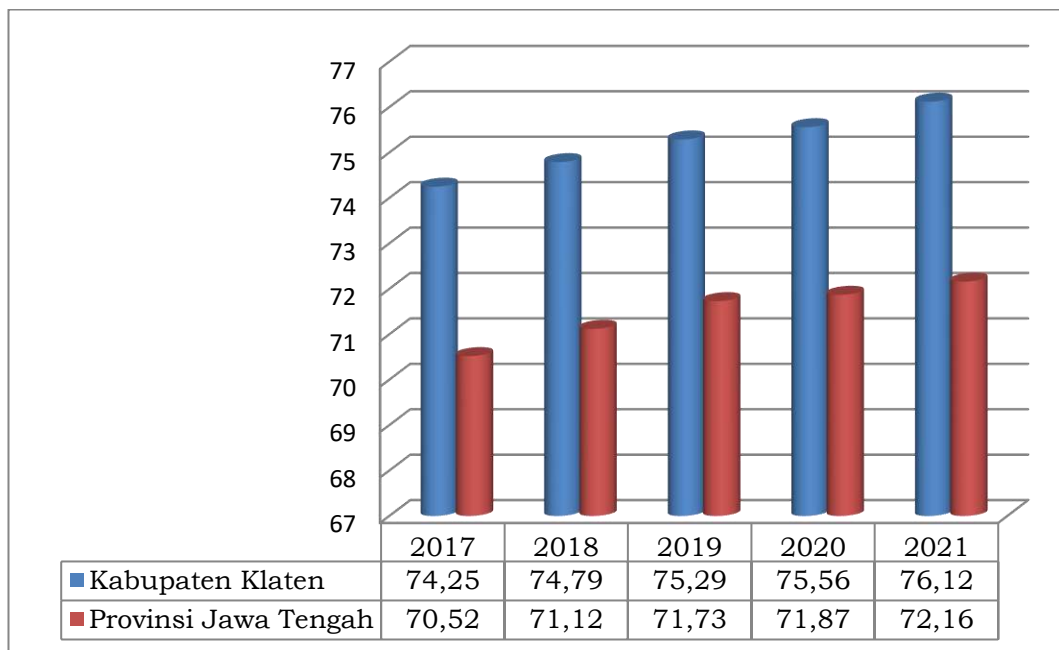
Grafik 1.1. Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Tahun 2017-2021

1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Berbagai program pembangunan khususnya dalam pembangunan manusia yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga) komponen esensial untuk kehidupan manusia, yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat diukur dengan Angka harapan Hidup, (ii) Pengetahuan (*knowledge*) diukur dengan Rata-rata lama sekolah dan Angka harapan lama sekolah (iii) Standar hidup layak diukur dengan Pengeluaran Riil Per kapita. Perkembangan angka IPM Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 disajikan pada Grafik 1.2.





Sumber : BPS Jateng. Update Terakhir 15 November 2021.

Grafik 1.2. Perkembangan Angka IPM Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Berdasarkan Grafik 1.2. di atas Angka IPM Kabupaten Klaten dari tahun 2017-2021 perkembangannya di atas rerata Provinsi Jawa Tengah, dan untuk mengetahui perkembangan komponen pembentuk IPM Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Indikator IPM	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup (tahun)	76,68	76,67	76,68	76,78	76,86
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,24	8,24	8,31	8,58	8,81
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,94	13,13	13,24	13,25	13,39
Pengeluaran Riil Per Kapita (dalam Ribuan Rp.)	11.369	11.738	12.074	11.921	12.017
IPM	74,25	74,79	75,29	75,56	76,12

Sumber : BPS JATENG. Update Terakhir 14 November 2021.



1.2.3 Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Klaten dapat disajikan dengan 2 (dua) pendekatan pendataan, yaitu: 1. Persentase penduduk miskin, dan 2. Jumlah rumah tangga miskin yang masing-masing dihitung dengan kriteria yang berbeda.

a. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan pada hasil survey Susenas, dimana angka yang diperoleh adalah angka makro. Adapun penentuan penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan pangan maupun non pangan. Garis kemiskinan setara dengan 2.100 kkal per kapita. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten selama tahun 2015-2019 cenderung mengalami penurunan walaupun penurunannya relatif lambat. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

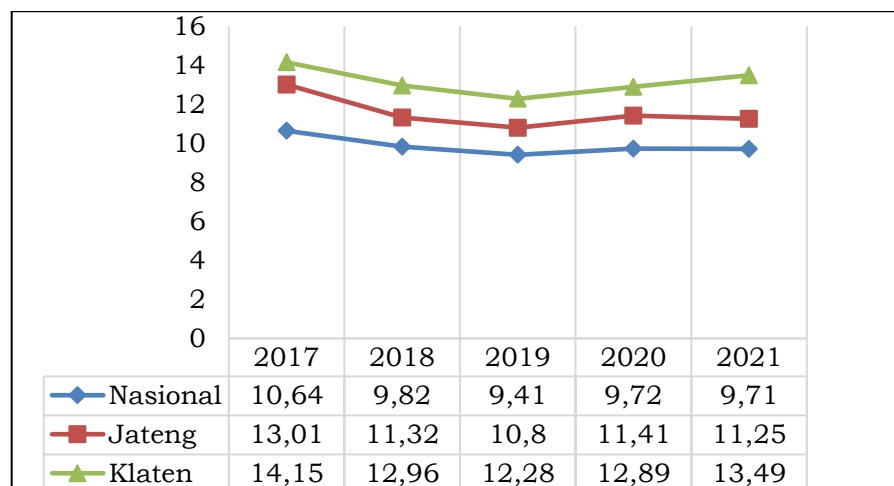
Tahun	Jumlah Penduduk <i>Disdukcapil</i> (Jiwa)	Jumlah Penduduk <i>BPS</i> (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	1.308.712	1.167.401	164.990	14,15
2018	1.314.781	1.171.411	151.730	12,96
2019	1.323.609	1.174.986	144.140	12,28
2020	1.330.802	1.260.506	151.830	12,89
2021	1.276.030	NA	158.230	13,49

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, Update Data Terakhir 17 Januari 2022.



Pada tahun 2020 angka persentase penduduk miskin mengalami penambahan sebesar 0,61% dibanding tahun 2019, hal ini didorong adanya pandemi Covid-19, sekalipun percepatan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dari pemerintah turun tepat waktu, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), pengendalian inflasi dan lain-lain.

Perkembangan relevansi persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten tahun 2017-2021 disajikan pada Grafik 1.3.



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Update Terakhir 17 Januari 2022.

Grafik 1.3. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021.

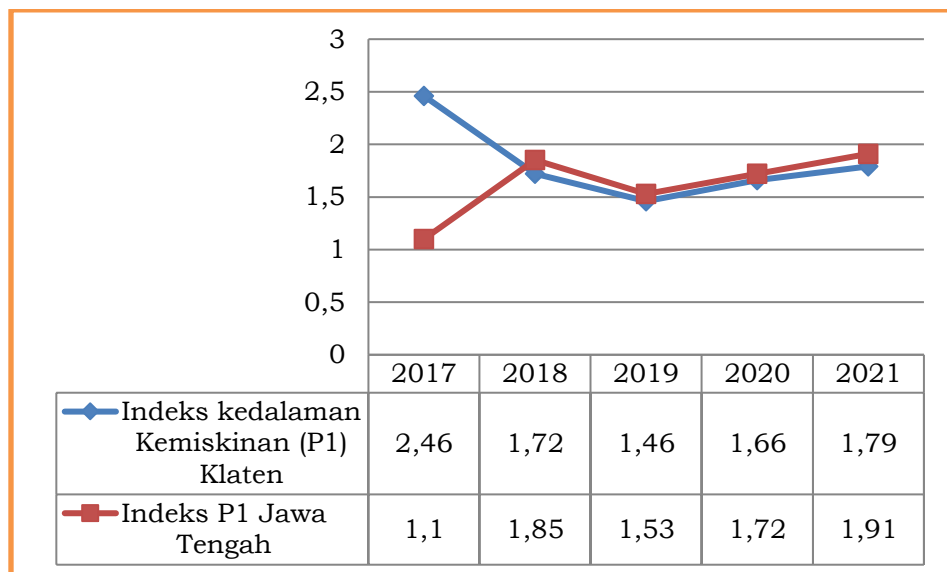
Peningkatan angka kemiskinan terjadi baik di Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, hal ini dikarenakan dampak Pandemi Covid-19, sekalipun dukungan keberhasilan program penganggulangan kemiskinan lintas sektor dirasa cukup signifikan. Namun angka kemiskinan Kabupaten Klaten masih di atas angka kemiskinan provinsi dan nasional, hal ini disebabkan kesulitan penurunan kemiskinan karena terjadinya *inclusion error* yaitu kesalahan



sasaran penerimaan program. Masyarakat yang sebenarnya tidak berhak justru menerima bantuan alih-alih warga miskin. "Ada *exclusion error*, yaitu kesalahan yang terjadi karena orang yang seharusnya menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan namun kenyataannya malah tidak menerima, begitu pula sebaliknya. Orang tidak miskin malah dapat bantuan".

b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Data Kemiskinan Makro

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dapat disajikan pada Grafik 1.4.



Grafik 1.4. Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kab. Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah 2017-2021

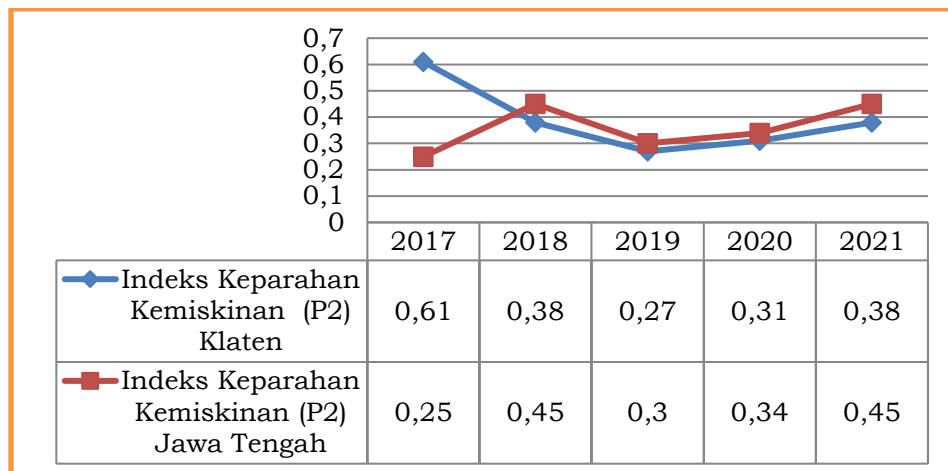
Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Update Terakhir 25 November 2021.

Pada Grafik 1.4. ditunjukkan Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten pada tahun 2021 sebesar 1,79 posisinya di bawah Provinsi Jawa Tengah (1,91).



c. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Data Kemiskinan Makro

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran untuk mengetahui penyebaran ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021 disajikan pada Grafik 1.5.



Grafik 1.5. *Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021.*

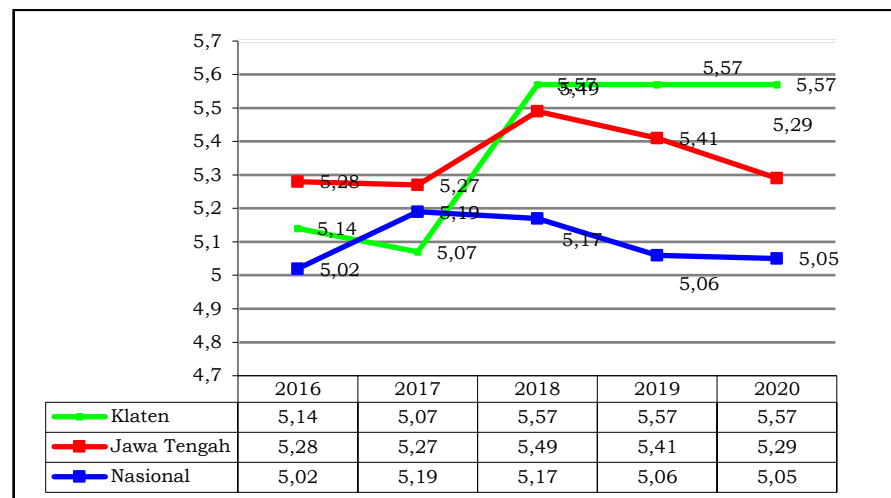
Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Update Terakhir 25 November 2021.

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten tahun 2017-2021 terhadap perkembangan realisasi Provinsi Jawa Tengah, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten pada tahun 2021 (0,38) di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (0,45).

1.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 menunjukkan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Tahun 2016 sebesar 5,14%, Tahun 2017 sebesar 5,07%, dan pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,44%, dan tahun 2019 menjadi 5,57% hal ini sebagai dampak adanya pelaksanaan program pembangunan yang sinergis antar sektor. Namun pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi di daerah sampai nasional mengalami kontraksi pada kisaran -3,49%.

Perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada Grafik 1.6.



Sumber : BPS Kab. Klaten, 2020 (diolah).

Grafik 1.6. Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten atas Dasar Harga Konstan 2010 selama Tahun 2016-2020 tumbuh secara positif. Gambaran selengkapnya Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 1.5.



Tabel 1.5.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 (dalam Rp. Juta)

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.814.072,15	2,99	2.845.097,06	1,10	2.908.070,61	2,21	2.925.616,92	1,23	2.987.750,18	2,12
2	Pertambangan dan Penggalian	635.553,28	2,93	664.166,20	4,50	685.313,55	3,18	706.900,93	3,15	705.045,28	-0,26
3	Industri Pengolahan	8.004.239,75	6,15	8.504.714,04	6,25	9.013.718,21	5,98	9.601.710,72	6,52	9.485.050,46	-1,21
4	Pengadaan Listrik dan gas	41.588,12	6,20	44.249,82	6,40	47.094,12	6,43	49.644,40	5,42	51.883,91	4,51
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12.047,34	2,16	12.826,81	6,47	13.532,60	5,50	14.308,02	5,73	14.735,75	2,99
6	Konstruksi	1.435.985,49	5,87	1.531.575,76	6,66	1.635.233,26	6,67	1.745.775,03	6,76	1.711.576,48	-1,96
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.362.061,18	3,63	4.531.078,43	3,37	4.719.954,10	4,17	4.923.412,16	4,31	4.687.427	-4,79
8	Transportasi dan Pergudangan	566.772,32	4,07	597.101,45	5,35	625.692,51	4,79	656.720,86	4,96	468.118,98	-28,72
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	883.680,17	6,11	944.707,06	6,91	1.018.074,62	7,77	1.098.344,48	7,78	1.043.075,16	-5,03
10	Informasi dan Komunikasi	908.551,37	7,56	1.026.807,26	13,02	1.147.054,83	11,71	1.282.866,12	11,84	1.511.722,42	17,84
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	821.907,83	7,07	857.588,05	4,34	887.591,04	3,50	915.313,03	3,12	947.598,17	3,53
12	Real Estate	361.069,45	6,23	382.324,67	5,89	401.354,47	4,98	420.057,59	4,66	419.048,02	-0,24
13	Jasa Perusahaan	77.484,45	9,19	83.734,52	8,07	90.076,27	7,57	96.931,07	7,61	90106,9	-7,04
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	591.863,52	2,96	610.862,34	3,31	631.265,14	3,34	641.455,60	1,61	633.375,54	-1,26
15	Jasa Pendidikan	1.520.064,74	5,66	1.607.474,21	5,75	1.720.461,03	7,03	1.842.721,54	7,11	1.839.363,29	-0,18
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	260.226,42	7,86	282.328,51	8,49	307.894,68	9,06	336.313,36	9,23	364.377,77	8,34
17	Jasa Lainnya	428.573,40	8,03	466.467,08	8,84	508.328,89	8,97	553.417,66	8,87	522.657,38	-5,56
Produk Domestik Regional Bruto		23.725.740,98	5,17	24.983.103,27	5,34	26.360.649,93	5,47	27.811.509,49	5,57	27.482.912,88	-1,18

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, Update Data Terakhir Maret 2021.

Berdasarkan Tabel 1.5. dapat diketahui bahwa PDRB atas dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.22.558.976,15 juta pada tahun 2015, meningkat menjadi sebesar Rp. 27.829.653,91 juta pada tahun 2019 (atau rata-rata naik 4,67%), dan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 27.482.912,88 (atau turun 1,18).

Jika dilihat Atas Dasar Harga Konstan sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang menurun. Sektor Transportasi dan Pergudangan pada tahun 2020 tumbuh paling rendah diantara sektor lainnya, hal ini disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19.

Sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh paling tinggi, karena penggunaan IT lebih ditekankan pada masa pandemi Covid-19. Sektor lain yang protektif, dan tumbuh pesat adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial. Sektor ini tumbuh karena kebutuhan masyarakat akan jasa kesehatan meningkat sangat pesat di masa pandemi Covid-19..

Sementara itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010, pada Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6.
 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten
 Tahun 2016-2020 (dln Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.810.348,98	5,19	3.880.677,98	1,85	4.085.464,24	5,28	4.206.652,77	2,97	4.371.379,48	3,92
2	Pertambangan dan Penggalian	1.030.613,84	7,88	1.112.144,57	7,91	1.177.376,22	5,87	1.245.553,58	5,79	1.253.648,24	0,65
3	Industri Pengolahan	11.381.482,63	11,82	12.446.837,51	9,36	13.611.869,50	9,36	14.726.080,24	8,19	14.936.275,20	1,43
4	Pengadaan Listrik dan gas	44.053,13	11,07	50.784,96	15,28	55.741,58	9,76	58.861,29	5,60	61.152,53	3,89
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13.246,78	4,32	14.143,63	6,77	14.964,95	5,81	16.371,66	9,40	17.009,23	3,89
6	Konstruksi	1.914.709,83	7,56	2.094.601,40	9,40	2.333.361,55	11,40	2.552.697,54	9,40	2.520.283,15	-1,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.292.431,30	6,97	5.631.766,56	6,41	6.000.014,15	6,54	6.430.015,48	7,17	6.145.077,58	-4,43
8	Transportasi dan Pergudangan	645.183,06	4,95	690.596,13	7,04	729.681,82	5,66	779.971,91	6,89	572.539,83	-26,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.091.254,92	11,94	1.180.067,24	8,14	1.284.456,54	8,85	1.404.195,46	9,32	1.357.399,84	-3,33
10	Informasi dan Komunikasi	948.913,65	7,77	1.119.938,75	18,02	1.252.092,63	11,80	1.419.789,34	13,39	1.674.713,98	17,96
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.081.527,12	9,71	1.175.828,75	8,72	1.259.961,03	7,16	1.321.513,91	4,89	1.366.776,47	3,43
12	Real Estate	409.338,03	7,42	444.310,49	8,54	477.618,78	7,50	509.514,95	6,68	510.799,94	0,25
13	Jasa Perusahaan	102.585,38	13,40	115.088,85	12,19	126.797,73	10,17	139.716,72	10,19	132.489,52	-5,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	792.119,46	8,37	844.376,28	6,60	882.410,22	4,50	908.656,78	2,97	910.583,18	0,21
15	Jasa Pendidikan	2.160.832,68	8,90	2.379.643,26	10,13	2.606.214,15	9,52	2.881.198,28	10,55	2.898.739,98	0,61
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	372.019,69	9,63	409.870,96	10,17	452.676,88	10,44	495.228,51	9,40	550.782,80	11,22
17	Jasa Lainnya	528.580,71	12,30	584.142,53	10,51	642.768,49	10,04	703.188,73	9,40	670.824,63	-4,60
	Produk Domestik Regional Bruto	31.619.241,19	8,78	34.174.819,85	9,24	36.993.470,46	8,21	39.799.207,15	7,78	39.950.475,58	0,38

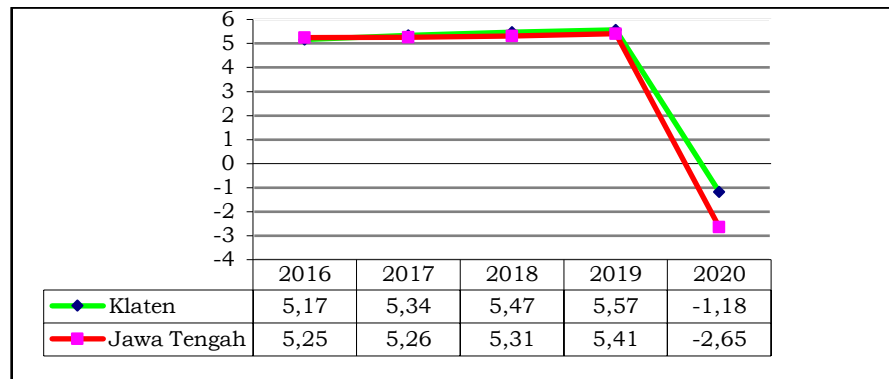
Sumber: BPS Kabupaten Klaten. Update Data Terakhir Per 08 Oktober 2021.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.31.619.241,19 juta pada tahun 2016, meningkat menjadi sebesar Rp.39.799.207,15 juta pada tahun 2019 (atau rata-rata naik 8,50%), sedangkan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 39.950.475,58 (atau naik 0,38% jika dibandingkan dengan tahun 2019).

Sedangkan jika dilihat Atas Dasar Harga Berlaku sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha terjadi pertumbuhan yang sifatnya fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang menurun. Pada tahun 2019, kontribusi terbesar atas dasar harga berlaku masih disumbang oleh sektor industri pengolahan sebesar 7,17% atau Rp.6.430.015,48 juta, dan sumbangan terendah dari sektor Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebanyak Rp. 16.371,66 Juta (atau dengan daya tumbuh 9,40%). Sedangkan pada tahun 2020 sektor Informasi dan Komunikasi berkontribusi terbesar atas dasar harga berlaku yaitu sebesar 17,96% dan yang terendah adalah sektor Transportasi dan Pergudangan yaitu --26,59%.

Sedangkan sebagai gambaran Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 sebagaimana Grafik 1.7.





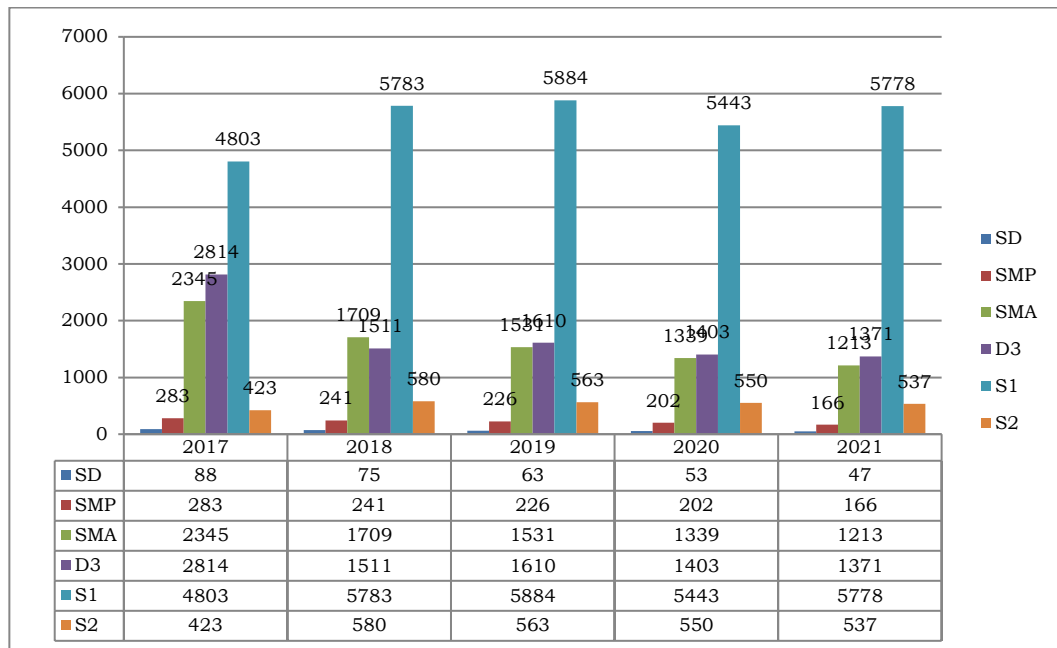
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Update Terakhir per April 2021.

Grafik 1.7. Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten pada tiga tahun terakhir (2017-2020) sudah di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah, hal ini menandakan perkembangan perekonomian di Kabupaten Klaten jauh lebih baik dibanding rerata Provinsi. Pada tahun 2020 perkembangan perekonomian Klaten, maupun Jateng terkontraksi karena adanya pandemi *Covid-19*.

1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten

Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten berdasarkan jumlah ASN pada tahun 2017 sebanyak 10.756 orang, dan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 9.112 orang (atau turun 15,28%). Penurunan jumlah ASN ini karena banyak yang memasuki purna tugas, sementara penambahan ASN sangat terbatas. Gambaran singkat profil jumlah ASN berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2017-2021 disajikan dalam Grafik 1.8.



Sumber : BKPPD, Update per Januari 2022.

Grafik 1.8 Profil Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Berdasarkan Grafik 1.8. sebagaimana tersebut di atas, apabila dilihat dari peta penyebaran jumlah jabatan ASN Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7.
Jabatan ASN Kabupaten Klaten
Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi Pemerintah	Orang	21	27	26	24	25
Jumlah jabatan administrasi pada instansi Pemerintah	Orang	3.450	2.935	2.855	2.664	557
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi Pemerintah	Orang	7.179	6.963	6.940	6.449	6.007
Jumlah pemangku jabatan pelaksana (Fungsional Umum)	Orang	-	-	-	-	2.523

Sumber: BKPPD Update per Januari, 2022.

Berdasarkan Tabel 1.7. sebagaimana tersebut di atas, dari tahun ke tahun jumlah jabatan baik pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan pemangku jabatan fungsional tertentu cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan persyaratan jabatan yang harus diikuti ASN belum terpenuhi. Disamping itu pada tahun 2021 karena adanya reformasi birokrasi, jabatan administrasi pada instansi Pemerintah mengalami pergeseran menjadi pemangku jabatan pelaksana (Fungsional Umum). Berikut ASN dan Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 1.8.

Tabel 1.8
ASN dan Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	78,52	99	116	11,26	19,37
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	44,98	52,46	60,25	60,13	0

Sumber: BKPPD Update per Januari, 2022.

Berdasarkan Tabel 1.8. sebagaimana tersebut di atas, kondisi jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, maupun Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural setiap tahunnya cenderung menurun, hal ini menandakan masih diperlukan peningkatan sumber daya aparatur agar kinerja ASN meningkat. Sedangkan manajemen pengelolaan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 1.9.

Tabel 1.9.
Manajemen Pengelolaan ASN
Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	81,20	62	77,5	78,06	Na
Indeks Sistem Merit	Indeks	Na	Na	Na	160,5	204,5
Persentase ASN yang Mengikuti Diklat	%	79,52	99	116	11,26	155,86
Persentase Layanan Sumber Daya Aparatur	%	93,66	93,75	95	90	95,11
Persentase Pembinaan Disiplin ASN	%	48	52	56	100	103,03
Persentase Informasi Kepegawaian yang Akurat	%	94	90	80	54	101,20
Persentase Pengembangan Aparatur	%	76	83	96	70	90,93

Sumber: BKPPD Update per Januari, 2022.

Berdasarkan Tabel 1.9. sebagaimana tersebut di atas, kinerja kepegawaian menunjukkan trend positif, hal ini adanya pembinaan dan manajemen ASN sesuai dengan tata kelola ASN yang makin transformatif sesuai dengan peningkatan budaya kerja.

1.5 Isu Strategis

Isu strategis menjadi prioritas pembangunan jangka menengah Daerah yang menjadi skala prioritas untuk wajib ditangani permasalahannya, baik melalui intervensi kebijakan daerah maupun agenda aksi Pemerintah Kabupaten Klaten. Sedangkan isu yang ditetapkan pada tahun 2021, diantaranya:



a. Tata Kelola Pemerintahan

Upaya untuk melaksanakan **Otonomi Daerah** itu adalah mewujudkan **Good Governance**. Salah satu penghambat penerapan *good governance* adalah reformasi birokrasi di daerah yang belum berjalan mulus. Isu reformasi birokrasi selama ini belum menyentuh akar permasalahan peningkatan pelayanan publik dalam hal memperbaiki tata kelola pemerintahan yang mencakup seluruh aspek manajemen untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yang meliputi birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

d. Penguatan Ekonomi Daerah

Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Klaten pada Tahun 2020 sebesar -1,18% masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (-2,65%) hal ini berkontraksi akibat pandemi Covid-19. 3 (tiga) Sektor yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten antara lain Informasi dan komunikasi sebesar 17,96%, diikuti sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,22 %, dan sektor Pengadaan Listrik dan gas sebesar 3,89% sektor lainnya tumbuh negatif.

Upaya penguatan ekonomi daerah diarahkan untuk memanfaatkan potensi lokal secara optimal dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk. Beberapa sektor ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan subsektor terkait perlu dikembangkan dan dikelola secara berencana menurut dukungan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya sosial yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

e. Kualitas Pembangunan Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses keberhasilan suatu pembangunan, karena pengembangan suatu daerah tidak lepas dari pengembangan sumber daya manusianya. Aspek pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting dalam meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan.



Beberapa persoalan pendidikan yang masih menjadi masalah di Kabupaten Klaten antara lain masih terdapatnya anak usia sekolah yang berhak mendapatkan layanan pendidikan dasar tapi tidak sekolah, belum semua kualitas sarana prasarana pendidikan PAUD dan pendidikan dasar dalam kondisi baik, masih rendahnya kualitas siswa pendidikan formal dan non formal. Sedangkan persoalan yang berkaitan dengan masalah kesehatan antara lain masih kurangnya sarana, prasarana dan SDM pelayanan kesehatan yang memenuhi standar, angka kematian ibu, bayi dan balita yang masih cukup tinggi, belum optimalnya pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Oleh karena itu, pentingnya aspek pendidikan dan kesehatan dalam pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan.

f. Kemiskinan dan Pengangguran

Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu isu strategis, walaupun angka kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami penurunan, pada tahun 2017 sebesar 14,15% turun menjadi angka 12,96% pada tahun 2018 (masih di bawah rata-rata angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 11,32% dan juga angka kemiskinan Nasional yang sebesar 9,82%). Namun tahun 2020 angka kemiskinan Klaten naik menjadi 12,89%, dan Provinsi sebesar 11,41%.

Persoalan yang menyebabkan kemiskinan antara lain karena ketidakmampuan masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan dasar karena tingkat pendapatan yang masih rendah, rendahnya kualitas angkatan kerja di dalam persaingan kerja sehingga belum memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.

Upaya mengentaskan kemiskinan harus mengedepankan program yang berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses



masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

g. Penanganan Infrastruktur

Peningkatan kualitas infrastruktur daerah menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Salah satu yang menjadi perhatian dan menarik minat investor untuk berinvestasi salah satunya adanya infrastruktur yang baik. Hal ini juga sudah ditegaskan dengan Instruksi Presiden agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mengalokasikan sekurang-kurangnya 30% APBN/APBD untuk sektor infrastruktur. Serta adanya jalan tol Solo-Yogya akan berdampak terhadap sosial ekonomi masyarakat.

h. Lingkungan Hidup dan Bencana Alam

Isu lingkungan hidup yang dihadapi antara lain pencemaran dan kerusakan lingkungan, kurang kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah, dan kurangnya ruang terbuka hijau.

Selain lingkungan hidup, bencana alam juga perlu dijadikan prioritas, mengingat akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam di banyak daerah di Indonesia. Pada dasarnya, bencana alam memiliki keterkaitan erat dengan kondisi, pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Kerawanan terhadap bencana yang dihadapi Kabupaten Klaten seperti erupsi gunung merapi, banjir, tanah longsor dan angin ribut, yang jika tidak dilakukan mitigasi bencana, akan menimbulkan banyak jatuh korban jiwa dan juga harta benda. Oleh karena isu lingkungan hidup dan tanggap bencana merupakan permasalahan yang serius karena menyangkut kelangsungan kehidupan manusia. Terakhir permasalahan *Covid-19* dengan angka ikutan pandemi, serta upaya penanganannya dengan *new-normal* membuat penyelenggaraan pemerintah harus menyesuaikan kondisi.

BAB II PERENCANAAN

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan antara visi, misi dan arah pembangunan daerah. Penyajian analisis dalam bagian permasalahan pembangunan yang mengawali bagian analisis isu-isu strategis, diharapkan akan dapat menjelaskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2021.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Sehingga rumusan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah: “*Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur*”.

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, dengan Visi: “*Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari*”.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah: “*Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera Yang Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya*”.

BAB II PERENCANAAN KINERJA,
berisi :

2.1 Rencana Strategis

2.2 Penetapan Kinerja (PK)

Tahun 2021

**2.3 Pentahapan dan Program
Prioritas Tahun 2021**

Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi dan peluang yang dimiliki, serta untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah:

Dasar Filosofi Misi RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016-2021, yakni:

Pertama : **Redi - tinamping**, artinya seorang pemimpin harus bisa aju-ajer dengan masyarakat.

Kedua : **Jiwan - danarta**, artinya seorang pemimpin harus mampu membaca tanda-tanda zaman. Rumusan RPJM yang kita susun, tak lebih sebagai aktualisasi diri membaca tanda-tanda zaman.

Ketiga : **Lir - ginelar**, artinya dalam mengambil keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Itulah mengapa perlunya Musrenbangda RPJM.

Keempat : **Pitraya - inyika**, artinya jiwa pengabdian seorang pemimpin harus dilandasi adanya semangat untuk melayani. Itulah maknanya semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten diwajibkan fokus pada urusan pelayanan dasar.

Kelima : **Andaya - wilang**, artinya seorang pemimpin jangan mengumbar janji, dan memelihara rasa "ewuh pakewuh" tetapih fokus pada tujuan semula, dalam bahasa Permendagri: aspek kesejahteraan, pelayanan publik, dan daya saing daerah harus tetap sebagai arah kebijakan pembangunan daerah.

Keenam : **Surya - sribhawanti**, artinya kehadiran negara harus menjadi pelindung peradapan.

Ketujuh : **Rohartaya**, artinya selalu harus insaf dan tawakal.

Kedelapan : **Traju - tresna**, artinya arif dan bijaksana

14

MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING

Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2. Maju**, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik *kebutuhan lahiriah* yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun *kebutuhan batiniah* yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
- 3. Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
- 4. Berdaya Saing**, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.



Misi

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah sebagai implementasi Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 yang dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;
- Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- Misi 3 : dan bersih;
Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan
- Misi 4 : berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
- Misi 5 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar
- Misi 6 : sosial masyarakat;
Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan
- Misi 7 : kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
- Misi 8 : Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan
Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sementara sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran memuat penjabaran visi dan misi yang lebih terukur dalam jangka



waktu perencanaan, serta memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan. Sehingga adanya rumusan sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu dalam mempermudah perumusan indikator kinerja.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 memiliki tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berbudaya

Misi ini didukung dengan 6 (enam) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 :Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat.

Sasaran 1 : Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal.

Tujuan 2 :Mewujudkan kualitas derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian, angka kesakitan dan kecacatan.

Sasaran 2 : Menurunnya angka kelahiran (*Total Fertility Rate*)

Sasaran 3 : Meningkatkan pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitannya oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.

Tujuan 3 :Menurunkan tingkat kemiskinan.

Sasaran 1 : Meningkatkan upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM.

Tujuan 4 :Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk.

Sasaran 1: Menurunnya angka kelahiran (*Total Fertility Rate*).



Tujuan 5 :Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Berprestasi dan Berbudaya.

Sasaran 1 : Meningkatkan Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.

Sasaran 2 : Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.

Tujuan 6 :Meningkatkan minat baca masyarakat.

Sasaran 1 : Meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Misi 2

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Misi ini didukung dengan 4 (empat) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

Sasaran 1 : Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD.

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Tujuan 2 : Meningkatnya pengelolaan dan penataan arsip daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola arsip SKPD.

Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa

Sasaran 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel

Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.



- Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah.
- Sasaran 3 : Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM .
- Sasaran 4 : Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan.
- Sasaran 5 : Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel.
- Sasaran 6 : Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan.
- Sasaran 7 : Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian.
- Sasaran 8 : Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat.

Misi 3

Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Lebih Produktif, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal;

Misi ini didukung dengan 5 (lima) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing untuk kesejahteraan Masyarakat.

Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Tujuan 2 : Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa.

Sasaran 1 :Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan.

Tujuan 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat.

Sasaran 1 : Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata.



Sasaran 2 : Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Sasaran 3 : Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah.

Sasaran 4 : Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal.

Tujuan 4 : Menurunkan tingkat pengangguran terbuka

Sasaran 1 : Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan.

Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan.

Tujuan 5 : Meningkatnya daya saing produk industri daerah.

Sasaran 1 : Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian.

Misi 4

Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Kebutuhan Sarana Prasarana Dasar Sosial Masyarakat;

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Misi 5

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan dan Kelestarian Sumber Daya Alam yang Selaras dengan Tata Ruang Wilayah;

Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan kelestarian sumber daya alam.

Sasaran 1 : Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang.

Sasaran 2 : Terjaganya kualitas lingkungan hidup.



Tujuan 2 : Mewujudkan pengurangan resiko bencana.

Sasaran 1 : Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana.

Misi 6

Mewujudkan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian;

Misi ini didukung dengan 3 (tiga) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tataan kehidupan masyarakat yang mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan.

Sasaran 1 : Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi.

Tujuan 2 : Meningkatkan pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan.

Sasaran 1 : Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya.

Tujuan 3 : Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sasaran 1 : Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Misi 7

Meningkatkan Kapasitas Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak;

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan kualitas pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak.

Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak.



Misi 8

Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik;

Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas layanan masyarakat.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan perhubungan.

Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas.

Tujuan 2 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi.

Sasaran 1 : Pengembangan ketransmigrasian.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan IKU (indikator kinerja utama) Kabupaten Klaten sebagai ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan, dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) dari berbagai program prioritas sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Perumusan IKU Kabupaten Klaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
(1)	(2)	(3)	
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka	2.1	Kasus kematian Ibu
		2.2	Angka Kematian Bayi
		2.3	Angka kematian Balita

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
(1)	(2)	(3)	
	Kesakitan dan Kecacatan	2.4	Prevalensi Gizi Buruk (BB/U)
3	Menurunnya Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	3.1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh Masyarakat Dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit.	4.1	Usia Harapan Hidup
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	5.1	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
		5.2	Persentase Penguatan Kapasitas PSKS
		5.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase Kenaikan Kunjungan Masyarakat
9	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN
10	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	10.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
11	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang Disahkan Tepat Waktu
12	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan Ketepatan Waktu Perencanaan
13	Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD	13.1	Prosentase kenaikan SKPD Mengelola Arsip Secara Baku
14	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel	14.1	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel
15	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	15.1	Level Maturitas SPIP
		15.2	Level Kapabilitas APIP
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
(1)	(2)	(3)	
17	Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang Undangan Serta Bantuan Hukum dan HAM	17.1	Persentase Tercapainya Penyusunan
		17.2	Produk Hukum dan Penanganan Perkara
18	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)
19	Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Kredibel	19.1	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik yang Sesuai Regulasi
20	Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan	20.1	Persentase Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Kepala Daerah
		20.2	Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah
		20.3	Persentase Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah
21	Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY
22	Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat	22.1	Persentase Keterlibatan Stakeholder Dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesra
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Prosentase Desa yang Memiliki LEM, LED dan Posyantek
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
		26.2	Persentase UMKM yang Memiliki Daya Saing
27	Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah	27.1	Prosentase Inovasi yang Diterapkan
28	Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal	28.1	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMDN/PMA)
		28.2	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA)
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio Penduduk yang Bekerja
		29.2	Angka Partisipasi Angkatan Kerja
30	Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan	30.1	Besaran Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
(1)	(2)	(3)	
31	Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas, dan Daya Saing Sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
		31.2	Persentase IKM yang Memiliki Daya Saing
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks Layanan Infrastruktur
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan
34	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	34.1	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
35	Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Konsep Tata Ruang	35.1	Ketaatan Terhadap RTRW
36	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	36.1	Indeks Kualitas Air
		36.2	Indeks Kualitas Udara
		36.3	Indeks Tutupan Vegetasi (lahan)
37	Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana	37.1	Kelas Indeks Kapasitas Bencana
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks Demokrasi
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)
40	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	40.1	Indeks ketertiban masyarakat
41	Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	41.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)
42	Meningkanya Kualitas Layanan Perhubungan	42.1	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
44	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas	44.1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
45	Pengembangan Ketransmigrasian	45.1	Persentase Besaran Peningkatan Minat Transmigrasi

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten 2016-2021.



2.1.3 Pentahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan visi bupati terpilih pada periode Tahun 2016-2021 yakni **Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing** dengan menetapkan 8 (delapan) butir misi sebagai penjabaran atas visi dalam rangka perwujudan *ultimate goal*. Maka agar *ultimate goal* ini jelas sasarannya, dan dapat diimplementasikan perlu disusun pentahapan pembangunan daerah sebagai *milestone* (sasaran antara) dalam mewujudkan visi.

Gambaran tema/agenda pembangunan dari tahun 2017-2021 dapat disajikan dalam Diagram 2.1.



Diagram 2.1. Tema/Agenda Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Mendasarkan pada arah tema/agenda pembangunan tersebut, perlu dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan daerah yang disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Klaten untuk setiap tahunnya. Sedangkan korelasi antara Tujuan dan Misi Pembangunan Daerah disajikan pada Diagram 2.2.

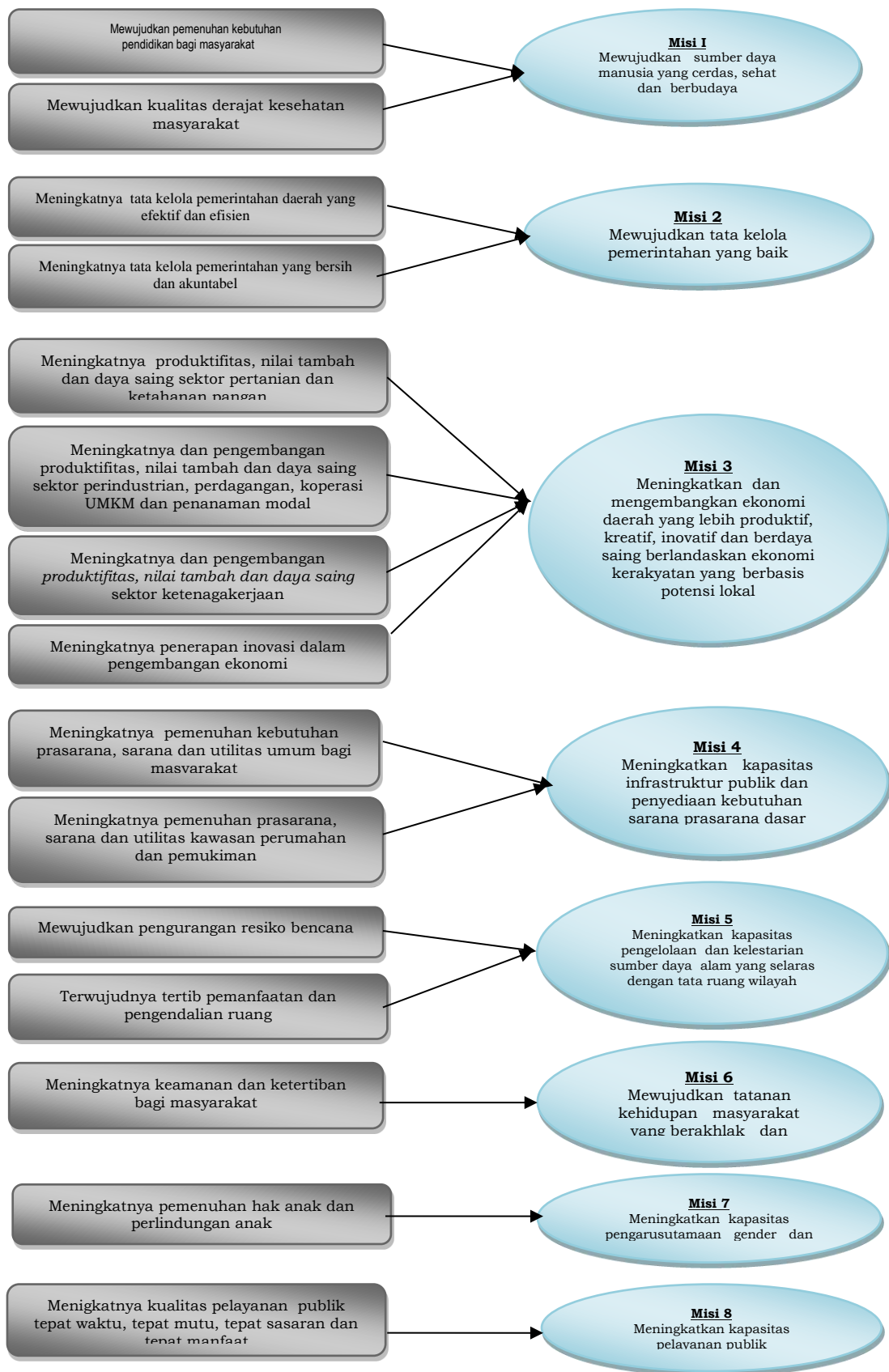


Diagram 2.2 Korelasi antara Tujuan dan Misi Pembangunan Daerah

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan berdasarkan sasaran strategis, serta didukung Program Prioritas agar lebih sistematis dan terukur ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah Daerah. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ditetapkan mengacu pada RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 pada tahun berkenaan, serta RKPD 2021. Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2021 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2021

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)		Satuan (4)	Target (5)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	55,00
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	95
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian, angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu	Kasus	14
		2.2	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,07
		2.3	Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,61
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,7
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	3.1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)/TFR	Indeks	2,10
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	4.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,62

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	5.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	89
		5.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	100
		5.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	12,9
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	87,36
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP (4)
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	90
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	13.1	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	14.1	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	100
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP	Tingkat	3
		15.2	Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	70(BB)
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,1



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90
		17.2	Indeks Kabupaten Peduli HAM	%	90
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	100
		20.2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	100
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	100
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,6
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek	%	58
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,38
		26.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	15
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	100
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):		
			PMDN	%	483
			PMA	%	294
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):		
			PMDN	%	2,5
			PMA	%	2,55
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,08
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	88,2
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	35,2
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	7,5
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	40,81
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	57,52
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks	74,4
35	Terkendalnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	80
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks kualitas air	Indeks	40,46
		36.2	Indeks kualitas udara	Indeks	84,46
		36.3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	Indeks	58,60
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks kapasitas bencana	Indeks	Sedang 119

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks demokrasi	Indeks	75,7
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	100
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	100
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indeks	60,37
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nindya 750
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	81,08
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	80
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Indeks	Sdh
45	Pengembangan ketransmigrasian	45.1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	42,00

2.3 Program Pendukung Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya untuk mencapainya kemudian dijabarkan kedalam program prioritas untuk mendukung tercapainya pembangunan jangka menengah Daerah. Adapun program prioritas untuk mendukung tercapainya sasaran, sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Program Pendukung Pencapaian Sasaran

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Pendukung
(1)	(2)	(3)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	5
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	5
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>).	3
4	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	6
5	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitannya oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	2
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	2
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	5
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	1
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	3
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	4
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	2
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	4
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	3
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	4
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	1
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	1
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	1
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	1
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	1
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	1

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Pendukung
(1)	(2)	(3)
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	1
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	6
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	1
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	5
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	6
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	1
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	6
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	5
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	1
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	3
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	10
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	2
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	6
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	1
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	10
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	2
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	6
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	1
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	6
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	6
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	1
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	1
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	4
45	Pengembangan ketransmigrasian	1
Jumlah		147

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah Daerah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya sebagai upaya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak dari pelaksanaan pembangunan Daerah.

Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi Pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan telah mampu mengatasi permasalahan pembangunan, dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Salah satu dasar rujukan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terutama terkait dengan penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari masing-masing sasaran strategis. Adapun skala nilai peringkat kinerja sebagaimana dimaksud, dapat disajikan pada Tabel 3.1.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA,
berisi :
3.1 *Capaian Kinerja Organisasi*
3.2 *Evaluasi dan Analisis Kinerja*
3.3 *Akuntabilitas Anggaran*
3.4 *Efisiensi Sumber Daya*

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,01 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,01 \leq 75$	Sedang	
4	$50,01 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

Tabel 3.2.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\leq 99,9$	Tercapai (Tinggi)	
2	≥ 100	Tidak Tercapai (Sangat Rendah)	

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, capaian indikator kinerja organisasi yang dilaksanakan



Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2021 sebagaimana Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	55,00	97,84	177,89
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	95,00	88,70	93,36
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu	Kasus	14	45	321,43
		2.2	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,07	10,54	104,67
		2.3	Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,61	1,56	96,89
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,7	0,93	132,86
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	3.1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)/TFR	Indeks	2,10	1,6	76,19
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitian oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	4.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,62	76,86	100,31
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	5.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	89	97,27	109,29
		5.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	100	100	100
		5.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	12,9	13,19	102,24



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10	17	170,00
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	28	560,00
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6	16,67	277.83
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10	0	0
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5	-83,34	-1667
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	87,36	78,06	89,35
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP (4)	WTP (4)	100
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	90	81,82	90,91
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	100	100
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	13.1	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	1,68	33,60
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	14.1	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	100	100	100
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP	Tingkat	3	3	100
		15.2	Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3	3	100
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	70 (BB)	62,07 (B)	88,67
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,1	3,2109	103,58



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90	100	111,11
		17.2	Indeks Kabupaten Peduli HAM	%	90	95,7	106,33
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90	96	106,67
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	100	100
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	100	100	100
		20.2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	100	100	100
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	100	100	100
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)	2,58	73,71
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95	95	100
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,6	10,87	86,27



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	%	58	57,69	99,47	
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25	3,22	12,87	
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,38	19,98	103,10	
		26.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	15	12	80	
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	100	85,3	85,3	
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):					
				PMDN	%	483	8	1,66
				PMA	%	294	231	78,57
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):					
				PMDN	%	2,5	97	3880,00
PMA	%	2,55	319	12509,80				
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,08	0,76	70,37	
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69	86,94	126,00	
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	88,20	59,91	67,93	
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	35,2	35,2	100,00	
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	7,50	7,9	105,33	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	40,81	40,38	98,95
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	57,52	87,01	151,27
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Indeks	74,40	74,40	100
35	Terkendalnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	80,00	80,50	100,63
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	40,46	55,9	138,16
		36.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,46	84,95	100,58
		36.3	Indeks Tutupan Vegetasi (lahan)	Indeks	58,60	42,54	72,59
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks Kapasitas Bencana	Indeks	Sedang 119	Sedang 99,24	83,39
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks Demokrasi	Indeks	75,7	75,43	99,64
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	100	85,50	85,50
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks Ketertiban Masyarakat	Indeks	100	100	100
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,37	69,42	114,99
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nindya 750	Madya 650	86,67



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	Indeks	81,08	80,65	99,47
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan	Indeks	80	81,2	101,50
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks	Sdh	91,5	91,5
45	Pengembangan ketransmigrasian	45.1	Persentase Besaran Peningkatan Minat Transmigrasi	%	42,00	0	0

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran 67 (*enam puluh tujuh*) yang terdiri dari: 60 (*enam puluh*) indikator yang sifatnya progresif, dan 7 (*tujuh*) indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. Indikator Progresif, dengan hasil:

- Sebanyak 42 (empat puluh dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 62,69% dengan Kriteria ***Sangat Tinggi***;
- Sebanyak 9 (sembilan) atau sebanyak 13,43% dengan Kriteria ***Tinggi***;
- Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 4,48% dengan kriteria ***Sedang***;
- Sebanyak 0 (nol) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 0% dengan kriteria Rendah; dan
- Sebanyak 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 8,96% dengan Kriteria ***Sangat Rendah***.

Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

- Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Sangat Tinggi*** (atau interval nilai realisasi kinerja \geq



90,1) sebanyak sebanyak 42 (empat puluh dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 62,69%, diantaranya:

1. Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
2. Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
3. Usia Harapan Hidup;
4. Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
5. Persentase penguatan kapasitas PSKS;
6. Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda;
7. Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga;
8. Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya;
9. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah;
10. Prosentase Raperda yang disahkan tepat waktu;
11. Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan;
12. Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel;
13. Level Maturitas SPIP;
14. Level Kapabilitas APIP;
15. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
16. Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara;
17. Indeks Kabupaten Peduli HAM;
18. Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana);
19. Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi;
20. Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah;
21. Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah;
22. Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah;
23. Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra;
24. Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek;
25. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB;



26. Persentase pertumbuhan realisasi investasi PMDN;
27. Persentase pertumbuhan realisasi investasi PMA;
28. Angka partisipasi angkatan kerja;
29. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
30. Persentase IKM yang memiliki daya saing;
31. Indeks layanan infrastruktur;
32. Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan;
33. Indeks kualitas perumahan dan kawasan pemukiman;
34. Ketaatan terhadap RTRW;
35. Indeks Kualitas Air;
36. Indeks Kualitas Udara;
37. Indeks Demokrasi;
38. Indeks Ketertiban Masyarakat;
39. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
40. Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan;
41. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan;
42. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (Dukcapil).

b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan **Kriteria Tinggi**, atau interval nilai realisasi kinerja **$75,1 \leq 90$** sebanyak 9 (sembilan) atau sebanyak 13,43%, diantaranya:

1. Indeks Profesionalitas ASN;
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
3. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB;
4. Persentase UMKM yang memiliki daya saing;
5. Prosentase inovasi yang diterapkan;
6. Rasio daya serap tenaga kerja PMA;
7. Kelas Indeks Kapasitas Bencana;
8. Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan); dan
9. Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA).

c. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan **Kriteria Sedang**, atau interval nilai realisasi kinerja $65,01 \leq 75$ sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 4,48%, yaitu:

1. Rasio penduduk yang bekerja; dan



2. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta prgram BPJS Ketenagakerjaan; dan
 3. Indeks Tutupan Vegetasi (lahan).
- d. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan **Kriteria Rendah**, atau interval nilai realisasi kinerja $50,01 \leq 65$ sebanyak 0 (nol) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 0%.
- e. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria **Sangat Rendah**, atau interval nilai realisasi kinerja ≤ 50 sebanyak 6 (enam) indikator, diantara:
1. Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan;
 2. Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat;
 3. Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku;
 4. Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata;
 5. Rasio daya serap tenaga kerja PMDN; dan
 6. Persentase Besaran Peningkatan Minat Transmigrasi.

Berdasarkan **Capaian Kinerja Organisasi** Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan **Skala Nilai Peringkat Kinerja** sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diperoleh hasil sebagaimana Diagram 3.1.



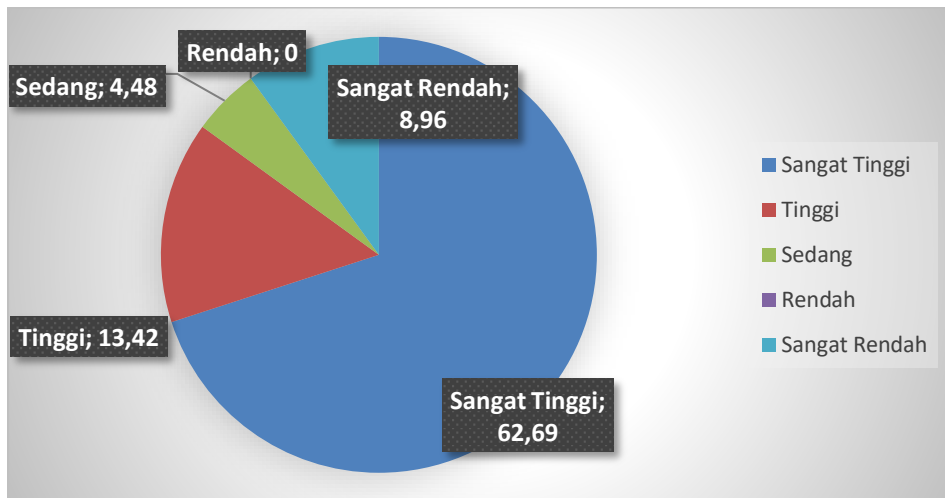


Diagram 3.1 Peringkat Kinerja Progresif

B. Indikator Regresif, dengan hasil:

Indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Tercapai (Berhasil Menekan)***, atau interval nilai realisasi kinerja skala $99,9 \leq$ sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 4,48%, diantaranya:

1. Angka Kematian Balita;
2. Tingkat Inflasi YoY; dan
3. Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*)/TFR.

Sedangkan yang ***Tidak Tercapai***, atau interval nilai realisasi kinerja skala ≥ 100 sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 5,97%, diantaranya:

1. Kasus kematian Ibu;
2. Angka Kematian Bayi; dan
3. Prevalensi gizi buruk (BB/U); dan
4. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Berdasarkan *Capaian Kinerja Organisasi* Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan *Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif* maka diperoleh hasil sebagaimana Diagram 3.2.



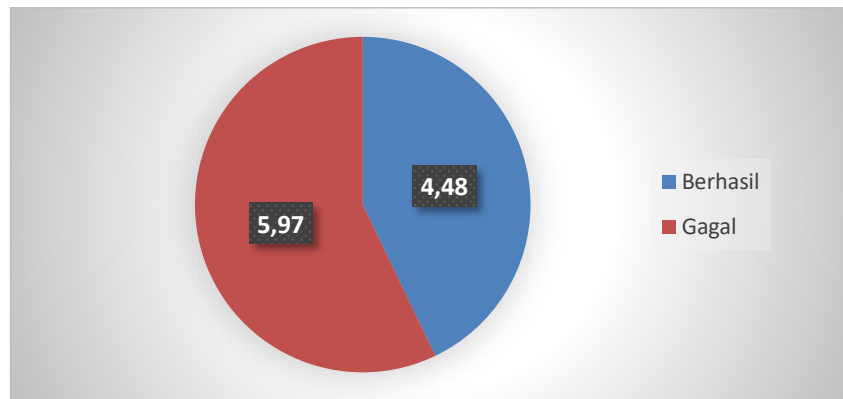


Diagram 3.2 Peringkat Kinerja Regresif

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal.



Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan urusan pendidikan menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat didukung dengan Pelaksanaan Pendidikan Sepanjang Hayat di Kabupaten Klaten Tahun 2021.

didasarkan pada pencapaian pendekatan 6 (enam) pilar strategis, yakni: 1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2). Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 3). Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life-skill*), 4). Pendidikan Keaksaraan, 5). Pengarusutamaan Gender, dan 6). Peningkatan Kualitas Pendidikan. Sehingga capaian kinerja Pendidikan Sepanjang Hayat tahun 2021 merupakan gambaran keberhasilan capaian kinerja urusan pendidikan dalam



mendukung pencapaian visi-misi pembangunan jangka menengah Daerah.

Adapun capaian sasaran: Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal sebagaimana Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJM	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase Sekolah Dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	43	98,28	98,37	55	97,84	177,89	55	177,89
2	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	65	85,09	90,63	95	88,70	93,36	95	93,36

Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Up date per Januari 2022.

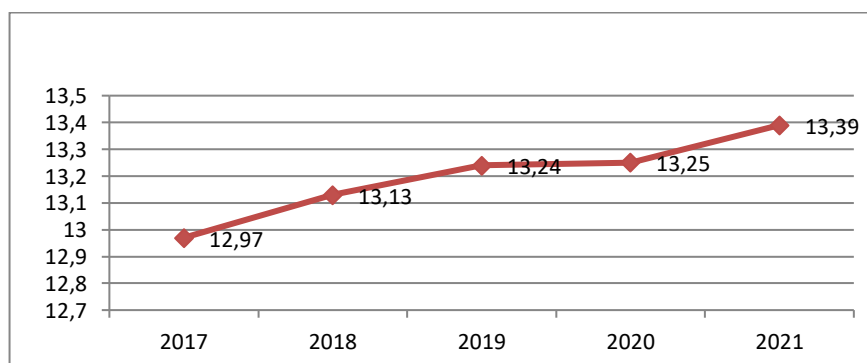
Capaian sasaran kinerja: Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal, pada tahun 2021 dengan indikator persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebesar 97,84% dengan jumlah sekolah dasar sebanyak 741 sekolah dan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebanyak 725 sekolah. Sedangkan indikator persentase Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebesar 88,70% dengan jumlah Sekolah Menengah Pertama sebanyak 115 sekolah dan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebanyak 102 sekolah.



Capaian sasaran kinerja: Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut di atas ditunjang beberapa indikator kinerja urusan pendidikan, diantaranya:

1) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2017-2021, yaitu dari sebesar 12,97 pada tahun 2017 menjadi sebesar 13,39 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin baik pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 disajikan pada Grafik 3.1.



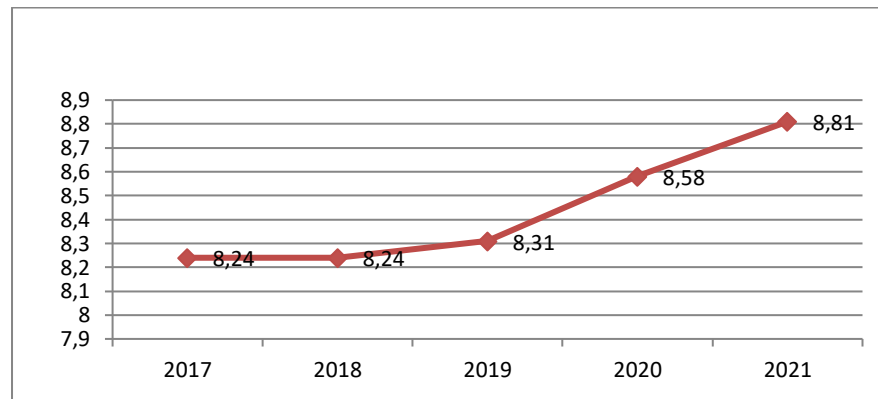
Sumber : BPS JATENG, Update Terakhir 15 Nov 2021.

Grafik 3.1. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Klaten Tahun 2017-2021

2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2017-2021, yaitu dari sebesar 8,24 pada tahun 2017 menjadi sebesar 8,81 pada tahun 2021 pendidikan lebih tinggi semakin baik. Perkembangan Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2017-2021 disajikan pada Grafik 3.2.





Sumber: BPS JATENG, Update Terakhir 15 November 2021.

Grafik 3.2. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2017-2021.

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan khususnya di dua tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar 0,23% dari sebesar 8,58 pada tahun 2020 menjadi sebesar 8,81 pada tahun 2021, hal ini disebabkan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah yang berfokus pada anak usia sekolah untuk mengikuti program wajib pendidikan dasar dengan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2017-2021 perkembangannya bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2020 mencapai 96,02%, namun pada tahun 2021 menjadi 91,65%. Begitu juga dengan jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B turun dari 100,48% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 menjadi 98,62%. Faktor yang mempengaruhi penurunan APK disebabkan masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah, masih terdapat anak putus sekolah di jenjang SD/MI maupun SMP/MTs serta faktor pandemi covid. Selain itu anak-anak yang berada di pondok pesantren dan sejenisnya belum bisa dilakukan pendataan. Perkembangan APK di Kabupaten Klaten selama Tahun 2017-2021 untuk semua jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 3.5.



Tabel 3.5.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2017-2021

No	Tahun	SD/MI/SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SMP LB/Paket B
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2017	97,45	90,93
2	2018	102,75	98,57
3	2019	98,54	98,31
4	2020	96,02	100,48
5	2021	91,65	98,62

Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Update per Januari 2022.

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

APM untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2017-2021 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2020 sudah mencapai 88,54%, turun menjadi 83,91% pada tahun 2021. Hal tersebut terjadi sebagai dampak dari adanya peserta didik yang berusia kurang dari 7 tahun masuk ke jenjang SD/ sederajat dikarenakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membolehkan anak berusia dibawah 7 tahun untuk mendaftar ke jenjang SD/ sederajat, sehingga pada usia 12 tahun anak tersebut sudah lulus jenjang SD/ sederajat dan dapat mendaftar ke SMP/ sederajat. Begitu juga dengan Jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B pada tahun 2020 mencapai 71,14%, naik menjadi 72,11% pada tahun 2021. Dari capaian tersebut dapat diartikan bahwa perkiraan proporsi peserta didik usia 13 - 15 tahun di Kabupaten Klaten yang bersekolah tepat sesuai dengan ketentuan usia bersekolah dijenjang SMP/ sederajat adalah sebesar 72,11%, artinya terdapat sekitar 27,89% peserta didik pada jenjang SMP/ sederajat berusia kurang dari 13 tahun atau lebih dari 15 tahun. Perkembangan APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar disajikan pada Tabel 3.6.



Tabel 3.6.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2017-2021

No	Tahun	SD / MI /SDLB/Paket A	SMP/MTs/SMPLB/
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2017	86,84	68,22
2	2018	90,84	73,21
3	2019	88,30	73,05
4	2020	88,54	71,14
5	2021	83,91	72,11

Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Update per Januari 2022.

5) Angka Putus Sekolah

Perkembangan angka putus sekolah (APS) selama tahun 2017-2021 untuk semua jenjang pendidikan bersifat fluktuatif. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut
Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SD/MI	%	0,04	0,02	0,01	0,01	0,02
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMP/MTS	%	0,23	0,06	0,05	0,08	0,05
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMA/MA	%	0,63	0,67	0,53	0,48	-

Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Update per Januari 2022.

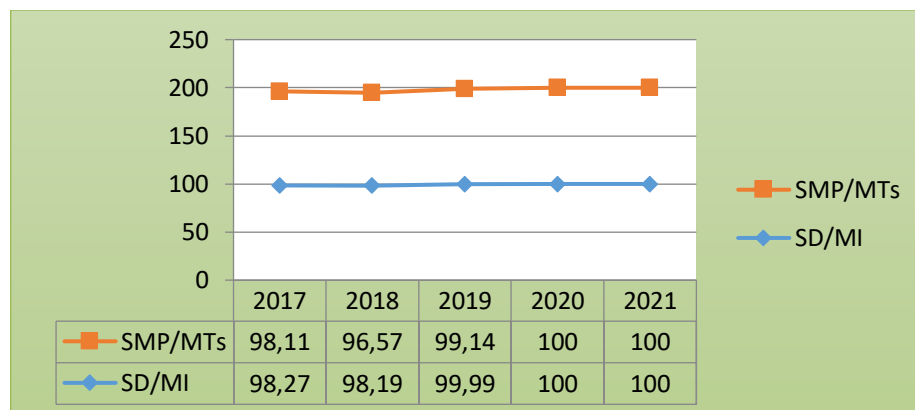
Berdasarkan Tabel 3.7. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa angka putus sekolah tingkat SD/MI dua tahun terakhir mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 0,01% menjadi 0,02% di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena



kondisi Pendidikan yang kurang baik dan tidak merata. Sedangkan untuk angka putus sekolah SMP/MTS mengalami penurunan dari sebesar 0,08% pada tahun 2020 menjadi 0,05% pada tahun 2021, hal ini disebabkan kondisi kemajuan pembangunan di bidang Pendidikan dan keterjangkauan Pendidikan maupun pemerataan sudah semakin baik.

6) Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan (AL) menunjukkan bobot prestasi kelulusan untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan. Adapun kondisi Angka Kelulusan (AL) untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2017-2020 bersifat fluktuatif. Perkembangan angka kelulusan tahun 2017-2021 disajikan pada Grafik 3.3.



Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Update per Januari 2022.

Grafik 3.3 Angka Kelulusan (AL) Tahun 2017-2021

Berdasarkan Grafik 3.3. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa angka kelulusan jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTS pada tahun 2020 maupun tahun 2021 angka kelulusan mencapai 100% hal ini disebabkan tatacara kelulusan di masa pandemi, disamping karena adanya peningkatan kinerja penyelenggaraan pendidikan.

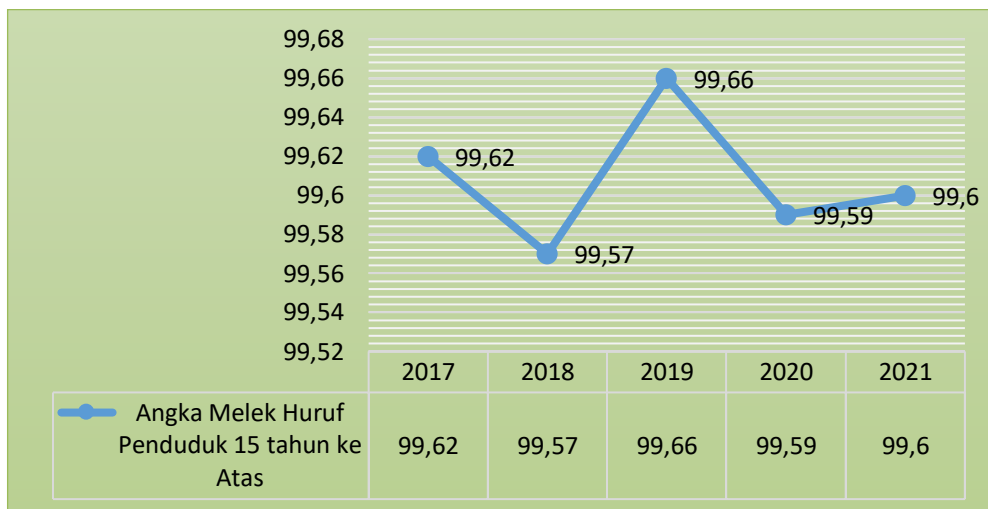
7) Angka Melek Huruf

Indikator keberhasilan pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi angka buta huruf penduduk usia >15 Tahun ke atas. Beberapa langkah nyata



yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diantaranya dengan melakukan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.

Angka melek huruf pada penduduk usia lebih dari 15 Tahun ke atas dirumuskan dengan pengertian persentase penduduk usia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Adapun perkembangan angka melek huruf penduduk usia >15 Tahun ke atas di Kabupaten Klaten tahun 2017-2021 disajikan pada Grafik 3.4.



Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Update per Januari 2022.

Grafik 3.4. Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun ke atas di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Berdasarkan Grafik 3.4. sebagaimana tersebut di atas, angka melek huruf di Kabupaten Klaten pada tahun 2021 sebesar 99,60 mengalami kenaikan sebesar 0,01 dari tahun 2020 sebesar 99,59.

8) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang didukung dengan Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Program Sekolah Penggerak



merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program Sekolah Penggerak. Sementara itu perkembangan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Klaten tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.
Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SD/MI	%	84,16	87,67	90,32	91,01	92,45
Jenjang Pendidikan SMP/MTs	%	60,33	91,98	94,17	94,50	94,67

Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Update per Januari 2022.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV selama tahun 2017-2021 semakin meningkat, hal ini tidak terlepas dari adanya standar kualifikasi yang disyaratkan, serta adanya tuntutan kewajiban bagi guru SD/MI dan SMP/MTs untuk selalu meningkatkan kapabilitasnya.

Adapun data guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di SD/MI/, SMP/MTS berkualifikasi S1/D.IV dan bersertifikat Kepala Sekolah tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9.
Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi SI/D IV/S2 dan Bersertifikat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SD/ MI	%	98,27	99,00	99,19	99,60	98,97



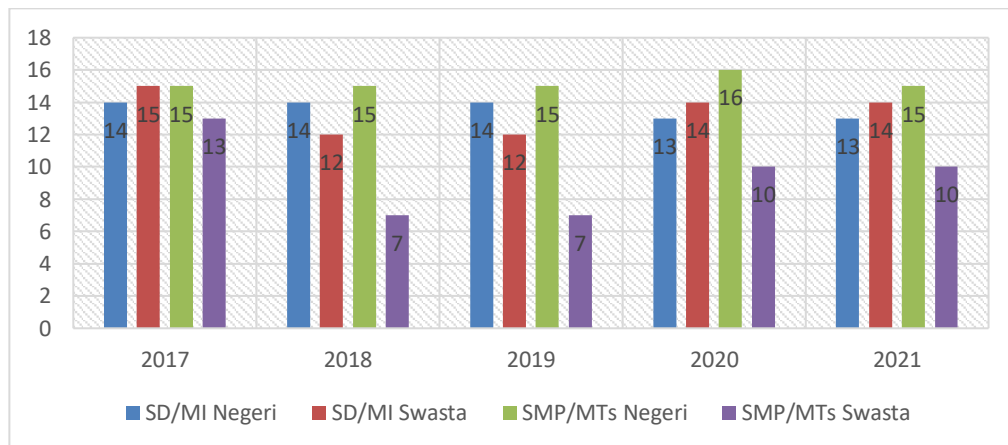
Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SMP/ MTs	%	93,55	96,92	97,10	98,52	99,22

Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.9. sebagaimana tersebut di atas, terdapat peningkatan jumlah Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi D4/SI dan bersertifikat di jenjang pendidikan SD/MI dari 99,60% pada tahun 2020 menjadi 98,97% di tahun 2021, dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTS dari 98,52% pada tahun 2020 menjadi 99,22% pada tahun 2021. Jabatan Kepala Sekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI/SMP/MTS telah memenuhi kualifikasi S1/D4 sesuai standar sistem Pendidikan Nasional.

9) Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun 2017-2021 disajikan pada Grafik 3.5.



Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Update per Januari 2022.

Grafik 3.5. Rasio Guru Terhadap Murid untuk Jenjang SD/MI dan SMP/MTS Tahun 2017-2021.

Berdasarkan Grafik 3.5. sebagaimana di atas Rasio Guru Terhadap Murid untuk Jenjang Pendidikan SD/MI Negeri (*Rasionya 1:14*) dan SMP/MTs Negeri (*Rasionya 1:15*) Tahun 2017-2021 angkanya relatif stabil, sedangkan untuk jenjang

Pendidikan SD/MI swasta dan SMP/MTs swasta bersifat flutuatif, hal ini sangat tergantung kondisi sekolah dan akibat kebijakan zonasi sekolah sangat berpengaruh terhadap situasi pilihan siswa dan sikap orang tua/wali murid untuk memilih dan menentukan sekolah yang diminati.

10) Manajemen Pelayanan Pendidikan

Manajemen Pelayanan Pendidikan diukur dengan indikator Angka melanjutkan sekolah dari Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Klaten di tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10.
Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs	99,26	99,30	96,70	99,90	100,11
Angka Melanjutkan dari SMP/ MTs ke SMA/ MA/ SMK	88,28	95,48	98,58	92,60	91,98

Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.10. sebagaimana tersebut di atas, peserta didik di jenjang pendidikan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTS pada tahun 2017-2021 perkembangannya bersifat fluktuatif, begitu pula untuk jenjang SMP/MTs. Hal ini mengkondisikan, bahwa angka melanjutkan sangat bersifat situasional.

11) Sarana dan Prasarana Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan sangat berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar dan tentunya akan juga sangat berpengaruh terhadap capaian kualitas pendidikan di Kabupaten Klaten. Perkembangan kondisi sarana dan prasarana sekolah dalam kondisi baik selama tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.11.



Tabel 3.11.
 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik
 Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sekolah pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	%	64,73	69,48	68,25	68,88	71,36
Sekolah pendidikan SMP/MTS	%	77,68	87,37	88,89	74,35	88,01

Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.11. sebagaimana tersebut di atas kondisi ruang kelas gedung sekolah masih terdapat ruang kelas dalam kondisi tidak layak meskipun persentasenya kecil, sehingga rehabilitasi ruang kelas menjadi hal mutlak yang harus dilaksanakan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait pemenuhan Pendidikan Sepanjang Hayat bagi masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: [Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal](#) terdiri dari 5 (lima) program, diantaranya:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengelolaan Pendidikan;
3. Pengembangan Kurikulum;
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
5. Pengembangan Bahasa dan Sastra.

Permasalahan

Urusan Pendidikan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Pelaksanaan belajar-mengajar tetap memperhatikan kondisi perkembangan pandemi Covid-19, hal ini menimbulkan ketidakpastian;
- b. Belum terpenuhinya aksesibilitas sarana dan prasarana layanan pendidikan sekolah dasar dalam kondisi layak;



- c. Belum optimalnya tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan basis kompetensi sesuai jenjang pendidikan;
- d. Terjadinya kekosongan kepala sekolah jenjang pendidikan SD Negeri, dan belum tuntasnya *regrouping* Sekolah Dasar; dan
- e. SD Negeri tidak mempunyai tenaga administrasi untuk mengelola administrasi Laporan Dana BOS dan Aset, sehingga guru terbebani dengan tugas administrasi pelaporan BOS dan Aset.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan pendidikan dasar, diantaranya:

- a. Pelaksanaan proses di sekolah maupun di luar sekolah secara ketat;
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana layanan pendidikan, meliputi: rehab sedang/berat ruang kelas, maupun gedung sekolah, pengadaan sapsras laboratorium, ruang praktikum dan komputer;
- c. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pelaksanaan Diklat peningkatan kapasitas guru;
- d. Pengisian Kepala Sekolah dengan Diklat penguatan bagi calon Kepala Sekolah; dan
- e. Pengusulan pengangkatan tenaga harian Lepas (THL) Pengadministrasian Umum di SD Negeri.



2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan;



Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa azas penyelenggaraan kesehatan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, norma-norma keagamaan. Serta memperhatikan ketentuan Pasal 3, dinyatakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Mengingat kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya Urusan Kesehatan dengan parameter aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan indikator meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat, serta berdasarkan Undang-Undang 23

Tahun 2014 urusan kewenangan daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan urusan kesehatan mencakup diantaranya: 1. Upaya kesehatan, 2. Sumber Daya Manusia Kesehatan, 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, dan 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Adapun capaian sasaran terwujudnya Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian, angka kesakitan dan kecacatan sebagaimana Tabel 3.12.

Tabel 3.12.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan
Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan
Kecacatan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*10
1	Kasus kematian Ibu	15	12	17	14	45	321,43	14	321,43
2	Angka Kematian Bayi	12,94	10,01	9,34	10,07	10,54	104,67	10,07	104,67
3	Angka Kematian Balita	2,99	1,59	1,52	1,61	1,56	96,89	1,61	96,89
4	Prevalensi Gizi Buruk (BB/U)	0,75	0,71	0,90	0,7	0,93	132,86	0,70	132,86

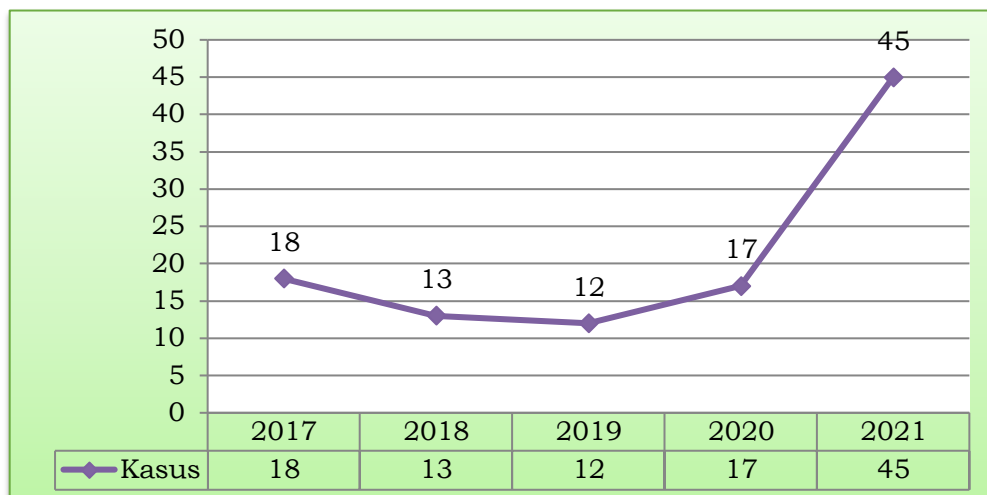
Sumber: DINAS KESEHATAN, Update per Januari 2022.

Capaian sasaran kinerja: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan, sebagaimana tersebut di atas ditunjang beberapa indikator kinerja urusan kesehatan, diantaranya:

1. Kasus Kematian Ibu Melahirkan

Perkembangan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2017-2021 dapat disajikan pada Grafik 3.6.





Sumber: DINAS KESEHATAN, Update Per Januari 2022.

Grafik 3.6. Perkembangan Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Berdasarkan Grafik 3.6. sebagaimana tersebut di atas, kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab kematian ibu, di samping akibat hipertensi dan pendarahan, juga disebabkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu yang tinggi. Adapun kasus kematian ibu melahirkan selama tahun 2017-2021 menurut kecamatan dan Puskesmas disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13.

Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Puskesmas	Kematian Ibu Melahirkan				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Prambanan	Prambanan	0	2	0	0	1
		Kebondalem Lor	0	0	1	0	0
2	Gantiwarno	Gantiwarno	1	0	0	1	1
3	Wedi	Wedi	0	1	0	0	1
4	Bayat	Bayat	1	1	0	0	4
5	Cawas	Cawas I	2	1	0	0	0
		Cawas II	1	1	0	0	1
6	Trucuk	Trucuk I	1	0	0	0	0
		Trucuk II	1	0	1	1	2
7	Kalikotes	Kalikotes	0	0	0	1	4

No	Kecamatan	Puskesmas	Kematian Ibu Melahirkan				
			2017	2018	2019	2020	2021
8	Kebonarum	Kebonarum	0	0	0	0	1
9	Jogonalan	Jogonalan I	1	0	2	1	1
		Jogonalan II	0	0	0	0	1
10	Manisrenggo	Manisrenggo	0	1	0	0	2
11	Karangnongko	Karangnongko	1	0	0	1	2
12	Ngawen	Ngawen	0	0	1	0	4
13	Ceper	Ceper	2	0	1	1	1
		Jambukulon	0	0	0	0	0
14	Pedan	Pedan	0	1	1	1	1
15	Karangdowo	Karangdowo	1	1	0	2	1
16	Juwiring	Juwiring	0	0	0	1	0
17	Wonosari	Wonosari I	1	1	0	0	1
		Wonosari II	0	0	2	0	0
18	Delanggu	Delanggu	1	0	0	3	0
19	Polanharjo	Polanharjo	0	1	1	0	2
20	Karanganom	Karanganom	2	1	0	0	2
21	Tulung	Tulung	0	0	0	0	1
		Majegan	0	0	0	0	2
22	Jatinom	Jatinom	0	1	1	0	0
		Kayumas	0	0	0	1	3
23	Kemalang	Kemalang	2	0	0	1	2
24	Klaten Selatan	Klaten Selatan	0	0	0	2	1
25	Klaten Tengah	Klaten Tengah	0	0	0	0	0
26	Klaten Utara	Klaten Utara	0	0	1	0	3
Jumlah			18	13	12	17	45

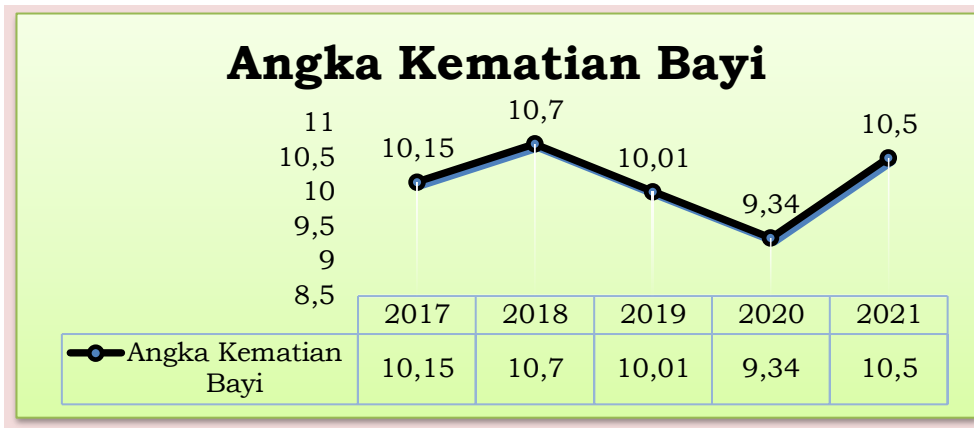
Sumber: DINAS KESEHATAN, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.13 sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun masih ada ibu mati karena melahirkan, hal ini disebabkan salah satunya karena hipertensi, faktor medis lainnya, dan non medis yang menyebabkan kasus kematian ibu melahirkan cukup tinggi.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Klaten selama Tahun 2017-2021 disajikan pada Grafik 3.7.





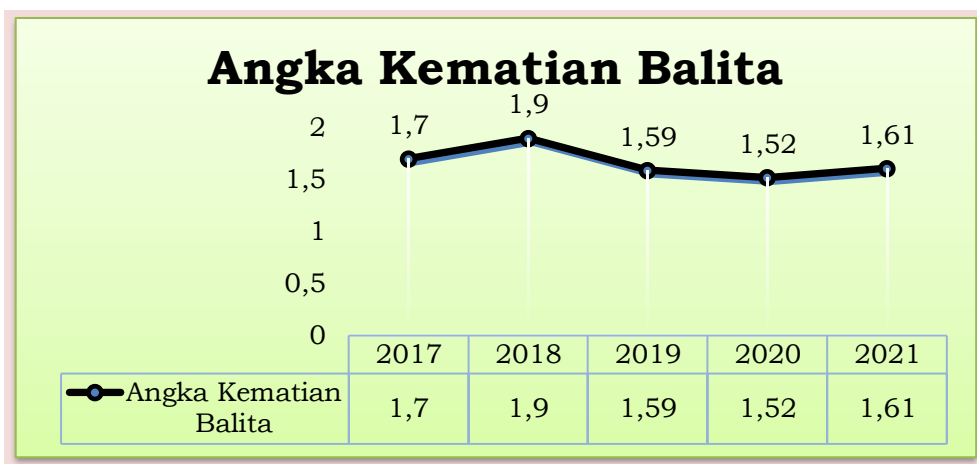
Sumber: DINAS KESEHATAN, Update per Januari 2022.

Grafik 3.7. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Berdasarkan Grafik 3.7. sebagaimana tersebut di atas angka kematian bayi dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami penurunan. Penyebab Kematian bayi terbanyak adalah BBLR, Asfiksia dan kelainan kongenital. Derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan terutama di wilayah kecamatan dan Puskesmas dengan kasus kematian bayi yang tinggi.

3. Angka Kematian Balita

Perkembangan Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Klaten selama Tahun 2017-2021 disajikan pada Grafik 3.8.



Sumber: DINAS KESEHATAN, Up data per Januari 2022.

Grafik 3.8. Perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

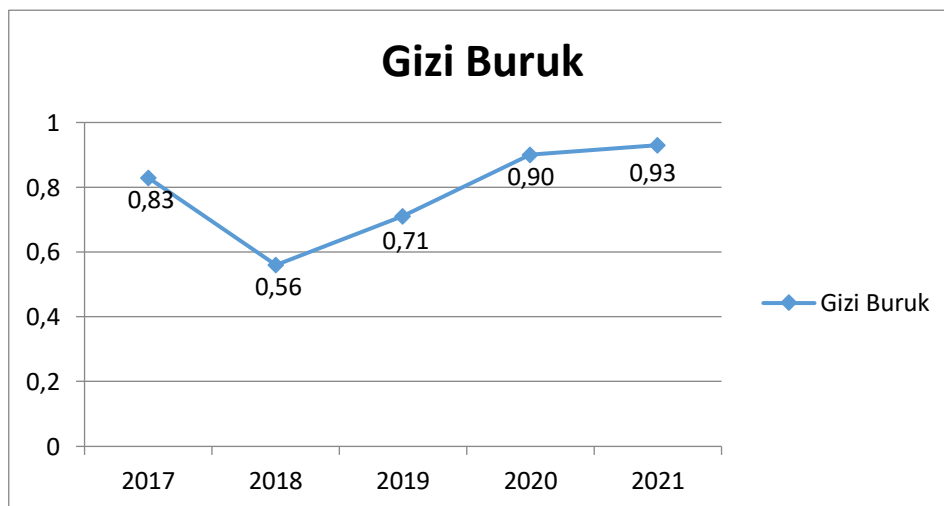


Berdasarkan Grafik 3.8. sebagaimana tersebut di atas Angka Kematian Balita (AKABA) tahun 2017 sebanyak 1,7 per 1.000 KH (atau 27 kasus), tahun 2018 sebanyak 1,9 per 1.000 KH (atau 30 kasus), tahun 2019 menjadi sebanyak 1,59 per 1.000 KH (atau 25 kasus), tahun 2020 menjadi sebanyak 1,52 per 1.000 KH (atau 24. kasus), dan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 1,6 per 1.000 KH (atau 23 kasus). Penyebab Kematian balita terbanyak diare, maka derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan terutama di wilayah kecamatan dan Puskesmas dengan kasus kematian balita yang tinggi.

4. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Balita dengan status gizi buruk masih menjadi masalah karena berbagai penyebab. Penyebab balita mengalami gizi buruk karena: asupan makan yang kurang, pola jajan makanan yang tidak memenuhi zat gizi, pola asuh orang tua yang tidak telaten memenuhi kebutuhan zat gizi anak asuhannya.

Kasus *underweight* (balita gizi buruk) dengan indikator berat badan menurut umur di Kabupaten Klaten selama Tahun 2017-2021 dari hasil pengukuran serentak dapat disajikan pada Grafik 3.9.



Sumber: DINAS KESEHATAN, Up date per Januari 2022.

Grafik 3.9. Perkembangan Persentase Prevelensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Berdasarkan Grafik 3.9. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat perkembangan selama tahun 2017-2021 kasus gizi buruk murni tanpa penyakit penyerta bersifat fluktuatif.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: **Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat** terdiri dari 5 (lima) program, diantaranya:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan
5. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Permasalahan

Urusan Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Masih diketemukannya kasus kematian ibu dan bayi;
- b. Masih ditemui adanya: Angka kesakitan demam berdarah, penemuan infeksi HIV dan AIDS yang setiap tahun cenderung meningkat, adanya ancaman pandemik flu burung, penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya: demam berdarah dengue, malaria, filiarisis, serta penanganan pandemi *Covid-19*;
- c. Beberapa jenis penyakit menular/infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker) masih terjadi. Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya: penyakit menular tuberculosis paru, kusta penderita PB, diare, infeksi saluran pernafasan atas, HIV, kejadian luar biasa KIPI;
- d. Kondisi gizi : Berat Badan (BB) naik, BB di bawah garis merah dan gizi buruk;
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan;
- f. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah, diantaranya: kebiasaan cuci tangan dengan sabun,



- sebelum makan dan sesudah buang air besar, serta kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi; dan
- g. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat; dan
- b. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan *Antenatal Care* (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil.

3. Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*)



Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan keturunan, termasuk juga hak untuk tidak mendapatkan keturunan, hak untuk hamil, hak untuk tidak hamil, dan hak untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan. Pemahaman kesehatan reproduksi tersebut termasuk pula adanya hak-hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, efektif dan terjangkau.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menekan angka kelahiran diupayakan dengan pelayanan keluarga berencana. Adapun capaian sasaran: **Menurunnya Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*)** sebagaimana Tabel 3.14.

Tabel 3.14.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Menurunnya Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*)

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*10
1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) /TFR	2,2	2,1	2,1	2,1	1,6	76,19	2,1	76,19

Sumber: DISSOSP3APPKB, Update per Januari 2022.

Jumlah kelahiran hidup pada tahun 2020 sebanyak 37.376 KH, dan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 13.062. KH (atau turun 65,05% dibanding tahun 2020). Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menurunkan angka kelahiran dengan melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan indikator:

1. Jumlah Peserta KB dan KB Aktif

Jumlah peserta KB baru dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 perkembangannya bersifat fluktuatif. Peserta KB baru pada tahun 2020 sebanyak 12.348 peserta KB baru, dan pada tahun 2021 menjadi 13.550 peserta KB baru (naik 8,87%). Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran pasangan usia subur dalam menyiapkan keluarga dan kondisi sosial masyarakat. Gambaran peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15.
Peserta KB dan KB Aktif di
Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Tahun	Pasangan Usia Subur	Peserta KB Baru	Peserta KB Aktif
(1)	(2)	(4)	(5)
2017	211.577	23.783	169.626
2018	196.717	15.565	137.109
2019	197.949	12.503	141.315
2020	195.133	12.348	138.344
2021	197.321	13.550	138.719

Sumber : DISSOSP3APPKB, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.15. sebagaimana tersebut di atas, perkembangan persentase KB Baru terhadap terhadap



pasangan usia subur pada tahun 2020 sebesar 6,33%, dan rasio peserta KB baru terhadap Peserta KB Aktif sebesar 8,93%, sedangkan rasio peserta KB Aktif terhadap pasangan usia subur sebesar 70,90%. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah pasangan subur menjadi 197.321 PUS, jumlah peserta KB Baru sebanyak 13.550 orang dan jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 138.719 orang.

2. Jumlah Keluarga Sejahtera

Perkembangan jumlah keluarga sejahtera tahun 2017-2021 mengalami penurunan. Tahun 2020 jumlah keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I (KS I), dan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) sebanyak 372.744 jiwa. Data tersebut mengindikasikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan. Jumlah Pra Sejahtera, KS I, dan keluarga sejahtera tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16.

Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Tahun	Pra Sejahtera	KS-I	KS	Jumlah
2017	80.935	114.736	192.994	388.665
2018	52.688	81.688	238.374	372.750
2019	52.686	81.747	237.828	372.261
2020	52.722	82.267	237.755	372.744
2021	Na	Na	Na	Na

Sumber : DISSOSP3APPKB, Up date per Januari 2022.

Catatan: Tahun 2021 perhitungan Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya dengan formulasi yang berbeda dan belum rilis.

Berdasarkan Tabel 3.16. sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2020 jumlah keluarga Pra Sejahtera sebanyak 52.722 jiwa, jumlah Keluarga Sejahtera I (KS I) sebanyak 82.267 jiwa, dan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) sebanyak 237.755 jiwa.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kelahiran. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis:



Menurunnya Angka Kelahiran (Total Fertility Rate)

diantaranya:

1. Pengendalian Penduduk;
2. Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
3. Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Permasalahan

Urusan keluarga berencana untuk menekan angka melahirkan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Tingginya angka *drop out* KB; dan
2. Banyak Pasangan Usia Subur.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan keluarga berencana, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi masyarakat, terutama pasangan usia subur; dan
- b. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan penanganan keluarga berencana.

4. Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitkan oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit;



Kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit didorong dengan mengutamakan dan mengoptimalkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) didukung dengan kinerja Puskesmas untuk menekan angka kematian.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitkan oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit** sebagaimana Tabel 3.17.

Tabel 3.17.

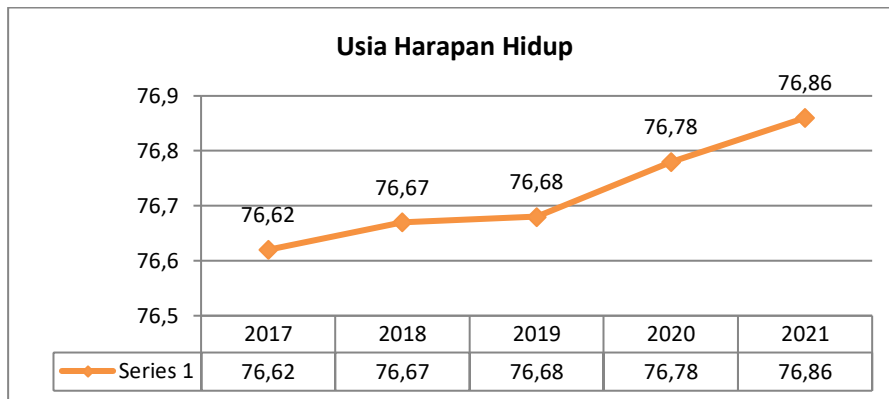
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitkan oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Usia Harapan Hidup	71,81	76,67	76,78	76,62	76,86	100,31	76,62	100,31

Sumber: BPS, 2022 (diolah).

Usia Harapan Hidup (UHH) dalam arti usia hidup panjang dan sehat, di samping sebagai cerminan terhadap ukuran peningkatan kesejahteraan penduduk, juga menjadi indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Selama kurun waktu 2017-2021 UHH cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup bersih dan sehat, termasuk upaya pemberian asupan yang semakin berkualitas terhadap anak usia dini. Perkembangan UHH di Kabupaten Klaten tahun 2017-2021 disajikan pada Grafik 3.10.



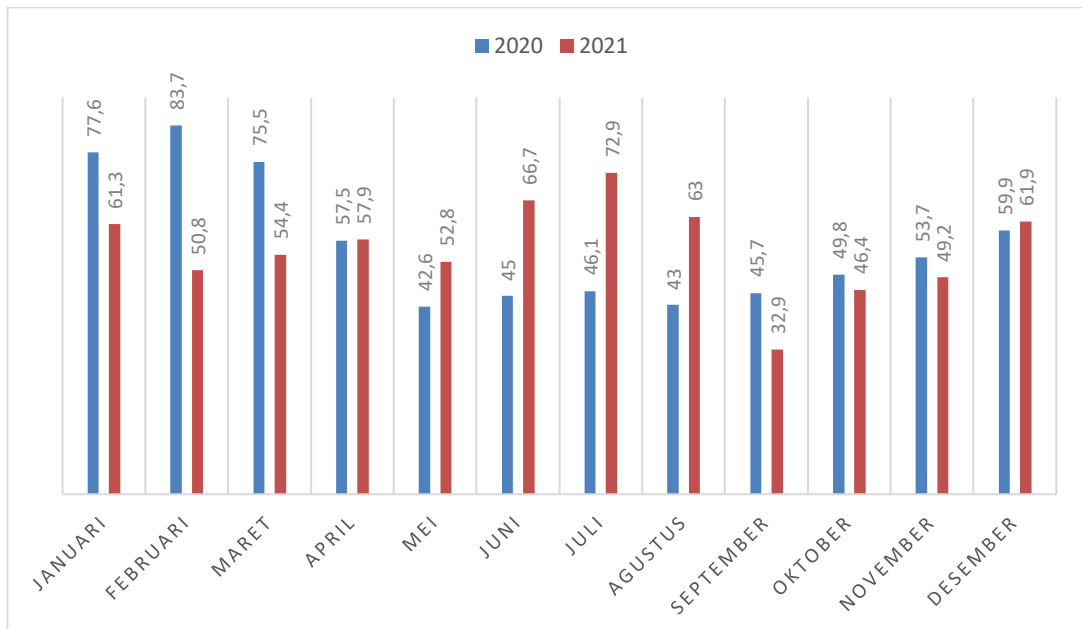


Sumber : BPS JATENG, Update 14 November 2021.

Grafik 3.10. Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat Tahun 2017-2021

1) Cakupan Pelayanan RSUD Bagas Waras

Kinerja pelayanan RSD Bagas Waras diukur dari indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu). BOR Tahun 2020 adalah 56,9 %, dan pada tahun 2021 sebesar 55,98% dengan jumlah per bulan disajikan pada Grafik 3.11.



Sumber : RSUD Bagas Waras Kabupaten. Klaten, Update per Januari 2022.

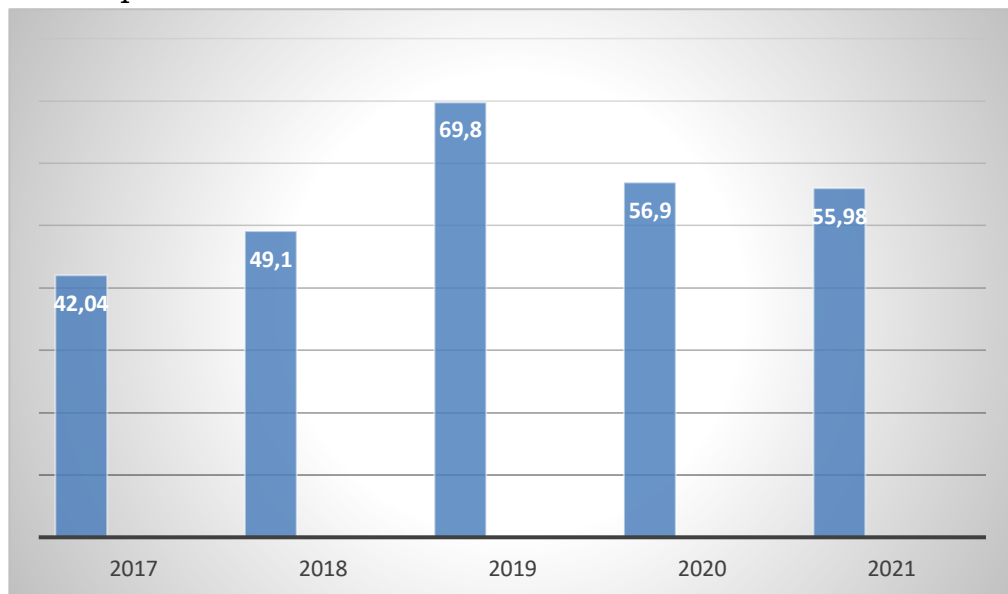
Grafik 3.11. Perkembangan Indikator BOR Bulanan (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu)

Disamping perkembangan Indikator BOR sebagaimana tersebut di atas, jumlah kunjungan pasien pada tahun tercatat



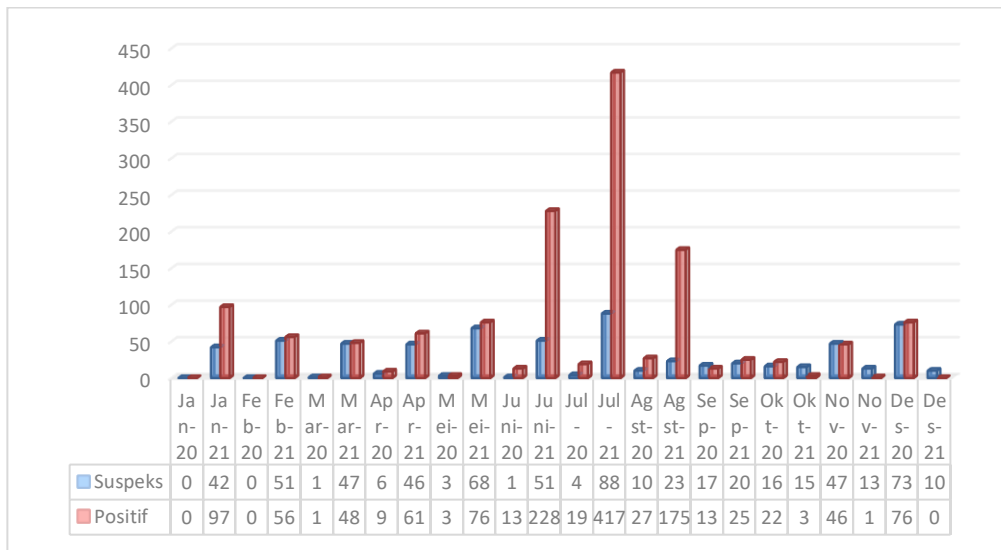
sebanyak 110.810 jiwa dengan perincian: 1). Rata-rata kunjungan rawat inap sebanyak 8305 orang/Tahun (atau rata-rata 23 orang/hari), 2). Rata-rata kunjungan rawat jalan sebanyak 90.627 orang/Tahun (atau rata-rata 248 orang/hari), dan 3). Rata-rata kunjungan IGD sebanyak 11.878 orang/Tahun (atau rata-rata 33 orang/hari).

Adapun kinerja pelayanan RSUD Bagas Waras dapat dilihat pada Grafik 3.12.



Sumber : RSUD Bagas Waras Kabupaten. Klaten, Update per Januari 2022.
Grafik 3.12. Perkembangan Indikator BOR Tahunan (%) (Pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu)

Berdasar pada Grafik 3.11. dan Grafik 3.12. indikator BOR di atas terlihat bahwa pada Tahun 2020 terjadi Penurunan Persentase pemakaian tempat tidur dibanding Tahun 2019 sebesar 12,4. Sementara itu jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Bagas Waras tahun 2020-2021 disajikan pada Grafik 3.13.



Sumber: RSUD Bagas Waras Kabupaten. Klaten, Up date per Januari 2022.
 Grafik 3.13. Jumlah Pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Bagas Waras

Kasus covid-19 pertama kali yang mendapat penanganan di RSUD Bagas Waras pada bulan Maret tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kasus, lalu pada bulan-bulan berikutnya angka naik, dan puncaknya di bulan Juli 2021 sebanyak 417 kasus dinyatakan positif. Segala sumber daya dikerahkan untuk menanggulangi wabah pandemi Covid-19, dan hasilnya menunjukkan kinerja positif.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: **Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitannya Oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit**, diantaranya program:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan
5. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Permasalahan

Urusan Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Tingginya kasus pandemi Covid-19, beserta angka ikutannya
2. Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya:
 - a. Demam berdarah dengue.
 - b. Malaria
 - Filariatis
3. Untuk jenis penyakit menular/infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti *Diabetes Militus* (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker). Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya:
 - a. Penyakit menular Tuberculosis paru
 - b. Kusta penderita PB
 - c. Diare
 - d. Infeksi Saluran Pernapasan atas
 - e. HIV
 - f. Kejadian luar biasa KIPI
 - g. Pencegahan Stunting
 - h. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat;
- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan *Antenatal Care* (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil.



5. Sasaran Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM;



Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien bisanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada upaya pencegahan permasalahan dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM, sehingga sasaran strategis yang hendak dicapai dapat diukur.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS** dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM sebagaimana Tabel 3.18.

Tabel 3.18.

Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Upaya Pencegahan yang Berperspektif HAM

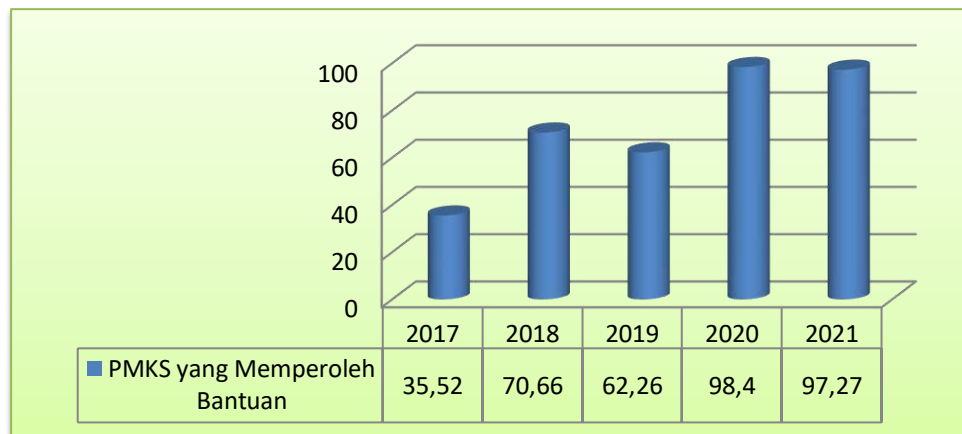
No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	77	62,26	98,4	89	97,27	109,29	89	109,29
2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	90	96	96	100	100	100	100	100

3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	13,9	13,09	12,35	12,9	13,19	102,24	12,9	102,09
---	---	------	-------	-------	------	-------	--------	------	--------

Sumber : DISSOSP3APPKB, Update per Januari 2022.

1. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Program-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan PMKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan kinerja layanan penanganan PMKS yang memperoleh bantuan, dan persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok ekonomi Sejenis Lainnya. Perkembangan PMKS yang memperoleh bantuan dapat tahun 2017–2021 disajikan pada Grafik 3.14.



Sumber : DISSOSP3APPKB, Update per Januari 2022.

Grafik 3.14. PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2017–2021

Berdasarkan Grafik 3.14. sebagaimana tersebut di atas, Pada tahun 2020 jumlah PMKS sebanyak 172.857 orang, dan mendapatkan bantuan sebanyak 156.127 orang. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah PMKS sebanyak 168.291 orang, dan mendapatkan bantuan sebanyak 163.705 orang. Penanganan



PMKS selama ini diupayakan dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran Pemerintah Daerah, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat dapat membuahkan hasil yang maksimal, terutama bagi keluarga rawan sosial yang jumlahnya relatif sudah semakin berkurang, namun demikian tetap harus mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak.

2. Persentase Penguatan Kapasitas PSKS

Sumber daya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam turut serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama ini telah memberikan kontribusi positif. Tercatat sebanyak 11 (sebelas) PSKS yang telah turut andil dalam penanganan 25 (dua puluh lima) Jenis PMKS di Klaten. 11 (sebelas) PSKS tersebut, diantaranya: 1) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 2) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 4) Karangtaruna, 5) IPSM, 6) PLKSAI, 7) Lembaga Konsultasi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (LKKKS), 8) PPDK, 9) Tim Advokasi Disabilitas, 10) Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan 11) Komda Lansia.

Dari sebanyak 11 (sebelas) PSKS yang telah diberdayakan sebanyak 96% telah mampu secara mandiri mengembangkan kapasitasnya dalam membantu penanganan PMKS.

3. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Dari 25 (dua puluh lima) jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang teridentifikasi pada tahun 2020 sebanyak 172.857 PMKS, yang terdiri dari: fakir miskin sebanyak 144.140 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 10.433 orang, dan perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 4.561 orang. Sedang pada tahun 2021 menjadi sebanyak 168.291 PMKS, yang terdiri dari: fakir miskin sebanyak 138.176 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 12.218 orang, dan perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 5.561 orang.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan



masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis: **Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM**, diantaranya:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pemberdayaan Sosial;
3. Rehabilitasi Sosial;
4. Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Penanganan Bencana; dan
6. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Permasalahan

Urusan Sosial dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Masih banyaknya masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum terselesaikan;
- b. Meningkatnya kasus pengguna Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS;
- c. Banyaknya Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Gepeng) yang dibuang/dilepas dari daerah lain; dan
- d. Minimnya sarana dan prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan sosial, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi petugas sosial dan layanan sosial masyarakat;
- b. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan penanganan Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Eks. Penyandang Penyakit Sosial;
- c. Penguatan Posyandu Remaja untuk mencegah penggunaan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS; dan
- d. Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial.



6. Sasaran Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga;



Lembaga atau organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Klaten meliputi: (a) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI); (b) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda; (c) Lembaga Sosial Pemuda, Lembaga kepemudaan yang umumnya berbentuk Yayasan; (d) Organisasi Pemuda Partai Politik; (e) Organisasi Kemahasiswaan; (f) Praja Muda Karana (Pramuka); (g) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SLTA; (h) Karang Taruna; (i) Organisasi Pemuda Kedaerahan; (j) Lembaga Pemuda Profesi; (k) Perkumpulan Pemuda di bidang Seni; (l) Klub Ilmuwan Muda; dan (m) Lembaga Pemuda Pencinta Alam (n) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Lembaga-lembaga tersebut sebagian besar secara organisatoris tercatat sebanyak 26 (dua puluh enam) lembaga, namun kualitas dan kapabilitasnya belum memadai, sehingga masih perlu adanya pembinaan secara simultan oleh pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan karya-karya kepeloporan di bidang kepemudaan.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga** sebagaimana Tabel 3.19.

Tabel 3.19.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	5	12	-13,2	10	17	170	60	170
2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	5	5	3,7	5	28	560	30	93,33

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.19 sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2020 menjadi sebanyak 0 prestasi, dan pada tahun 2021 prestasi pemuda dan prestasi olahraga ada penghargaan yang diperoleh sekalipun dalam kondisi pandemi. Diantara cabang prestasi gemilang dengan merebut medali emas cabang olah raga tenis meja di ajang Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) XVI 2021, dan Khoirudin Mustakim peraih medali emas Kelas B Putra cabang pencak silat, Alvianto Bagas Prastyadi meraih perak di cabang panahan, sedangkan Irawan Guntur Aria Putra meraih perak cabang eksebis sambo.

Perkembangan jumlah organisasi kepemudaan dan jumlah organisasi olahraga selama lima tahun terakhir (tahun 2017-2021) jumlahnya relatif stabil, hanya saja kegiatan keolahragaan yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas masih sangat rendah. Jumlah klub/cabang olahraga mengalami penurunan, hal ini menunjukkan pembinaan terhadap klub/cabang olahraga masih kurang. Sedangkan jumlah gedung olah raga sudah cukup merata disetiap kecamatan, namun yang memenuhi standar sarana dan prasarana gedung olahraga baru ada dua yaitu GOR Gelar Sena dan Stadion Trikoyo.

Perkembangannya kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20.
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jml klub/cabang olahraga	Cabang	31	31	31	31	39
2.	Jml gedung Olahraga Tk. Kecamatan	Gedung	26	26	26	26	26
3.	Jml Organisasi Pemuda	Organisasi	29	29	29	25	26
4.	Jml Cabang Olahraga)	Cabang Olahraga	35	35	35	35	39

Sumber : DISBUDPORAPAR, Update per Januari 2022.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas pemuda dan olahraga. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis:



Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga, diantaranya:

1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; dan
2. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

Permasalahan

Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Program kepemudaan Pemerintah kurang menyentuh kebutuhan Usia produktif;
- b. Jiwa kewirausahaan pemuda masih rendah; dan
- c. Rendahnya prestasi olahraga, karena minimnya pembinaan dan penghargaan bagi atlet berprestasi.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi pemuda, sesuai dengan dinamika yang berkembang; dan
- b. Pemberian penghargaan yang sepadan bagi atlet dan pemuda yang berprestasi.



7. Sasaran Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya.



Semenjak digulirkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah membawa semangat baru dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional. Setelah puluhan tahun merdeka, akhirnya Republik Indonesia memiliki sebuah panduan dalam upaya menjalankan amanat Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 untuk memajukan kebudayaan. Hal ini sejalan pula dengan amanat Presiden Republik Indonesia agar memberikan peran strategis bagi kebudayaan nasional dalam pembangunan. Proses pemajuan kebudayaan dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional Indonesia. Sesuai undang-undang, terdapat 10 obyek pemajuan kebudayaan, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya dengan melakukan berbagai event dan baluran budaya daerah. Langkah ini diharapkan akan memperkuat daya saing daerah melalui seni dan budaya.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya** sebagaimana Tabel 3.21.

Tabel 3.21.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan
Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs
dan Benda Cagar Budaya

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	5	12	-300	6	16,67	277,83	36	46,30
2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	7	5	0	10	0	0	60	0

Sumber : DISBUDPORAPAR, Update per Januari 2022.

1. Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta sarana penyelenggaraan seni dan budaya selama tahun 2017-2021 dapat disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22.

Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	kegiatan	52	52	28	7	5
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Tempat	6	6	6	6	6

Sumber : DISBUDPORAPAR, Update per Januari 2022.

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Klaten diantaranya: 1. RSPD, 2. Monumen Juang, 3. TIC, 4. Pendopo Pemda, 5. GOR, dan 6. Sidoguro. Sedangkan promosi, pengembangan dan pembinaan seni budaya daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan pengiriman Tim kesenian Kabupaten ke TMII, ke Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten lain. Begitu juga dengan pemberian bantuan keuangan kepada sanggar-sanggar kesenian yang ada di Kabupaten Klaten semakin intensif.

Upaya untuk perlindungan dan pelestarian seni budaya daerah akan didaftarkan melalui HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual), diantaranya: a) Lurik ATBM; b) Tari Lurik Payung; dan c) Tari Lurik Asri. Begitu juga dengan pelestarian dan penggunaan bahasa Jawa dialek Yogyakarta-Surakarta yang diimplementasikan dalam bentuk lomba dongeng Bahasa Jawa, Lomba Dalang Muda, dan mewajibkan penggunaan bahasa Jawa halus setiap hari Kamis di semua OPD Kabupaten Klaten belum efektif dilaksanakan.

2. Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan.

Selama tahun 2017-2021 perkembangan jumlah cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten tidak ada perubahan. Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23.
Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Candi Purbakala	Jumlah	8	8	8	8	8
2	Jumlah Makam	Jumlah	4	4	4	4	36
3	Pemandangan Alam	buah	2	2	2	2	18
4	Museum	buah	1	1	1	1	1

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.23. sebagaimana tersebut di atas, jumlah cagar budaya yang dilestarikan selama tahun 2017-2020 tidak mengalami perkembangan, pada tahun 2021



mengalami penambahan jumlah makam sebanyak 32 dan pemandangan alam sebanyak 16.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya, diantaranya:

1. Pengembangan Kebudayaan;
2. Pengembangan Kesenian Tradisional;
3. Pembinaan Sejarah;
4. Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya; dan
5. Pengelolaan Permuseuman.

Permasalahan:

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Kekayaan, nilai dan keberagaman budaya yang berkembang apabila tidak dirawat dan dipelihara dengan baik akan mengakibatkan *cultcure lag* (kemandegan budaya), dan menjadi ancaman desintegrasi bangsa;
- b. Terbatasnya pengetahuan tentang sejarah, seni budaya dan tradisi sehingga penerapan nilai luhur budaya Jawa semakin berkurang;
- c. Belum semua para pelaku/pekerja seni dapat fasilitas dalam berekspresi mementaskan hasil karyanya;
- d. Belum ditetapkannya icon seni budaya asli Kabupaten Klaten;
- e. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran cagar budaya; dan
- f. Banyak benda yang diduga sebagai cagar budaya yang belum teridentifikasi untuk dilestarikan.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian



Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi pamong budaya, sesuai dengan dinamika yang berkembang;
- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi untuk pengembangan dan pengelolaan budaya; dan
- c. Pemberian penghargaan yang sepadan bagi pelaku seni dan budaya yang berprestasi.

8. Sasaran Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan;



Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten semula digagas sebagai tempat pusat pembelajaran bersama dan diskusi, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Departemen P dan K Nomor: 510/1.UM/1971 tanggal 27 Juli 1971 perihal Pembentukan Perpustakaan "Sarana Pustaka" Klaten. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 1973 Bupati Klaten Soetijoso mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 11/066/SK/kdh/1973 Tentang Perubahan Perpustakaan Sarana Pustaka Kabupaten Klaten di jadikan perpustakaan induk Kabupaten Klaten. Seiring dengan perkembangan waktu Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten diubah dengan penetapan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016.

Upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan dengan melakukan berbagai event Daerah, dan menawarkan berbagai layanan kreatif. Layanan kreatif yang dilakukan diantaranya: Ikut kegiatan Car free day, menyertai kegiatan kunjungan bupati, menambah koleksi perpus, dan meningkatkan jam layanan. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan budaya baca masyarakat. Adapun capaian sasaran: [Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan](#) disajikan pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase Kenaikan kunjungan masyarakat	4	22,19	-64	5	-83,34	-1667	5	-1667

Sumber: DISPERSIP, Update per Januari 2022.

Pada Tahun 2021 jumlah perpustakaan desa sebanyak 79 unit dan perpustakaan kelurahan sebanyak 2 unit. Layanan perpustakaan keliling sebanyak 5 unit yang melayani 26 kecamatan di Kabupaten Klaten, secara bergilir sesuai jadwal yang ditetapkan. Terdapat juga layanan perpustakaan keliling dengan 5 unit sepeda motor untuk merolling buku pada daerah yang tidak terjangkau bus keliling. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pencapaian peningkatan minat baca masyarakat. Adapun perkembangan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Klaten tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25.
Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah koleksi perpustakaan	Judul	44.687	45.362	49.786	49.786	50.156
2	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	41.225	68.346	83.511	70.878	11.811

Sumber : DISPERSIP Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.25. sebagaimana tersebut di atas, jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2020 sebanyak 70.878 orang, dan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 11.811 orang (atau turun 83,34%). Perkembangan jumlah perpustakaan desa selama tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.26.



Tabel 3.26.
Perkembangan Jumlah Perpustakaan Desa
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

NO	Tahun	Jumlah Perpustakaan
(1)	(2)	(3)
1	2017	45
2	2018	45
3	2019	45
4	2020	45
5	2021	79

Sumber : DISPERSIP, Up date per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.26. sebagaimana tersebut di atas, perkembangan lima tahun terakhir (tahun 2017-2021) bahwa terdapat peningkatan jumlah perpustakaan yang didirikan di desa-desa setiap tahunnya. Namun demikian jumlah perpustakaan desa sampai dengan tahun terakhir hanya sejumlah 79 desa dari 391 desa (atau baru 20,20% dari jumlah desa).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait upaya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: [Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan](#) dengan Program Pembinaan Perpustakaan.

Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke Perpustakaan, diantaranya:

- a. Terbatasnya buku literatur yang diminati/dibutuhkan pengunjung; dan
- b. Kurang representatifnya ruang baca, sarana dan prasarana perpustakaan; dan
- c. Jumlah kunjungan masyarakat berkurang dikarenakan pandemic Covid-19.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan pengunjung perpustakaan, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pengelola perpustakaan melalui e-book pada website Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- b. Menghimpun buku-buku masyarakat yang memiliki nilai untuk dikelola sebagai museum buku; dan
- c. Menciptakan lingkungan perpustakaan yang representatif.



9. Sasaran *Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah;*



*Ukuran tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diukur dari tingkat profesionalisme aparatur Pemerintah daerah, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai **Road Map** reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien tercermin ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.*

Sehingga akan terlihat sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah** sebagaimana Tabel 3.27.

Tabel 3.27.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Profesionalitas ASN	-	77,55	78,06	87,36	78,06	89,35	87,36	89,35

Sumber: BKPSDM, Update per Januari 2022.

*) Catatan: sementara dengan asumsi kinerja tahun 2020, mengingat tahun 2021 belum rilis.

Tuntutan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja Pemerintah sebagai kewajiban Pemerintah yang harus diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 merupakan cerminan sejauh mana integritas ASN dalam menjalankan mandat. Capaian Indeks Profesionalitas ASN dapat disajikan pada Tabel 5.28.



Tabel 3.28.
Capaian Indeks Profesionalitas ASN

IPP	Unsur				Jumlah Nilai IPP
	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai	12,1	36,05	25	4,91	78,06

Sumber: BKPSDM, Update per Januari 2022.

Capaian kinerja sebagaimana Tabel 5.28. di atas merupakan hasil dari penilaian berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diperoleh hasil, bahwa pada tahun 2020 nilai IPP mencapai 78,06 dengan (*kategori tinggi*). Indeks Profesionalitas ASN ini ditunjang dari unsur :

a. Kualifikasi

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, dan diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan Pengukuran. Pada tahun 2019 jumlah ASN sebanyak 9877 orang, dengan perincian yang berpendidikan: a) Jenjang SD/MI sebanyak 63 orang (atau 0,64%), b) Jenjang SMP/MTS sebanyak 226 orang (atau 2,29%), c) Jenjang SMA/MA/SMK sebanyak 1.531 orang (atau 15,50%), d) Jenjang D3 sebanyak 1.610 orang (atau 16,30%), e) Jenjang S1 sebanyak 5.884 orang (atau 59,57%), dan f) Jenjang S2 sebanyak 563 orang (atau 5,70%). Sedangkan pada tahun 2020 jumlah ASN sebanyak 8.990 orang dengan perincian yang berpendidikan: a) Jenjang SD/MI sebanyak 53 orang (atau 0,59%), b) Jenjang SMP/MTS sebanyak 202 orang (atau 2,25%), c) Jenjang SMA/MA/SMK sebanyak 1.339 orang (atau 14,89%), d) Jenjang D3 sebanyak 1.403 orang (atau 15,61%), e) Jenjang S1 sebanyak 5.443 orang (atau 60,55%), dan f) Jenjang S2 sebanyak 550 orang (atau 6,12%).

b. Kompetensi

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam



pelaksanaan tugas jabatan, dan diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas: a. Diklat Kepemimpinan; b. Diklat Fungsional; c. Diklat Teknis; dan d. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.

Kondisi jumlah pegawai Kabupaten Klaten yang berjumlah 9.877 ASN pada tahun 2019 yang mengikuti: Diklat Teknis sesuai Tupoksi sebanyak 353 orang, Diklat Teknis Fungsional sebanyak 63 orang dan Bimbingan Teknis sebanyak 56 orang. Atau dengan kata lain, jumlah ASN yang Diklat dan Bintek hanya berkisar 4,78%. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah ASN sebanyak 8.990 orang, yang mengikuti: Diklat Teknis sesuai Tupoksi sebanyak 20 orang, Diklat Teknis Fungsional sebanyak 550 orang (atau dengan kata lain, jumlah ASN yang Diklat dan Bintek hanya berkisar 56,4%). Hal ini menandakan masih diperlukan peningkatan sumber daya aparatur agar kinerja ASN meningkat.

c. Kinerja

Dimensi Kinerja, menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS, dan diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

d. Disiplin

Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (5) Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2019 jumlah ASN yang melanggar disiplin sebanyak 10 (sepuluh) ASN, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 10 kasus pelanggaran disiplin.



Program yang dilaksanakan pada tahun 2021 untuk sasaran strategis: *Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah* terdiri dari 2 (dua) program, diantaranya:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Kepegawaian Daerah; dan
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Permasalahan:

- a. Belum semua Pejabat Struktural mengikuti Diklat Struktural sesuai jenjangnya untuk tahun 2020 tidak ada pengiriman Diklatpim (Diklat Struktural) karena adanya pandemic *Covid-19*;
- b. Belum terisinya seluruh kotak jabatan (13%);
- c. Masih dalam kategori sedang nilai IP ASN (78,06);
- d. Belum optimalnya update data Kepegawaian (20%); dan
- e. Belum optimalnya pengembangan aparatur (4%).

Solusi:

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif.

10. Sasaran *Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah*;



Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur Opini BPK terhadap LKPD. Opini BPK terhadap LKPD merupakan penilaian atas kinerja keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dan kinerja keuangan Pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan baik.

Dasar penilaian BPK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan ketentuan ini pemeriksaan dilakukan

secara periodik setiap tahun, dan pemeriksaan ini mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, laporan kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat, terdiri atas: Tidak Wajar (TD), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah** sebagaimana Tabel 3.29.

Tabel 3.29.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	$(10) = (7)/(9) * 100$
1	Opini BPK terhadap LKPD	WTP (3)	WTP (4)	WTP (4)	WTP (3)	WTP (4)	100	WTP (4)	100

Sumber: BPKPAD, Up date per Januari 2022.

Catatan: Tidak Wajar (TD) Skor 1, Tidak Memberikan Pendapat (TMP) Skor 2, Wajar dengan Pengecualian (WDP) Skor 3, dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Skor 4.

Realisasi atas target kinerja keuangan menunjukkan hasil kinerja sangat tinggi, atau menghasilkan opini penilaian *WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)*, kinerja ini merupakan komitmen bersama di semua jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan aspek akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan, transparansi penggunaan anggaran, dan tertib administrasi sebagai bagian dari fakta integritas yang telah dibangun dan diciptakan penyelenggara negara. Adapun Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016–2020 disajikan pada Tabel 3.30.



Tabel 3.30.
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2016–2020

Tahun	Opini BPK	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2016	WDP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya pada sekolah-sekolah, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, serta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pegawai ASN.
2017	WDP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya Perangkat Daerah dan pengelolaan dana BOS.
2018	WTP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> pengendalian rekening pengelolaan KAS dan mekanisme pembayaran langsung masih lemah. Pengelolaan piutang PBB perdesaan dan perkotaan tidak tertib.
2019	WTP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> 1. Pengelolaan Rekening Pemkab dan pengelolaan kas pada Bendahara belum memadai diantaranya adanya Rekening aktif pada PT Bank Jateng, PT BPR Bank Klaten dan Bank Umum atas nama Pemkab Klaten yang tidak terdaftar dalam SK Bupati, dan Bendahara Pengeluaran yang tidak tertib. 2. Pengendalian dan penatausahaan aset tetap Pemkab belum optimal, diantaranya luas tanah bawah jalan yang belum akurat, sebanyak 684 ruas jalan lingkungan belum ditetapkan dalam SK Bupati, pembayaran pajak kendaraan bermotor belum dipenuhi, administrasi pinjam pakai dan sewa aset tetap belum tertib, serta terdapat barang hilang hasil sensus yang belum diverifikasi.
2020	WTP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> 1. Belanja dana BOS tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp.5,11 Milyar, diantaranya terdapat realisasi Belanja Honor bagi ASN senilai Rp,3,83 Milyar dan terdapat realisasi Belanja Jasa Pihak Ketiga Non Konsultasi kepada ASN dan pegawai di sekolah senilai Rp.1,28 Milyar. 2. Pengendalian pengelolaan dan penatausahaan persediaan serta sistem informasi persediaan belum memadai, diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum melaksanakan penatausahaan dan pencatatan persediaan secara tertib dan sistem informasi persediaan pada OPD Puskesmas, instalansi Farmasi Dinas Kesehatan dan RSUD Bagas Waras belum memadai. 3. Penataan usaha dan pengamanan aset tetap pemerintah Kabupaten Klaten belum optimal diantaranya terdapat tujuh bidang tanah milik desa masih tercatat pada KIB A. 12 tanah dan 24 ruas jalan lingkungan belum masuk SK Bupati, serta terdapat aset tetap milik sekolah swasta dan SMA/SMK yang masih tercatat di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Sumber: BPKPAD, Up date per Januari 2022.

*) Catatan: Opini BPK tahun 2021 In Proses.



Hasil penilaian sebagaimana tersebut pada Tabel 3.30. di atas, berdasarkan atas Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan, serta penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan, serta penyajian laporan keuangan secara menyeluruh yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2021, dengan penguatan Program diantaranya:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
4. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Permasalahan:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan masih ditemukan beberapa temuan penggunaan keuangan Daerah yang efektif dan efisien; dan
- b. Penyajian laporan keuangan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten belum lengkap atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan.

Solusi:

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN yang mengelola barang dan jasa daerah; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

11. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD;



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah mendukung tugas pokok DPRD, dan membuat laporan administrasi dan keuangan. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD** tahun 2021 sebagaimana Tabel 3.31.

Tabel 3.31.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja
Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	70	91,31	100	90	81,82	90,91	85	96,26

Sumber: SET DPRD, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.31. sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2020 jumlah Raperda yang disahkan tepat waktu sebanyak 7 Raperda, dari 7 Raperda yang direncanakan, sedangkan pada tahun 2021 jumlah Raperda yang disahkan tepat waktu sebanyak 9 Raperda, dari 11 Raperda yang direncanakan.

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten dalam mendukung pencapaian jangka menengah Daerah



diukur dari jumlah Keputusan DPRD selama tahun 2017-2021 sebagaimana Tabel 3.32.

Tabel 3.32.
Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Perda	18	28	15	7	9
2	Keputusan DPRD	38	49	39	21	27
3	Keputusan Pimpinan DPRD	18	9	4	2	3
4	Keputusan Badan Anggaran	6	6	7	7	7
5	Keputusan Badan Musyawarah	12	13	13	13	13
Jumlah		92	105	78	50	59

Sumber: SET DPRD, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.32. Sebagaimana di atas, hasil pengukuran kinerja terhadap indikator jenis dan jumlah keputusan DPRD Kabupaten Klaten tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif terutama jumlah Perda yang disahkan tepat waktu, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD, hal ini disebabkan kondusivitas daerah, terutama pandemi Covid-19.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: [Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD](#) pada tahun 2021, dengan program:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
2. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Permasalahan:

- a. Belum semua ASN mengikuti Diklat struktural dan fungsional untuk meningkatkan kualitas dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD; dan
- b. Tingginya mobilitas DPRD yang tidak diimbangi kecepatan pengadministrasian kegiatan terkadang belum bisa diukur sebagai capaian kinerjanya.

Solusi:

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN di lingkungan Sekretariat DPRD untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

12. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;



Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga akan kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai road map untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat terlaksana dengan tepat waktu dan manfaat.

Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan perencanaan selalu mengedepankan azas-azas pendekatan perencanaan, Yakni: diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan **nasional**. Berdasarkan misi jangka menengah Daerah ditetapkan sasaran strategis: **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah** sebagaimana Tabel 3.33.

Tabel 3.33.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	Na	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BAPPEDALITBANG, Update per Januari 2022.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah** pada tahun 2021, yang didukung perlunya **perencanaan pembangunan Daerah yang** wajib berbasis data dan informasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat harus didukung **data dan informasi pelaksanaan pembangunan.**

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah** pada tahun 2021, dengan program:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.



Permasalahan:

- a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk mendukung tugas dan fungsi perencana;
- b. Tidak tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan yang mudah diakses sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi kinerja;
- c. Penggunaan sistem data dan informasi belum terintegrasi; dan
- d. Masih adanya kendala pengumpulan data dan pengukuran data kinerja secara akurat dan cepat.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN perencana;
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja; dan
- c. Perencanaan pembangunan daerah harus didukung *base line data dan informasi pembangunan* yang akurat, dan tepat manfaat. Dukungan semua pihak untuk mewujudkan perencanaan yang tepat waktu dan manfaat, serta untuk menjaga konsistensi antar dokumen rencana sangat dibutuhkan sekaligus sebagai upaya kita mendukung: *Terwujudnya Masyarakat Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.*



13. Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Arsip SKPD;



Titip Bandaku. Program yang dimaksud yakni menduplikasi arsip berharga milik warga dalam bentuk digital. Program itu digulirkan untuk memudahkan warga ketika arsip berharga milik warga dalam bentuk fisik rusak atau hilang terutama di daerah rawan bencana. Dinas Arpus menjamin keamanan dan kerahasiaan arsip dalam bentuk digital. Inovasi itu dibikin berkaca pada pengalaman erupsi Gunung Merapi 2010. Saat itu, banyak arsip warga yang rusak akibat terdampak erupsi Merapi. Lantaran tak memiliki salinan, warga kesulitan untuk mendapatkan kembali arsip berharga mereka seperti sertifikat tanah, ijazah, buku nikah, dan lain-lain.

Upaya Pemerintah kabupaten dalam meningkatkan tata kelola Arsip SKPD dengan melakukan berbagai perbaikan sarana dan prasarana kearsipan, dan peningkatan pengelolaan arsip secara terpadu. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Arsip. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD** disajikan pada Tabel 3.34.

Tabel 3.34.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatkan Tata Kelola Arsip SKPD

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	5	12,56	8,72	5	1,68	33,60	25	6,72

Sumber: DISPERSIP, Update per Januari 2022.

Pengelolaan kearsipan sebagai bagian dari aset Pemerintah Daerah dilihat dari jumlah arsip yang tercatat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 sebanyak 120.417 arsip,

dan pada tahun 2021 sudah mencapai sebanyak 122.445 arsip. Gambaran pengelolaan kearsipan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.35.

Tabel 3.35.
Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Arsip	buah	78.434	87.625	98.635	120.417	122.445

Sumber: DISPERSIP, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.35. sebagaimana tersebut di atas, Pelayanan arsip untuk OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan dapat berkembang kearah arsip digital, sehingga akan lebih memudahkan dalam pencarian arsip. Dengan semakin meningkatnya jumlah koleksi arsip dan semakin mutakhirnya pengelolaan kearsipan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung perpustakaan, sehingga bisa meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan Daerah.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: **Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD** dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta memfaatkan **data dan informasi pelaksanaan pembangunan** yang terdokumentasikan/tersipkan. Adapun untuk mencapai indikator **Tata Kelola Arsip SKPD** pada tahun 2021 didukung dengan program:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengelolaan Arsip; dan
3. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

Permasalahan:

- a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan arsip Daerah; dan
- b. Terbatasnya ruang untuk penyimpan arsip, dan sebagian besar arsip belum terdigitalisasi.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN pengelola arsip; dan



- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

14. Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel;



Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan terdepan memerlukan peningkatan standar pelayanan dalam hal: pemberdayaan masyarakat, menjaga adat-istiadat, serta melayani kebutuhan administrasi penduduk. Upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel dengan melakukan berbagai peningkatan partisipasi, dan penyempurnaan regulasi tentang desa. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang profesional, transparan dan akuntabel.

Di Kabupaten Klaten ada sebanyak 391 desa dengan jumlah RT 9.604 dan jumlah RW sebanyak 3.686. Sedangkan jumlah kelurahan ada 10 kelurahan dengan jumlah RT 374 dan RW 113. Disamping itu pada tahun 2021 tercatat jumlah Perangkat Desa sebanyak 2.610 orang, dan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 2.703 orang, serta lembaga-lembaga desa lainnya untuk mendukung pencapaian kinerja pemerintahan desa. Dengan catatan data jumlah RT/RW berdasarkan data aplikasi Jogo Tonggo.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel** disajikan pada Tabel 3.36.

Tabel 3.36.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional,
Transparan dan Akuntabel

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Persentase penyelenggaraan Pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	15	68	88	100	100	100	100	100

Sumber: DISPERMADES, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.36. sebagaimana tersebut di atas, persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang professional, transparan dan akuntabel mencapai 100% dimana dari jumlah desa sebanyak 391 desa sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa).

Guna pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan Pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel langkah yang ditempuh adalah dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, penetapan APBDes yang tepat waktu dan peningkatan pembinaan PKK. Adapun perkembangan persentase peningkatan kapasitas pemerintahan desa tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.37.

Tabel 3.37.
Perkembangan Persentase Peningkatan Kapasitas Pemerintahan
Desa Tahun 2017-2021

Tahun	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan (%)	Jumlah desa binaan PKK dalam satu Periode RPJMD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	35	31	39
2018	88,43	58,36	96,8
2019	75	59	66
2020	0	88	78
2021	0	100	91

Sumber: DISPERMADES, Update per Januari 2022.

*) catatan: pada tahun 2020 dan tahun 2021 kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa ditiadakan karena adanya refocusing untuk penanganan Covid-19.



Berdasarkan Tabel 3.37. sebagaimana tersebut di atas, kinerja penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan kinerja, dilihat dari cakupan Desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan pada tahun 2020 baru 88% dan pada tahun 2021 sudah mencapai 100 %.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel* dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta terlibat pelaksanaan pembangunan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pelestarian kegiatan. Capaian kinerja *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel* didukung dengan program, diantaranya:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peningkatan Kerjasama Desa;
3. Administrasi Pemerintahan Desa; dan
4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Permasalahan:

- a. Masih lemahnya pengelolaan tata laksana administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- b. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan desa;
- c. Belum optimalnya pengelolaan aset desa;
- d. Masih rendahnya kualitas perangkat desa; dan
- e. Potensi PKK belum diberdayakan secara optimal untuk pengembangan kawasan perdesaan.

Solusi:

- a. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur desa, untuk memanfaatkan peluang pengembangan teknologi informasi; dan
- c. Peningkatan peran PKK dalam pengembangan potensi kawasan perdesaan.



15. Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien bisanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai Road Map untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga output, outcome dan benefite akan kelihatan progres capaiannya.

Untuk mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** upayakan yang dilakukan adalah dengan mendorong transparansi penggunaan anggaran dengan penguatan pengawasan rencana pembangunan yang ketat, disamping perlunya laporan pada para pihak tepat waktu.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** sebagaimana Tabel 3.38.

Tabel 3.38.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Level Maturitas SPIP	1	2	3	3	3	100	3	100
2	Level Kapabilitas APIP	2	2	3	3	3	100	3	100
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	47,89 (C)	60,33 (B)	61,32 (B)	70 (BB)	62,07 (B)	88,67	70 (BB)	88,57

Sumber: ITDA dan SETDA, Update Januari 2022.

Catatan : SPIP dirilis terakhir pada tahun 2019, dan APIP tahun 2020.

1. Level Maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dan Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Kapabilitas APIP ditingkatkan untuk memastikan dan mengurangi terjadinya penyimpangan/penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai melalui Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP). Level Maturitas SPIP Kabupaten Klaten berada di level 3 berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas pelaksanaan penilaian maturitas level SPIP di Kabupaten Klaten tanggal 26 November 2019 oleh Tim Penjamin Kualitas dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor LHR-586/D3.04/2/2019 Tanggal 21 Juni 2018, Inspektorat Kabupaten Klaten disimpulkan bahwa Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Klaten berada pada level 3.

2. Level Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Maturitas SPIP terdiri dari 5 tingkatan yaitu:

1. Level 0 (belum ada), Belum memiliki kebijakan dan prosedur;
2. Level 1 (Rintisan), Ada praktik pengendalian intern – ada kebijakan dan prosedur tertulis, namun masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik. Tanpa komunikasi dan pemantauan;
3. Level 2 (Berkembang), Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi.



4. Level 3 (Terdefinisi), Ada praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
5. Level 4 (Terkelola & Terukur), Ada praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
6. Level 5 (Optimum), Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Kabupaten Klaten menetapkan target pada tahun 2019 mencapai tingkat maturitas SPIP level 3 (tiga). Target tersebut telah tercapai dengan baik pada tahun 2019 karena berdasarkan penilaian telah terdapat pengendalian intern walaupun belum terdokumentasi dengan baik. Penilaian Maturitas SPIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat dan kemudian dilakukan *Quality Assurance* (kendali mutu) oleh tim dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Penilaian mandiri telah dilakukan pada akhir tahun 2017 dan kemudian dilakukan kendali mutu oleh BPKP DIY pada awal tahun 2018 dengan nilai akhir 2,29. Penilaian mandiri dilakukan kembali pada akhir tahun 2018 dengan nilai 3,35 kemudian direviu oleh BPKP DIY dengan nilai 3,15. Akhirnya berdasarkan hasil *Quality Assurance* dari BPKP Pusat tertanggal 26 November 2019, Kabupaten Klaten dinyatakan telah mencapai Level 3 Maturitas SPIP.

3. Level Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP ditargetkan pada tahun 2018 mencapai level 3 (tiga), namun demikian realisasinya baru mencapai level 2. Sama dengan Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian tingkat kapabilitas APIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat dan kemudian dilakukan *Quality Assurance* (kendali mutu) oleh tim dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Penilaian Mandiri atas kapabilitas APIP di Kabupaten Klaten telah dilakukan sebanyak dua kali. Penilaian mandiri pertama dilakukan pada bulan April 2018 dan penilaian mandiri kedua dilakukan pada Bulan November 2018. Atas penilaian mandiri



pertama telah dievaluasi oleh BPKP DIY dengan hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Klaten mencapai level 2 (dua). Penilaian Mandiri tingkat Kapabilitas APIP yang diselesaikan tanggal 13 November 2018 telah menunjukkan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten telah mencapai level 3 (tiga), namun demikian hasil evaluasi (*quality Assurance*) dari BPKP Pusat baru mencapai Level 2+, dengan penjelasan sebagaimana Tabel 3.39.

Tabel 3.39.
Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
Inspektorat Kabupaten

No	Elemen	Level
(1)	(2)	(3)
1	Peran dan Layanan	3
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	2
3	Praktik Profesional	2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan	3
6	Struktur Tata Kelola	3

Sumber: ITDA, Update Per Januari 2022.

Peningkatan Level Kapabilitas APIP ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh *Institute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation* yaitu *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*. Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IA-CM) adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IA-CM dimaksudkan sebagai model universal dengan perbandingan sekitar prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern. Terdapat 6 (enam) elemen yang dinilai dari model tersebut yaitu Peran dan Layanan; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Praktik Profesional; Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; Budaya dan Hubungan Organisasi; serta Struktur Tata Kelola.

Berdasarkan Tabel 3.39. sebagaimana tersebut di atas, penyebab belum tercapainya Level 3, diantaranya:

- a. Inspektorat belum mempunyai SDM yang berkualifikasi sebagai Perencana Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)



disebabkan Inspektorat belum menginternalisasi peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kerangka kompetensi (KPA tersedianya Staf APIP yang berkualifikasi profesional pada elemen 2);

- b. Inspektorat belum menilai keakuratan hasil penilaian risiko (*risk register*) OPD dan menggunakannya sebagai dasar untuk penyusunan PPBR.

Selanjutnya berdasarkan nilai Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang masih pada level 2, Inspektorat Kabupaten Klaten melakukan penilaian mandiri ke BPKP DIY untuk mendapatkan QA, dan diajukan ke BPKP Pusat untuk direviu. Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil reviu (LHR) dari Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah (BPKP) Nomor LHR-586/D3.04/2/2019, tertanggal 26 Desember 2019 dinyatakan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten telah berada pada level 3, sebagaimana Tabel 3.40.

Tabel 3.40.

Kapabilitas APIP Kabupaten Klaten

No	Elemen	Hasil SA	Hasil QA	Hasil Reviu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peran dan Layanan	3	3	3
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	3	3	3
3	Praktik Profesional	3	3	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	3	3
5	Budaya dan Hubungan	3	3	3
6	Struktur Tata Kelola	3	3	3

Sumber: ITDA, Update per Januari 2022.

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Tuntutan akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah yang harus bisa diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Sebagaimana



dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 mengupayakan pentingnya *Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih* yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan *Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan Mewujudkan tata Pemerintahan yang efektif dan efisien.*

Capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang meningkat. Target yang ditetapkan pada tahun 2019 dengan nilai 66, namun terealisasi 61,32 (dengan Kategori B). Perolehan skor 61,32 dengan kriteria sedang, dan pada tahun 2020 meningkat dengan nilai 62,07 (B).

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa ikhtisar penting terkait penilaian kinerja instansi Pemerintah di Kabupaten Klaten, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh nilai 62,07 atau dengan predikat B. Secara rinci hasil penilaian tersebut, sebagai berikut:
 - Perencanaan kinerja nilai 20,79
 - Pengukuran kinerja nilai 15,16
 - Pelaporan kinerja nilai 10,34
 - Evaluasi internal nilai 5,29
 - Capaian kinerja nilai 10,49
2. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Pemerintah Kabupaten Klaten telah membangun akuntabilitas kinerja di semua jenjang Pemerintahan dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang mencakup: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
4. Secara umum atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten adalah baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan, agar kinerja pada instansi Pemerintah terus mengalami peningkatan.



Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan guna meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, dengan langkah-langkah;
 - a) Mereviu dokumen perencanaan untuk melihat ketepatan dan sinkronisasi antara tujuan, sasaran, indikator kinerja untuk mencapai target pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.
 - b) Memperbaiki dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja sesuai dengan hasil reviu sebagai acuan penyusunan anggaran dengan menyusun agenda aksi daerah.
- b. Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja melalui langkah-langkah;
 - a) Menerapkan sistem pengukuran kinerja secara konsisten, dan sebagai bahan penilaian kinerja lembaga/pejabat, sekaligus sebagai pengendalian rencana.
 - b) Memastikan penerapan dan penetapan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai eselon II, III sampai pada tingkatan eselon IV.
- c. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja terhadap OPD, serta kualitas evaluasi program; dan
- d. Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berjenjang terhadap capaian kinerja baik di tingkat kabupaten maupun OPD sebagai dasar penerapan pemberian *reward and punishment* dalam rangka semakin mendorong terciptanya manajemen berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah terdiri dari 4 (empat) program, diantaranya:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi; dan
4. Administrasi Umum.



Permasalahan :

- a. Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dari Audit yang belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan dalam menindaklanjuti hasil temuan;
- b. Proses perencanaan, penganggaran, sampai laporan kinerja belum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
- c. Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur pengawas/auditor; dan
- d. Masih adanya ketidaktertiban pengelolaan barang daerah oleh OPD pengelola.

Solusi :

- a. Penguatan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dengan pembuatan regulasi, sosialisasi, koordinasi intensif, serta penguatan komitmen auditor dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengawasan;
- b. Mensinergikan/mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, sampai laporan kinerja belum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dan menghubungkan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- c. Mengajukan formasi auditor dan mengirimkan diklat fungsional/substantif ke lembaga diklat yang berkompeten; dan
- d. Penguatan komitmen seluruh kepala OPD dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mempertahankan opini WTP atas opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten.

16. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;



Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien biasanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga akan kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan

informasi dipakai sebagai road map untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga output, outcome dan benedite akan kelihatan progres capaiannya.

Penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi Daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah menetapkan target sasaran: **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah** dengan capaian disajikan pada Tabel 3.41.

Tabel 3.41.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2,6	3,2109	3,2109	3,1	3,2109	103,58	3,1	103,58

Sumber: SETDA, Update per Januari 2022.

Catatan: Rilis dari Depdagri terakhir kondisi tahun 2019.

Dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2017–2021 telah ditetapkan adanya kebijakan daerah untuk : **Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih** yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan mewujudkan tata Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Capaian EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan) Kabupaten Klaten tahun 2019 dengan **skor 3,2109** tergolong **sangat tinggi** dan nilai tersebut merupakan nilai laporan tahun 2018, sedangkan tahun 2020 dan tahun 2021 nilainya belum



dirilis dari Kementerian Dalam Negeri. Ke depan untuk memperbaiki peringkat EKPPD diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi secara lebih intensif dengan sesama OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
- b. Melakukan pendampingan/desk dengan OPD dalam mengisi format EKPPD.
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Inspektorat).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien*, dan program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah dengan dukungan program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diinisiasi oleh Setda Bagian Pemerintahan, sedangkan dari unsur kewilayahan di kecamatan dengan program:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
6. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Permasalahan :

- a. Masih adanya kendala pengumpulan data dan pengukuran data kinerja secara akurat dan cepat; dan
- b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang kredibel.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas OPD;
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat pengukuran kinerja dan mengambil tindakan/intervensi tepat waktu apabila diperlukan.



17. Sasaran Meningkatkan Koordinasi Penataan Peraturan Perundang Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM;



Masalah HAM dan penegakan peraturan perundang-undangan seolah selalu memunculkan ketidak-pastian. Misalnya, munculnya pandemi covid-19 mendorong masalah hak asasi manusia (HAM), karena dianggap menghambat ruang gerak masyarakat. Ada sementara yang menganggap covid-19 telah banyak memberikan hambatan yang membatasi mobilitas masyarakat. Oleh karena itu perlu ada ruang gerak kegiatan yang konkrit, yakni forum untuk menyelesaikan hak masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

Peran masyarakat luas menjadi sangat penting dalam kaitannya menangani hak asasi manusia akibat pandemi covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penanganan pandemi covid-19, bukan sekedar membatasi mobilitas penduduk, akan tetapi agar masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya hidup dalam situasi new-normal.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan koordinasi penataan peraturan perundang-undangan serta bantuan hukum dan HAM sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara, dan Indeks Kabupaten Peduli HAM.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM** sebagaimana Tabel 3.42.

Tabel 3.42.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya
Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta
Bantuan Hukum dan HAM

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	80	83	90	90	100	111,11	90	111,11
2	Indeks Kabupaten Peduli HAM	0	90	95,7	90	95,7 (A)	106,33	90	106,33

Sumber: SETDA, Update per Januari 2022.

1. Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara

Pada tahun 2020 produk hukum yang terealisasi sebanyak 5 peraturan daerah dan 73 Peraturan Bupati, dan jumlah perkara yang ditangani sebanyak 10 perkara. Sedangkan pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 350 Dokumen terdiri dari: 11 Propem Perda, 60 Perbup dan SK sebanyak 279. Target perkara yang ditangani pada tahun 2021 sebanyak 6 perkara.

Sedangkan realisasi Produk Hukum Daerah pada tahun 2021 sebanyak 7 Peraturan Daerah, 78 Peraturan Bupati dan 250 Surat keputusan Bupati dan realisasi penanganan perkara sejumlah 15 perkara.

2. Indeks Kabupaten Peduli HAM

Penghargaan atas martabat manusia adalah hak setiap warga negara yang wajib diberikan negara. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menjamin hak setiap warga negara diukur dari Indeks Kabupaten Peduli HAM.



Namun pada tahun 2021 Indeks Kabupaten Peduli HAM ditiadakan karena masa pandemi Covid-19, sehingga Indeks Kabupaten Peduli HAM tahun 2021 menggunakan indeks tahun 2020 dengan nilai 95,7 atau dengan kategori A (Sangat Peduli).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara** di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran dengan program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Permasalahan:

- a. Banyaknya produk hukum nasional yang belum ditindaklanjuti dengan peraturan daerah, begitu pula sebaliknya banyak peraturan daerah yang perlu ditinjau ulang.
- b. Supremasi hukum belum sepenuhnya dapat diimplementasikan sebagai penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan yang muncul.
- c. Pembangunan berbasis isu, sepenuhnya belum dianalisis secara tata naskah akademis baik menyangkut aspek: yuridis, sosial dan filosofinya.

Solusi:

- a. Pemerintah wajib hadir memberi perlindungan HAM terhadap warga negara yang mengalami ancaman.
- b. Pemerintah wajib memenuhi hak-hak politik, memberi peluang berkembangnya aspek kebebasan sipil, memperkuat aspek kelembagaan demokrasi agar Kabupaten Peduli HAM dapat diwujudkan.
- c. Memperkuat Sekretariat Komisi HAM Kabupaten.



18. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan;



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Upaya pengendalian dilakukan secara rutin, bulan/triwulanan/semesteran/tahunan untuk memastikan bahwa semua rencana pembangunan dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditentukan, dan mengurangi tingkatan deviasi dan menjamin efektivitas capaian kinerja.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana). Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan** sebagaimana Tabel 3.43.

Tabel 3.43.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	80	81	100	90	96	106,67	90	106,67

Sumber: SETDA, Update per Januari 2022.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kinerja pembangunan dilakukan dengan melakukan Rapat Koordinasi “*Senenan*” dan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan secara rutin, hal ini sebagai bentuk agenda aksi untuk pengendalian kegiatan yang diharapkan menjaga konsistensi capaian pelaksanaan pembangunan dengan target rencana. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 428 program dengan 2.157 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 96% dari target rencana dengan rencana anggaran sebanyak Rp.806.643.941.344,- dan terserap sebesar Rp.667.040.959.363,- (atau 82,66%). Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 330 program (berdasarkan jumlah program yang ada OPD) dengan 700 kegiatan dan subkegiatan 1777. Realisasi fisik tercapai 96% dari target rencana 90%. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.2.949.643.677.710,- dan terserap sebesar Rp.2.493.406.881.542,- (atau 84,53%).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: **Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan**, dengan Program Perekonomian dan Pembangunan.

Permasalahan:

Nihil

Solusi:

Nihil



19. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total anggaran belanja barang/jasa. Selain itu, perubahan juga dilakukan pada Pasal 66 yang mengatur mengenai Kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).

Untuk mewujudkan sasaran Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi. Adapun capaian sasaran: **Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel** sebagaimana Tabel 3.44.

Tabel 3.44.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Kredibel

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi)	0	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: SETDA, Update Januari 2022.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kinerja pembangunan: Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel dilakukan secara transparan, dan terbuka untuk publik. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 134 usulan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dan yang selesai sebanyak 110, gagal lelang sebanyak 13 usulan, 11 jasa pengadaan barang dan jasa dikembalikan ke OPD. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 139 usulan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan yang selesai sebanyak 134 pengadaan barang dan jasa yang diusulkan, yang gagal tender sebanyak 4 dan 1 paket pekerjaan dikembalikan ke OPD.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Kredibel dilakukan secara transparan, dengan dukungan Program Perekonomian dan Pembangunan.

Permasalahan:

Karena semua sistem sudah dijalankan secara *online*, tertutup kemungkinan adanya praktek penyimpangan.

Solusi:

Mengefektifkan pengendalian kegiatan agar semua pekerjaan fisik dapat diselesaikan tepat waktu.

20. Sasaran Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan;



Untuk menciptakan pelayanan kehumasan dan keprotokolan sesuai Standar Norma Presedur, dan Kreteria (NPSK), maka perlu dipertegas tugas dan fungsinya dalam hal:

- melaksanakan tata **protokol** dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
- menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
- menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan sebagaimana telah

ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja, diantaranya: Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah, Persentase dokumentasi kegiatan kepala Daerah, dan Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan** sebagaimana Tabel 3.45.

Tabel 3.45.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah	90/1200	98	99,42	100	100	100	100	100
2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala Daerah	90	98	98,16	100	100	100	100	100
3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah	100/125	98	99,86	100	100	100	100	100

Sumber: SETDA, Update Januari 2022.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam **Meningkatkan Fasilitas Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan**, pada tahun 2021, diantaranya:

1. Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah

Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah pada tahun 2020 jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan pada sebanyak 1720, dan terealisasi sebanyak 1710 (atau 99,42%). Sedangkan pada tahun 2021 yang direncanakan sebanyak 1.720 dan terealisasi sebanyak 1.720 (atau 100%).



2. Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah

Pada tahun 2020 jumlah dokumentasi kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 360 dan terealisasi sebanyak 355 (atau 98,61%). Sedangkan pada tahun 2021 dokumen kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 360 dan terealisasi sebanyak 360 (100%).

3. Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah

Pada tahun 2020 jumlah pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 450 dan terealisasi sebanyak 445 (atau 98,89%). Sedangkan pada tahun 2021 jumlah pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 450 dan terealisasi sebanyak 450 (atau 100%).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan** untuk mendukung kegiatan Kepala Daerah dilakukan dengan Program Administrasi Umum.

Permasalahan:

Liputan kegiatan Kepala Daerah, belum menjadi dokumen *cerita historis Pemerintahan* baru sebatas berita/informasi.

Solusi:

Menyusun sekapur sirih setiap event Kepala Daerah yang memiliki nilai historis menjadi cerita sukses perjalanan Pemerintah.



21. Sasaran Meningkatnya Fasilitas dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian;



Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID merupakan tim yang bertugas memantau dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan inflasi khususnya di daerah. Tim pengendalian inflasi di tingkat pusat sendiri sudah ada sejak tahun 2005.

“Inflasi atau gejala kenaikan harga menjadi faktor penting dalam perekonomian, karena inflasi yang tak terkendali bisa membuat kondisi dan stabilitas ekonomi terganggu.” Menyadari pentingnya peran dan keberadaan Tim Pengendalian Inflasi di tingkat pusat dan daerah maka pada tahun 2008 dilakukan pembentukan TPID dengan dukungan dari berbagai kalangan khususnya daerah.

Harapan dari keberadaan TPID adalah memantau sedini mungkin ancaman inflasi di suatu daerah dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Keberadaan TPID ini menjadi penting dan efektif karena daerah menyumbang 60% dari faktor penyusun inflasi (BPS).

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Fasilitas dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja Tingkat Inflasi YoY. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Fasilitas dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian** sebagaimana Tabel 3.46.

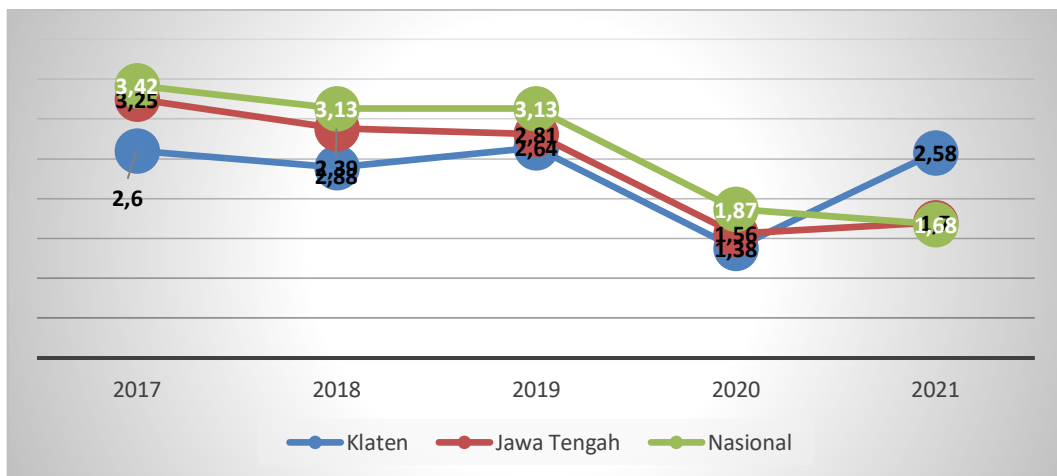
Tabel 3.46.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitas dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Tingkat Inflasi YoY	2,57	2,64	1,38	3,5 (± 1)	2,58	73,71	3,5 (± 1)	73,71

Sumber: SETDA, Update Januari 2022.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama tahun 2017-2021 sangat fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada Tahun 2017 sebesar 2,6%, atau lebih rendah dibanding dibanding angka inflasi Jawa Tengah maupun Nasional, namun sebaliknya pada tahun 2021 angka inflasi Klaten lebih tinggi Jawa Tengah maupun Nasional, hal ini karena pengaruh pandemi *covid-19*. Penurunan nilai inflasi disebabkan adanya pelaksanaan program pembangunan yang sinergis dan stabilnya harga komoditas. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Grafik 3.15.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, Update Per Januari 2022.
Grafik 3.15. Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Berdasarkan Grafik 3.15. di atas, laju inflasi selama tahun 2017-2021 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, namun berdasarkan penggolongannya, inflasi di Kabupaten Klaten apabila dilihat termasuk ringan, karena masih di bawah 10% per tahunnya, dan juga di bawah inflasi nasional maupun provinsi. Sedangkan untuk Tahun 2021 inflasi di Kabupaten Klaten sebesar 2,58% disebabkan oleh terkendalinya harga beberapa komoditas pangan utama dan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten untuk memantau kondisi pasar.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian** dalam menjaga stabilitas harga dengan menjaga inflasi daerah, agenda aksi ini dilakukan melalui Program Perekonomian dan Pembangunan.

Permasalahan:

Fluktuatifnya harga kebutuhan pokok, seringkali bergerak lebih cepat dari upaya Pemerintah untuk melakukan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Karena kegiatannya Pemerintahan bersifat "linier" tidak "given" atau menunggu waktu.

Solusi:

1. Perlunya stok kebutuhan bahan pokok yang aman dan tersedia; dan
2. Menggerakkan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten untuk bergerak cepat mengatasi gejolak harga yang dimungkinkan terjadi.

22. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat;

Pembangunan kesejahteraan sosial perlu dipahami sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan kesejahteraan sosial turut memberi kontribusi nyata dalam mencapai program pembangunan nasional, yakni pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan kelestarian lingkungan. Agar kinerja kesejahteraan sosial efektif, maka perlu dilakukan *Reinventing* mulai dari penataan desain dan manajemen program (terutama program penanggulangan kemiskinan), sumber daya manusia dan alokasi anggaran, serta pengendalian dari pusat hingga ke daerah.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja Persentase keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat** sebagaimana Tabel 3.47.

Tabel 3.47.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Persentase keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pembangunan bidang Kesra	90	90	95	95	95	100	95	100

Sumber: SETDA, Update per Januari 2022.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Meningkatkan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, pada tahun 2020 capaian indikator Persentase keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan pembangunan bidang Kesra sebanyak 95 %, dan pada tahun 2021 capaian kinerjanya 95%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat** untuk mendukung kegiatan Perangkat Daerah dilakukan dengan program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Permasalahan:

Kompleksitas permasalahan sosial belum disusun rencana Aksi Daerah untuk mengatasi isu daerah yang berkembang terkait dengan bidang Kesra.

Solusi:

Perlu disusun Renaksi Daerah Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dengan Perangkat Daerah terkait.



23. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah;



Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak azasi setiap warga negara, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Ketentuan peraturan perundangan ini telah ditindak-lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, ditegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional dan membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui perwujudan persediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pada kenyataannya peta penduduk rawan pangan yang dilansir BPS masih menunjukkan situasi yang sangat memprihatinkan. Rendahnya aksesibilitas pangan, dengan indikator kemampuan rumah tangga untuk selalu memenuhi kebutuhan pangan anggotanya akan mendorong penurunan konsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di tingkat rumah tangga. Pada akhirnya akan mengancam dan berdampak pada kekurangan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan yaitu ibu, bayi dan anak.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah** sebagaimana Tabel 3.48.

Tabel 3.48.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya
Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	12,5	10,98	10,98	12,6	10,87	86,27	12,6	86,27

Sumber: DKPP, Update per Januari, 2022.

Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 65.556 Ha (655,56 Km²). Pada Tahun 2021 berdasarkan pemakaian di lahan pertanian untuk penggunaan lahan sawah 31.708 Ha dan untuk lahan bukan sawah sebesar 6.579,5 Ha. Sedangkan untuk lahan bukan pertanian seluas 26.017 Ha. Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa sawah dengan sistem pengairan teknis seluas 19.012 Ha, sistem pengairan setengah teknis seluas 10.314 Ha; sistem pengairan sederhana seluas 2.202 Ha, serta sistem tadah hujan seluas 1.631 Ha.

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah dan cenderung mengikuti pertambahan jumlah penduduk, dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan berhubungan dengan lahan sawah dan lahan kering. Adapun Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya Tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.49.



Tabel 3.49.

Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian
Menurut Kecamatan dan Penggunaannya Tahun 2020

No	Kecamatan	Dari Sawah & Tegalan (Ha)	Peruntukan Bangunan Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
			Perumahan	Industri	Perusahaan	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	6,2401	4,8938	1,1598	0	0,1865	6,2401
2	Gantiwarno	0,3049	0,3049	0	0	0	0,3049
3	Wedi	1,2655	1,0455	0	0	0,2200	1,2655
4	Bayat	1,5360	1,5360	0	0	0	1,5360
5	Cawas	1,4323	1,0367	0	0	0,3956	1,4323
6	Trucuk	1,0909	0,8744	0,1965	0	0,0200	1,0909
7	Kalikotes	0,8770	0,8770	0	0	0	0,8770
8	Kebonarum	1,0576	1,0254	0,0322	0	0	1,0576
9	Jogonalan	3,0291	2,3517	0,6774	0	0	3,0291
10	Manisrenggo	0,5710	0,5710	0	0	0	0,5710
11	Karangnongko	0,2913	0,2913	0	0	0	0,2913
12	Ngawen	1,6694	1,6694	0	0	0	1,6694
13	Ceper	8,1483	3,0174	4,9491	0	0,1818	8,1483
14	Pedan	1,8115	1,7869	0,0246	0	0	1,8115
15	Karangdowo	1,2128	1,2008	0	0	0,0120	1,2128
16	Juwiring	2,2360	1,6907	0,5453	0	0	2,2360
17	Wonosari	5,3325	4,0268	1,3057	0	0	5,3325
18	Delanggu	4,9686	4,8386	0,1300	0	0	4,9686
19	Polanharjo	1,3451	1,1936	0,0909	0,0606	0	1,3451
20	Karanganom	4,7212	4,0590	0,6622	0	0	4,7212
21	Tulung	1,3996	1,0666	0,3330	0	0	1,3996
22	Jatinom	1,7253	1,6935	0	0,0318	0	1,7253
23	Kemalang	25,4459	0,0220	0	25,4239	0	25,4459
24	Klaten Selatan	8,4121	8,4121	0	0	0	8,4121
25	Klaten Tengah	3,4641	3,2521	0	0	0,2120	3,4641
26	Klaten Utara	3,5921	3,3666	0,2255	0	0	3,5921
	Jumlah	93,1802	56,1038	10,3322	25,5163	1,2279	93,1802

Sumber: DKPP, Update per Januari, 2022.

Catatan: Data 2021 belum rilis.

Sedangkan LP2PB (Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 32.451 Ha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya peruntukan sawah lestari Daerah. Dengan adanya LP2PB tersebut, alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan dengan rata-rata perubahan lahan pertanian 56 Ha di luar LP2PB.

Untuk mengatasi perubahan lahan, dan mengganti produksi pertanian yang hilang akibat perubahan lahan pertanian dikembangkan pola pertanian terpadu, yang merupakan integrasi



antara bidang tanaman pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan yang diharapkan kedepan bisa menjadi Kawasan Agropolitan. Perkembangan luas tanam dan luas panen tanaman pangan Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.50.

Tabel 3.50.
Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

No	Jenis Komoditas	2017		2018		2019		2020		2021	
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)
1	Padi	74.964	73.962	76.029	73.627	74.964	73.962	73.266	70.916	73654	73.313,30
2	Jagung	11.713	11.085	9.682	9.549	11.713	11.085	12.430	11.087	10746	10.966,70
3	Kedelai	2.562	2.234	1.935	1.523	2.562	2.234	561	544	1468	1275
4	Kacang Tanah	955	909	1.224	1.067	955	909	855	876	710	713,90
5	Kacang Hijau	240	228	350	299	240	228	1978	1843	1043	1042,40
6	Ubi Kayu	435	395	822	685	435	395	1193	997	958	625,40
7	Ubi Jalar	26	21	24	20	26	21	27	25	21	19,50

Sumber: DKPP, Update per Januari, 2022.

Sedangkan Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.51.

Tabel 3.51.
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2017-2021

No	Jenis Komoditas	2017		2018		2019		2020		2021	
		Produksi (Ton)	Provit as (Kwt/ha)	Produk si (Ton)	Provit as (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provit as (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provit as (Kwt/ha)	Produk si (Ton)	Provit as (Kwt/ha)
1	Padi	380.268	51,41	426.028	57,87	380.268	51,41	449.093	63,33	480024	65,58
2	Jagung	90.343	81,50	72.583	74,97	90.343	81,50	99.088	89,38	88538	80,73
3	Kedelai	4.440	19,87	2.759	18,12	4.440	19,87	1.040	19,12	1998	15,67
4	Kacang Tanah	1.527	16,79	1.784	14,58	1.527	16,79	1.158	13,21	1087	15,23
5	Kacang Hijau	285	12,50	260	8,72	285	12,50	1.985	10,77	1542	14,79
6	Ubi Kayu	9.778	224,99	32.224	392,11	9.778	224,99	27.296	273,81	15155	242,32
7	Ubi Jalar	251	119,28	356	143,55	251	119,28	333	134,77	266	136,66

Sumber: DKPP, Update per Januari, 2022.

Berdasarkan Tabel 3.50 dan Tabel 3.51 sebagaimana di atas, terlihat bahwa rata-rata luas panen dibawah luas tanam. Hal ini disebabkan karena adanya puso dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), terutama Wereng Batang Coklat



(WBC), Tikus, Penggerek Batang dan Sundep. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi.

Produksi dan produktivitas padi pada Tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan Tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh implementasi intensifikasi pertanian yang cukup baik dan penerapan teknologi di bidang pertanian. Sedangkan Produksi Perkebunan Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.52.

Tabel 3.52.
Produksi Perkebunan Tahun 2017-2021

No.	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tembakau Rajangan	1.233,527	1.147,27	1.750,30	1.558,79	1.567,45
2	Tembakau Asepan	1.070,724	1.037,05	2.595,30	2.308,72	1.270,83
3	Tembakau Vorstenland	239,455	135,535	55,144	-	-
4	Kelapa Dalam	4.697,582	3.976,64	4.048,189	4.322,36	3.674,01
5	Kelapa Hibrida	45,60	49,073	29,340	29,94	26,95
6	Kelapa Deres	98,74	87,149	87,15	78,84	63,07
7	Kopi Arabica	81,320	43,32	43,320	162,20	145,98
8	Kopi Robusta	9,990	9,82	9,82	12,94	36,46
9	Cengkeh	45,630	36,5	36,5	49,75	237,73
10	Lada	12,110	9,78	11,4	17,70	19,50
11	Tebu	3.258,940	3.258,9	3.195,972	2.902,922	2.882,673

Sumber: DKPP, Update per Januari, 2022.

Berdasarkan Tabel 3.52. sebagaimana tersebut di atas, komoditas andalan dan unggulan adalah Tembakau Rajangan produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2019 sebesar 1.750,30 Ton dan Tembakau Asepan produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2019 sebesar 2.595,30 ton. Sedangkan populasi ternak pada tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.53.



Tabel 3.53.
Populasi Ternak Tahun 2017-2021

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sapi Potong	88.850	100.259	102.431	104.312	105.734
2	Sapi Perah	6.098	6.284	6.433	6.807	6.783
3	Kambing	88.957	9.596	101.402	105.782	108.932
4	Domba	38.570	45.204	46.963	47.562	51.278
5	Ayam Bukan Ras	3.256.177	2.245.443	2.532.676	2.109.668	2.789.664
6	Ayam Pedaging	3.385.400	2.475.187	3.896.788	2.489.800	3.268.129
6	Ayam Petelur	930.234	746.422	832.764	900.342	784.621
7	Itik	575.100	425.473	430.329	397.012	213.877
8	Burung Puyuh	452.332	519.566	535.244	363.563	327.829

Sumber: DKPP, Update per Januari, 2022.

Berdasarkan Tabel 3.53. sebagaimana tersebut di atas, hal yang menjadi catatan khusus adalah penurunan jenis Ayam Bukan Ras dan Ayam Pedaging. Pada tahun 2020 jumlah Ayam Bukan Ras sebanyak 2.109.668 ekor, dan pada tahun 2021 naik menjadi sebanyak 2.789.664 ekor (naik 32,23%), begitu juga dengan Ayam Pedaging, pada tahun 2020 sebanyak 2.489.800 ekor, dan pada tahun 2021 naik menjadi sebanyak 3.268.129 ekor (naik 31,26%). Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya daya beli masyarakat. Sedangkan produksi peternakan Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.54.

Tabel 3.54.
Produksi Susu, Daging, dan Telur Tahun 2017-2021

No	Jenis	Produksi (Lt/Kg/Butir)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Susu (Liter)	5,903,181	4,266,718	4.978.442	4.456.373	4.630.000
2	Daging Sapi Potong (Kg)	2,963,800	584,220	2.010.393	1.897.720	2.267.819
3	Telur (Butir)	570,571,719	130.992.000	154.784.416	154.567.112	123.875.702

Sumber: DKPP, Update per Januari, 2022.

Berdasarkan Tabel 3.54. sebagaimana tersebut di atas perkembangan produksi susu, daging dan telur pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dari Tahun 2020 kecuali telur, hal ini dipengaruhi oleh tingginya harga pakan ternak dan perubahan iklim mengakibatkan kematian ayam petelur. Sedangkan pada tahun 2021 produksi susu naik sebanyak 173.627 liter dibanding tahun 2020 (naik 3,90%), produksi daging naik

sebanyak 370.099 kilogram dibanding tahun 2020 (naik 19,50%), dan produksi telur turun sebanyak 30.691.410 butir dibanding tahun 2020 (turun 19,86%). Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan iklim yang berakibat tingginya tingkat kematian ayam.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran *Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah* pada tahun 2021 dilaksanakan dengan program, diantaranya:

- a. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- b. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- e. Penyuluhan Pertanian;
- f. Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- g. Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- h. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- i. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Permasalahan:

- a. Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian yang berakibat belum terwujudnya upaya penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan;
- b. Belum optimalnya penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas-varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan belum optimalnya intensifikasi dan diversifikasi hasil – hasil pangan;
- c. Tingginya tingkat penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (*back to nature*);
- d. Belum optimalnya kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) terhadap produk – produk pangan unggulan Kabupaten Klaten;
- e. Belum berkembangnya diversifikasi pangan;



- f. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pekarangan rumah menuju kawasan rumah pangan lestari.
- g. Belum tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan;
- h. Belum optimalnya sinergitas antara program-program Pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani;
- i. Belum terciptanya sinergitas antar Satuan Kerja (Satker) dalam melakukan koordinasi terpadu dalam upaya mengoptimalkan urusan ketahanan pangan;
- j. Belum beragam tingkat konsumsi pangan; dan
- k. Menurunnya produktivitas perikanan.

Solusi :

- a. Peningkatan penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian untuk mewujudkan penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan;
- b. Peningkatan penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas-varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan peningkatan intensifikasi dan diversifikasi hasil – hasil pangan;
- c. Menekan penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (back to nature);
- d. Penguatan kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (intellectual property right) terhadap produk – produk pangan unggulan Kabupaten Klaten; dan
- e. Penciptaan sinergitas antara program – program Pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani.



24 Sasaran Meningkatkan Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan;



Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan terdepan memerlukan peningkatan standar pelayanan dalam hal: pemberdayaan masyarakat, menjaga adat-istiadat, serta melayani kebutuhan administrasi penduduk. Upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam Penanggulangan Kemiskinan dengan melakukan peningkatan partisipasi, dan penyempurnaan regulasi tentang desa.

Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel. Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan disajikan pada Tabel 3.55.

Tabel 3.55.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatkan Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	12	39	42	58	57,69	99,47	58	99,47

Sumber: DISPERMASDES, Update per Januari 2022.

Program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian desa dan menanggulangi kemiskinan dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa. Jumlah

BUMDes dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami peningkatan karena adanya dukungan dana desa dan komitmen Pemerintah Desa, peningkatan mulai terlihat pada tahun 2017 ketika dana desa mulai diberikan kepada Pemerintah Desa serta ditunjang dengan adanya komitmen dari Pemerintah Desa yang tinggi. Tahun 2021 jumlah BUMDes sebanyak 389 di Kabupaten Klaten.

Guna pengembangan dan optimalisasi pengelolaan BUMDes maka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan pendampingan kepada pengelola BUMDes dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Perkembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.56.

Tabel 3.56.
Lembaga Ekonomi Pedesaan

Tahun	Jumlah BUMDes	Jumlah Pasar Desa	Pasar Desa Dikelola Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	156	41	3
2018	246	41	3
2019	300	41	3
2020	357	41	41
2021	389	41	41

Sumber: DISPERMASDES, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.56. sebagaimana tersebut di atas, Lembaga ekonomi pedesaan lainnya (Pasar Desa) juga dituntut dapat memberikan kontribusi positif di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Peran pasar desa belum maksimal karena otoritas manajemen pengelolaan pasar desa belum diberikan sepenuhnya kepada Desa dan masih dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu adanya komunikasi dari pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, lebih lanjut diharapkan adanya keberpihakan terhadap APBDes dalam rangka pengembangan Pasar Desa.

Pelatihan teknologi tepat guna di pedesaan dari kurun waktu tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.57.



Tabel. 3.57.

Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jenis Pelatihan TTG yang telah diberikan	1. Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Bawukan peserta dari Desa Bawukan dan Desa Panggang Kecamatan Kemalang 2. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Gunung Gajah peserta dari Desa Kebon dan Desa Gununggajah, Bayat 3. Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Sidowayah peserta dari Desa Sidowayah dan Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo	1. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Solodiran, Kec Manisrenggo 2. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Kranggan, Kec Manisrenggo 3. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Taskombang, Kec Manisrenggo 4. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Nangsri, Kec Manisrenggo	1. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Jurangjero, Kec. Karanganom 2. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Karang, Kec. Karanganom 3. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Karanganom, Kec. Karanganom 4. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Jungkare, Kec. Karanganom 5. Pelatihan pertanian hidroponik di desa Kahuman, Kec. Ngawen	Karena refokusing tidak ada kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna.	Pelatihan TTG berbasis sumber alam desa menuju ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi berbasis pengelolaan sampah ds. Kranggan Kec. Polanharjo.
2.	Data Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1. Posyantek Kec. Karanganom (Keputusan Bupati Klaten No.	1. Posyantek antar desa TA 2018 di Kec. Cawas, Kec. Wedi	1. Posyantek antar desa Kec. Manisrenggo 2. Posyantek antar desa Kec. Trucuk		

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	(TTG) dipedesaan	414.4/213 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Karanganyom Kab. Klaten) 2. Posyantek Kec. Polanharjo (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/214 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Polanharjo Kab. Klaten)				

Sumber: DISPERMASDES, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.57. sebagaimana tersebut di atas, mekanisme penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Klaten diawali dengan sosialisasi kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten (26 Kecamatan), kemudian proses pembentukan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipilih pada kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dengan program, diantaranya:

1. Administrasi Pemerintahan Desa; dan
2. Peningkatan Kerjasama.

Permasalahan:

1. Masih rendah desa yang memanfaatkan peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG; dan




2. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur desa, untuk memanfaatkan peluang pengembangan teknologi informasi.

Solusi :

1. Percepatan penggunaan Dana Desa yang berorientasi untuk pengembangan LEM, LED dan pengembangan potensi TTG; dan
2. Peningkatan kapasitas SD aparatur desa untuk memanfaatkan era digital bagi pengembangan desa.

25. Sasaran Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata;



Sektor pariwisata merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mendorong sektor pariwisata untuk mengembangkan produktifitas, dan nilai tambah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Adapun capaian Sasaran: [Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata](#) sebagaimana Tabel 3.58.

Tabel 3.58.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	5	31,96	-55,88	25	3,22	12,87	100	3,22

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update per Januari 2022.



Berdasarkan Tabel 3.58. sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa kontribusi kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2020 sebanyak Rp.8.530.240.214,- dan pada tahun 2021 menjadi sebanyak Rp.8.804.783.428,- (atau naik sebanyak 3,22%). Namun belum memenuhi target, karena masih dalam kondisi pandemi.

Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata, selama ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mendorong partisipasi masyarakat di bidang pariwisata dan memperbaiki regulasi kebijakan pengembangan kepariwisataan Daerah. Salah satu upaya peningkatan yang dilakukan dengan perbaikan obyek wisata dan menarik sebanyak mungkin pengunjung.

Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.59.

Tabel 3.59.

Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Obyek Wisata (obyek)	Pengunjung (orang)		Lama Tinggal (hari)		Rata-rata Pengeluaran (Rp.000)	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2017	82	2.224.294	190.686	1	1	1.000	2.000
2018	82	2.483.945	222.373	1	1	1.000	2.000
2019	82	3.884.024	183.559	1	1	1.000	2.000
2020	82	1.399.167	22.199	1	1	900	1.500
2021	82	Na	Na	1	1	Na	Na

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.59. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2020 untuk wisatawan nusantara sebanyak 1.399.167, sedangkan untuk wisatawan mancanegara sebanyak 22.199. Tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan tahun 2020 karena hal ini disebabkan masih masa pandemic covid-19. Kunjungan wisata didominasi oleh wisatawan nusantara pada beberapa perayaan seperti Maleman, Syawalan dan Yaqowiyu, sedangkan wisatawan mancanegara relatif lebih sedikit karena wisatawan mancanegara lebih banyak berkunjung ke Candi Prambanan.



Sedangkan di sisi lain lama tinggal wisatawan Nusantara rata-rata hanya satu hari dan untuk wisatawan mancanegara rata-rata hanya 0,75 hari. Hal ini disebabkan kebanyakan para wisatawan, baik Nusantara maupun mancanegara hanya sekedar berkunjung di tempat obyek wisata saja dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta. Demikian juga dengan rata-rata pengeluaran relatif belum begitu besar, untuk wisatawan Nusantara hanya berkisar antara Rp. 350.000,- sampai Rp.1.000.000,- dan wisatawan mancanegara berkisar Rp.500.000,- sampai Rp.2.000.000,- Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.60.

Tabel 3.60.
Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD
Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD total (%)	1,86	2,19	4,03	2,59	2,93
Total PAD	371.718.439.304	395.884.244.135	311.648.401.655	329.963.261.898	300.013.085.037
PAD Sektor Pariwisata	6.895.508.782	8.668.908.216	12.569.036.829	8.530.240.214	8.804.783.428
Pajak	5.640.335.782	7.454.495.216	10.184.639.829	7.478.277.694	7.967.183.669
Pajak Hotel	1.034.439.307	1.114.743.863	1.330.988.059	730.525.400	889.869.463
Hotel Bintang 3	822.003.046	871.100.135	1.020.244.671	587.067.925	762.651.635
Hotel Melati/Motel	212.436.261	243.643.728	310.743.388	143.457.475	127.217.828
Pajak Restoran	3.648.921.191	5.385.531.695	7.121.660.015	6.270.989.397	6.786.815.356
Rumah Makan	1.468.255.029	1.838.547.695	2.073.823.349	1.916.032.221	2.777.678.048
Catering	2.180.666.162	3.546.984.000	5.047.836.666	4.354.957.176	4.009.137.308
Pajak Hiburan	956.975.284	954.219.658	1.731.991.755	476.762.897	290.498.850
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	432.257.534	206.144.658	318.541.880	19.419.537	23.754.600
Permainan Ketangkasan	225.203.750	224.998.625	550.467.500	222.192.310	145.883.750
Pajak Hiburan/Pertandingan Olahraga	299.514.000	523.076.375	862.982.375	235.151.050	108.790.500
Pajak Panti Pijat,Spa,Fitnes Center					12.070.000
Retribusi	1.255.173.000	1.214.413.000	2.384.397.000	1.051.962.520	837.599.759
Retribusi Objek Wisata	1.255.173.000	1.214.413.000	2.384.397.000	1.051.962.520	837.599.759

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update per Januari 2022

Berdasarkan Tabel 3.60. sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2020 sebanyak Rp.8.530.240.214,- dan pada tahun 2021 menjadi sebanyak Rp.8.804.783.428,- (atau naik sebanyak 3,22%).

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat antara lain dari produk wisata. Produk pariwisata di Kabupaten Klaten mencakup:

A. Jenis Kekayaan Wisata Alam

Kabupaten Klaten mempunyai banyak wisata alam maupun wisata buatan. Nama dan jenis obyek wisata serta lokasinya di Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 3.61.

Tabel 3.61.
Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya
di Kabupaten Klaten Tahun 2021

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Perayaan Padusan	Event Tradisional	Kec. Tulung Kab.Klaten
02.	Perayaan Maleman	Event Tradisional	Kec. Klaten Utara
03.	Perayaan Syawalan	Event Tradisional	Kec. Bayat dan Kec. Kalikotes
04.	Perayaan Yaqowiyu	Event Tradisional	Kec. Jatinom
05.	Deles Indah	Wisata Alam	Kec. Kemalang
06.	Sumber Air Ingas (OMAC)	Wisata Alam	Kec. Tulung Kab.Klaten
07.	Makam Sunan Pandanaran	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Bayat
08.	Jombor Permai	Wisata Alam	Kec. Bayat
09.	Makam R.Ng Ronggowarsito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Trucuk
10.	Makam Ki Ageng Perwito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Wonosari
11.	Pemandian Jolotundo	Wisata Alam	Kec. Karanganyam
12.	Candi Plaosan, Sojiwan, Sewu dan Candi Bubrah	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Prambanan
13.	Makam Ki Agen Gribig	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Jatinom
14.	Sendang Sinongko	Wisata Alam	Kec. Ceper
15.	Umbul Ponggok, Nganten, Sibirak dan Umbul Nilo	Wisata Air dan Snarkling	Kec. Polanharjo
16.	Umbul Pelem	Wisata Air	Kec. Tulung
17.	Umbul Susuhan	Wisata Air	Kec. Ngawen
18.	Umbul Brintik, Brondong, Geneng dan Umbul Pluneng	Wisata Air	Kec. Kebonarum
19.	Desa Wisata Bugisan	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Prambanan



No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
20.	Desa Wisata Nganjat	Wisata Air dan Perikanan Nila	Kec. Polanharjo
21.	Desa Wisata Janti	Pemancingan	Kec. Polanharjo
22.	Desa Wisata Sidowayah	Wisata Air, Outbond, Kampung Dolanan dan Oase	Kec. Polanharjo
23.	Desa Wisata Soropaten	Wisata Budaya	Kec. Karanganom
24.	Desa Wisata Beku	Wisata Air dan Outbond	Kec. Karanganom
25.	Desa Wisata Kebondalem Kidul	Wisata Budaya, Sejarah dan Industri	Kec. Prambanan
26.	Desa Wisata Soran-Duwet	Wisata Budaya dan Outbond	Kec. Ngawen
27.	Desa Wisata Jarum	Wisata Budaya dan Kerajinan Batik	Kec. Bayat
28.	Desa Wisata Krakitan	Wisata Religi dan Alam	Kec. Bayat
30.	Desa Wisata Paseban	Wisata Religi, Budaya dan Industri	Kec. Bayat
31.	Desa Wisata Gunung Gajah	Wisata Alam	Kec. Bayat
32.	Desa Wisata Jotangan	Wisata Alam	Kec. Bayat
33.	Desa Wisata Demak Ijo	Wisata Budaya dan Kerajinan	Kec. Karangnongko
34.	Desa Wisata Karangnongko	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Karangnongko
35.	Desa Wisata Balerante	Wisata Alam dan Air	Kec. Kemalang
36.	Desa Wisata Sidorejo	Wisata Alam dan Agro	Kec. Kemalang
37.	Desa Wisata Tegalmulyo	Wisata Alam, Outbond dan Embung	Kec. Kemalang
38.	Desa Wisata Nglinggi	Wisata Pemancingan dan Kuliner	Kec. Klaten Selatan
39.	Desa Wisata Mlese dan Tlising	Industri Lurik	Kec. Cawas
40.	Desa Wisata Melikan	Wisata Budaya dan Kerajinan Keramik	Kec. Wedi
41.	UmbulTirtomulyani&TirtoMulyono	Alam	Kec. Kebonarum
42.	WatuPrahur Bukit Cinta	Alam	Kec. Bayat
43.	WatuSepur	Alam	Kec. Bayat
44.	Bukit Petrum	Alam	Kec. Bayat
45.	Puncak Arjuna	Alam	Kec. Bayat
46.	Kedungan Waterpark	Buatan	Kec. Pedan
47.	Tirtonirmolo	Buatan	Kec. Prambanan
48.	Museum Gula Jawa Tengah	Buatan	Kec. Jogonalan
49.	Candi Merak	Budaya	Kec. Karangnongko
50.	Candi Sojiwan	Budaya	Kec. Prambanan
51.	Kolam Renang Tirta Pelangi	Buatan	Kec. Bayat
52.	Kolam Renang Tirta Indah	Buatan	Kec. Klaten Selatan
53.	Kolam Renang Tirta Harapan	Buatan	Kec. Klaten Utara
54.	Desa Wisata Glagah	Edukasi	Kec. Jatinom



No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
55	Wisata Hidroponik	Edukasi	Kec. Kemalang
56	Kalitalang	Alam	Kec. Kalitalang
57	Banyu Beku	Alam	Kec. Polanharjo
58	Water Gong	Alam	Kec. Polanharjo
59	Ponggok Ciblon	Buatan	Kec. Polanharjo
60	Susur Kali Pusuur	Alam	Kec. Tulung
61	Tugu Waseso Soropaten	Budaya	Kec. Polanharjo
62	Taman Celosia Tlogo Nursery	Buatan	Kec. Prambanan
63	Umbul Gedaren	Alam	Kec. Jatinom
64	Umbul Manten	Alam	Kec. Tulung
65	Umbul Brondong	Alam	Kec. Kebonarum
66	Omah Wayang	Budaya	Kec. Klaten Selatan

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.61 sebagaimana tersebut di atas, jumlah Obyek Wisata (OW) di Kabupaten Klaten sebanyak 66 (enam puluh enam) OW, dan tersebar di beberapa kecamatan, serta jenis wisatanyapun sangat beragam. Sehingga potensi ini perlu dijaga dan dikembangkan untuk meningkatkan daya saing daerah.

B. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Asu (Sona), Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Candi Sewu, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Makam Syech Domba, Makam Syeh Kewel, Makam Ki Ageng Gribig, Makam R Ng. Ronggowarsito, Situs Kaliworo, dan Situs Wonoboyo, Makam Sunan Pandanaran, dan Makam Kyai Mlati.

C. Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya: Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, Goa Jepang dan Pesanggrahan Pakubuwu di Deles.

Permasalahan :

- Belum optimalnya pengembangan pemasaran pariwisata;
- Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata;



- c. Belum optimalnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepariwisataan; dan
- d. Masih terbatasnya penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

Solusi :

Peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

26. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM;



Sektor perdagangan, koperasi dan UKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Upaya yang dilakukan untuk: **Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UMKM** diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan perdagangan, koperasi dan UMKM.

Adapun capaian Sasaran: **Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UMKM** sebagaimana Tabel 3.62.

Tabel 3.62.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya
Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan
Perdagangan, Koperasi dan UMKM

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB*)	18,74	19,98	19,98	19,38	19,98	103,10	19,38	103,10
2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	5	11,45	11,8	15	12	80	15	80

Sumber: DKUKMP, Update per Januari 2022.

Catatan: *) angka sementara menggunakan tahun 2020

1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Pada tahun 2021 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB belum rilis, sehingga masih data tahun 2020. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ini ditunjang adanya pengembangan dan pemberdayaan UKM melalui pola kluster dan penetapan Produk Unggulan Daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta dapat menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan sektor dan sub sektor lainnya.

Disamping itu, tumbuhnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ditunjang adanya peningkatan nilai investasi PMDN sebanyak Rp.189.278.100.000,- dan PMA sebanyak 1.952.800 US\$, serta nilai ekspor dari 44.969.878,96 US\$ pada tahun 2019, menjadi 448.740.170,03 US\$. Pada tahun 2020 tercatat nilai investasi PMDN sebanyak Rp.698.896.464.253,- dan PMA sebanyak 66.100.000.000 US\$, serta adanya peningkatan ekspor dari 82.128.854,76 US\$. (sampai November 2020). Sedangkan pada tahun 2021 tercatat nilai investasi PMDN sebanyak Rp,1.377.467.139.785,- dan PMA sebanyak Rp.277,129.545.937,- US\$.



2. Persentase UMKM yang Memiliki Daya Saing

Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 55.100 UMKM, namun dari sebanyak 55.100 UMKM tersebut yang memiliki keunggulan daya saing produk kompetitif baru sebanyak 6.500 UMKM (atau 11,8%). Sedangkan pada 2021 tercatat sebanyak 55.500 UMKM, dan yang memiliki keunggulan daya saing produk kompetitif baru sebanyak 6.660 UMKM (atau 12%).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatkan Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UMKM diantaranya dengan program:

1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
2. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
4. Pengembangan Ekspor;
5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
6. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Permasalahan :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
- d. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten;
- e. Belum optimalnya penataan dan pemberdayaan PKL;
- f. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif
- g. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya;
- h. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk; dan
- i. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.



Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- d. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
- e. Mengupayakan legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten; dan
- f. Penataan dan pemberdayaan PKL.

27. Sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah;



Penerapan inovasi dalam pembangunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Adapun capaian Sasaran: [Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah](#) sebagaimana Tabel 3.63.

Tabel 3.63.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase inovasi yang diterapkan	31,82	105	85	100	85,3	85,3	100	85,3

Sumber: BAPPEDALITBANG, Update per Januari 2022.

Inovasi Pembangunan Daerah merupakan upaya untuk mengakselerasi pencapaian-pencapaian pembangunan daerah dan pengembangan Daerah. Inovasi ini didorong munculnya pola pikir yang inovatif menjadi pijakan bagi kerangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Pada tahun 2021 jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan sebanyak 29 kebijakan dari jumlah inovasi yang diusulkan sebanyak 34 atau sebesar 85,3%. Gambaran inovasi-inovasi yang telah dilakukan dan terus dikembangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel. 3.64.

Tabel 3.64.
Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TITIP BANDAKU	Penyelamatan Arsip Daerah rawan bencana yang berbentuk data digital dan digital baik perorangan maupun lembaga	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten
2	SIMBAT (Sistem Informasi Manajemen Obat)	Sistem Informasi Management Obat Puskesmas digunakan untuk mempermudah penatausahaan persediaan obat di Puskesmas	Dinas Kesehatan
3	SIMPUS GIZKIA	Aplikasi di 34 puskesmas untuk pencatatan dan pelaporan data-data pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak	Dinas Kesehatan
4	SIMPUS	Aplikasi di 34 puskesmas untuk manajemen pelayanan kesehatan dari pendaftaran sampai penerimaan obat	Puskesmas



No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Matur Dokter	<p>Merupakan Inovasi untuk kemudahan akses masyarakat dalam kesehatan, mendapat layanan respon cepat terutama masalah gawat darurat kesehatan melalui aplikasi di android secara gratis. Matur Dokter merupakan kegiatan pengembangan dari PSC 119, Program Ini telah di <i>launching</i> pada Desember 2019.</p> <p>Jenis-jenis layanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gawat Darurat Kesehatan 24 jam 2. Konsultasi kesehatan 3. Info Sehat 4. Tips Kesehatan 5. Berita Sehat 6. Forum Sehat 7. Informasi Kamar Tidur Kosong di RS 8. Pelayanan Ambulance <p>Pelaksana Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Matur Dokter Dinas Kesehatan Kab. Klaten 2. Tim Matur Dokter 34 Puskesmas Kabupaten Klaten <p>Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 15 Ambulance Matur Dokter (2 di Dinkes, 13 di Puskesmas) ◆ 3 Motor Matur Dokter ◆ Aplikasi Matur Dokter dan Aplikasi khusus driver ambulance ◆ Perangkat HT di Dinas Kesehatan dan 34 Puskesmas <p>1. Aplikasi Matur Dokter: Diunduh dari Play Store Handphone Android</p> <p>2. whatsapp : 0822 60000 910 3. Telepon : 0822 60000 910 (0272 3391 330)</p> <p>Email : maturdokter@gmail.com Instagram: maturdokterkabklaten facebook : maturdokterkabklaten Twitter : maturdokterkabklaten</p>	Dinas Kesehatan



No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Apik (Ayo Piknik ke Klaten)	Sebuah aplikasi yang berbasis Internet yang menyajikan Obyek wisata, Kebudayaan dan Olahraga yang berada di Kabupaten Klaten yang menyajikan juga Informasi pendukung yang berkaitan dengan Obyek wisata tersebut	Disparbudpora
7	Aplikasi e-Awas Om (Eling Waspada Omo Penyakit) diganti Matur Tani	Aplikasi yang berbasis android untuk memudahkan masyarakat/ petani di Kab. Klaten dalam memperoleh informasi mengenai OPT dan cara pengendalian berdasar prinsip PHT (pengendalian hama terpadu)	DPKPP
8		Alat Pemanen Air Hujan Alat yang berfungsi menampung air hujan yang bisa dimanfaatkan sebagai cadangan air pada saat musim kemarau	DLHK
9	BIOGAS	Alat pengolah sampah organik menjadi biogas yang bisa dimanfaatkan sebagai energi gas	DLHK
10	BIOPORI	Lubang lubang di sekitar lingkungan kantor yang berfungsi menyerap air hujan agar kembali ke tanah sekitar sekaligus berfungsi sebagai tempat pembuatan kompos skala kecil	DLHK
11	sistaru.klatenkab.go.id	Sistem pelayanan informasi tata ruang yang berbasis online yang bisa diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mendapatkan informasi tentang tata ruang sesuai Perda Kabupaten Klaten nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabuapten Klaten Tahun 2011-2031	DPUPR
12	Buku Matur Jujur	pembentukan budaya baru dengan cara berbeda, yang dilakukan melalui pendidikan karakter di semua pusat pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat), dengan sekolah sebagai lokomotif. Sebagai penghubung tri pusat pendidikan, dibutuhkan sarana yang mudah, murah, fleksibel, dengan anak difasilitasi media berani menulis/ mengungkapkan dengan "matur jujur" terhadap apa yang dilihat, dilakukan/dikerja	Dinas Pendidikan



No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)
13	KARSA TANDING (KERJASAMA IMPLEMENTASI RUMAH SAKIT TANPA DINDING)	Model Pelaksanaan Promosi kesehatan melalui kerja sama stakeholder, mempercepat layanan informasi dan promosi, terjalannya komunikasi dan kerjasama antara rumah sakit dan mitra fasilitas kesehatan, dan menunjukkan kehadiran pemerintah dalam pembangunan kesehatan	RSD Bagas Waras Klaten
14	SI KREEASI (SISTEM KEUANGAN RUMAH SAKIT YANG EFISIEN, EFEKTIF, AKUNTABEL DAN TERINTEGRASI)	Menyajikan data pendapatan Rumah Sakit Bagas Waras Kab. Klaten dengan cepat sehingga dapat diketahui secara cepat kondisi keuangan yang aman	RSD Bagas Waras Klaten
15	ANJUNGAN MANDIRI ANTRIAN POLIKLINIK	Antrian pasien menuju ke poliklinik dengan tujuan agar pasien tertib dalam mengantri sehingga pasien datang awal mendapat pelayanan	RSD Bagas Waras Klaten
16	SISTEM ANTRIAN FARMASI	Waktu tunggu dalam kefarmasian yang bertujuan untuk mengetahui waktu pasien dalam menunggu racikan obat	RSD Bagas Waras Klaten
17	Aplikasi SAPA (SMS layanan Kepegawaian)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui Status usulan Karpeg, Karis, Karsu, Ijin belajar, Ijin Penggunaan gelar; 2. Pemberitahuan Kepada PNS yang akan memasuki BUP dan pemberitahuan usulan pensiun sudah dalam proses; 3. Pemberitahuan yang sifatnya segera yang berkaitan dengan kegiatan BKPPD 	BKPPD
18	Aplikasi SIAP (sistem informasi Anjungan Layanan Kepegawaian)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas layanan kepegawaian ; 2. Memenuhi kebutuhan informasi standar tentang kepegawaian tanpa harus bertatap muka langsung dengan petugas (cek layanan kepegawaian spt: Karis, Karsu, ijin gelar, ijin belajar, informasi kepegawaian, Statistisk kepegawaian, Cek data PNS, Cek surat. 	BKPPD
19	Mutasi masuk PNS dengan Tes CAT (<i>Computer Assisted Test</i>)	Untuk menghilangkan parktek pungutan dalam mutasi masuk	BKPPD



No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)
20	Penyelesaian Surat	Keputusan Pensiun PNS Pemberitahuan dini PNS yang akan Pensiun dan penyampaian SK pensiun langsung ke alamat PNS yang pensiun	BKPPD
21	Aplikasi BOS	Sistem Pengelolaan Dana Bos berbasis IT Yang Terintegrasi Dengan data Keuangan Daerah	BPKD
22	APL. SENSUS	verifikasi data sensus yang dulu dilakukan secara manual dan makan banyak waktu, sekarang sdh bisa dilakukan dengan lebih cepat dan meminimalisir kesalahan dalam penginputan data sensus.	BPKD
23	SIDIA	Pencocokan dan penghitungan stok opname persediaan yang dulu dilakukan secara manual sekarang sudah menggunakan aplikasi sehingga laoran persediaan lebih akurat.	BPKD
24	APL.REKONSILIASI	Aplikasi untuk rekonsiliasi Aset Daerah yang dahulu masih dilakukan secara manual sekarang sudah menggunakan aplikasi, sehingga mempermudah dan mempercepat rekonsiliasi aset serta laporan lebih akurat	BPKD
25	e-PBB (pbb.klatenkab.go.id)	Aplikasi Untuk mengetahui berapa besaran pajak PBB yang harus di bayar oleh Wajib Pajak secara Online dengan internet (<i>Cloud System</i>) caranya cukup memasukkan NOP PBB	BPKD
26	e-BPHTB (bphtb.klatenkab.go.id)	Aplikasi Untuk mengetahui informasi BPHTB secara Online	BPKD
27	Pajak Online Penambahan	Loket pembayaran PBB-P2 yang semula baru bisa lewat Bank Jateng dan Bumdes, di tahun 2019 sudah bisa melalui Tokopedia, Indomaret dan Go Pay	BPKD
28	NAS BPKD NAS	<i>Network Attached Storage</i> yaitu sebuah piranti penyimpanan data dengan sistem operasi yang di khususkan untuk melayani kebutuhan backup dan share data. NAS dapat di akses langsung melalui jaringan dengan protokol seperti TCP/IP	BPKD



No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)
29	Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)	<p>Program untuk membantu akses permodalan bagi usaha mikro kepada lembaga jasa keuangan dengan mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah Kabupaten Klaten. Usaha mikro yang layak menerima bantuan subsidi bunga harus dimiliki penduduk Kab. Klaten yang berdomisili dan menjalankan usahanya di Kab. Klaten, wajib tercantum dalam data base Disdagkop UKM Kab. Klaten, memiliki Ijin Usaha Mikro (IUM) yang diterbitkan kecamatan setempat, usaha yang dijalankan merupakan usaha rintisan atau dalam upaya pengembangan usaha ekonomi produktif. Wirausaha baru dapat mengakses pinjaman sepanjang telah mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Plafon pinjaman maksimal Rp. 25 Juta untuk perorangan serta tidak untuk tujuan konsumtif. Pemberian subsidi bunga sebesar 80% dari bunga kredit per bulan dalam Tahun Anggaran 2019. Prosentase tersebut dihitung dari bunga pinjaman yang berlaku pada Bank Penyalur. Lembaga jasa keuangan penyalur yang ditunjuk untuk menyalurkan program subsidi bunga kepada usaha mikro tahun 2019 adalah PD BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dan PD BPR BKK Tulung (Perseroda) Kabupaten Klaten. Alokasi dana untuk program ini di tahun 2019 sebesar Rp. 2 M (Dua milyar rupiah) dengan perincian Rp. 1,5 M melalui PD BPR Bank Klaten dan Rp. 500 Juta melalui PD BPR BKK Tulung.</p>	Bag. Perekonomian



No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)
30	SMARD ON LINE	Pelayanan OnLine Disdukcapil ke Desadesa meliputi : Udate Data, Pembetulan Data, Akta Kelahiran OnLine, Akta Kematian On Line Disdukcapil 31 PELAUT BALA Memberikan Pelayanan kepada kaum Divabel, Disabilitas, dan Berkebutuhan Khusus	Disdukcapil
31	BUAH HATI	Memberikan Pelayanan kepada masyarakat tentang Akta Kelahiran secara Online lewat Program SIAK	Disdukcapil
32	Padi Rojolele Srinar dan Srinuk	Lolos 2 Varietas Padi Unggul (Rojolele Srinuk & Rojolele Srinar) Tahun 2019 Tingkat Nasional	Bappedalitbang

Sumber: BAPPEDALITBANG, Update per Januari 2022.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran inovasi yang diterapkan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis inovasi yang diterapkan dengan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan program lainnya.

Permasalahan :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk inovasi serta kurang berkembangnya kerjasama inovasi Daerah; dan
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan produk inovasi Daerah.

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk inovasi Daerah dengan membuka kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan produk inovasi Daerah.



28. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal;



Sektor penanaman modal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Upaya yang dilakukan untuk: **Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal** diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan penanaman modal.

Adapun capaian Sasaran: **Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal** sebagaimana Tabel 3.65.

Tabel 3.65.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):								
	PMDN	189	19	3	483	8	1,66	2.433	0,34
	PMA	46	139	12	294	231	78,57	1.764	13,10
2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):								
	PMDN	1,75	733	-79	2,50	97	3880,00	12,74	761,38
	PMA	2,25	272	-59	2,55	319	12509,80	14.70	2170,07

Sumber: DPMPTSP, Update per Januari 2022.

Kondisi perkembangan perekonomian Kabupaten Klaten diukur dari berbagai variabel makro seperti PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi. Kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sangat mempengaruhi kondisi perkembangan perekonomian, dan sebagai gambaran perkembangan jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021, disajikan pada Tabel 3.66.

Tabel 3.66.
Jumlah Investasi PMA dan PMDN
Tahun 2017-2021

Tahun	Penanaman Modal Asing				Penanaman Modal Dalam Negeri		
	Nilai Investasi (US\$)	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Kenaikan / Penurunan (%)	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Kenaikan / Penurunan (%)
2017	10.257.000	138.469.500.000	43	61	247.327.500.000	41	68
2018	3.091.400	41.211.500.000	39	-70	229.788.500.000	67	27
2019	11.490.893	160.872.497.498	15	272	1.914.915.766.292	870	733
2020	4.721.429	66.100.000.000	5	-59	698.896.464.253	4743	-64
2021	19.794.968	277.129.545.937	18	419	1.377.467.139.785	3984	97

Sumber: DPMPTSP, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.66. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah nilai investasi PMDN maupun PMA selama tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif, pada tahun 2020 nilai investasi PMA sebesar 4.721.429 US\$, tahun 2021 naik menjadi sebesar 19.794.968 US\$ (atau naik 419%). Begitu juga pada tahun 2020 nilai investasi PMDN sebesar Rp. 698.896.464.253,- pada tahun 2021 naik menjadi Rp. 1.377.467.139.785,- (atau naik 97%). Hal ini disebabkan oleh iklim usaha yang kondusif, fasilitas dan infrastruktur investasi yang memadai, ketersediaan tenaga kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal/investasi. Penanaman modal/investasi tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.67.



Tabel 3.67.
Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	PMDN				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	41	67	870	4743	3.984
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	2.781	1.793	16.772	12.980	32.845
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	Rp.	247.327.200	229.788.500	1.914.915.766	698.896.464	1.377.467.139.785

Sumber: DPMPTSP, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.67 sebagaimana tersebut di atas, realisasi perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten tahun 2020 nilai investasi sebesar 698.896.464.000 dan tahun 2021 nilai investasi sebesar 1.377.467.139.785.000.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Jumlah investasi PMA di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Perkembangan PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.68.

Tabel 3.68.
Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	PMA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	43	39	15	5	18
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	79	561	2.087	59	4153
3	Nilai Investasi	(US \$)	10.257.000	3.091.400	11.490.893	4.721.429	19.794.968

Sumber: DPMPTSP, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.68. sebagaimana tersebut di atas, realisasi perkembangan PMA di Kabupaten Klaten tahun 2020 nilai investasi sebesar 4.721.429 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 19.794.968.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran; *Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal* didukung dengan program:



1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Promosi Penanaman Modal;
4. Pelayanan Penanaman Modal;
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Permasalahan :

1. Kurangnya informasi terkait potensi investasi; dan
2. Tingginya harga tanah untuk pengembangan dan penanaman investasi.

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional; dan
- b. Mengupayakan pemanfaatan lahan kritis sebagai lokasi investasi, dan Pemerintah daerah wajib menyediakan infrastruktur penunjang.

29. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas, dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan;



Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian serius dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan Pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Adapun capaian sasaran: Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas, dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan disajikan pada Tabel 3.69.

Tabel 3.69.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Rasio penduduk yang bekerja	0,97	1	0,96	1,08	0,76	70,37	1,08	70,37
2	Angka partisipasi angkatan kerja	87,79	81	98,79	69	86,94	126,00	69	126,00

Sumber: DISPERNAKER, Update per Januari 2022.

1. Rasio Penduduk yang Bekerja

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja sebanyak 639.217 jiwa dan yang bekerja sebesar 616.528 orang, dan rasio penduduk yang bekerja sebanyak 0,96 %. Sedangkan pada tahun 2021 menjadi jumlah angkatan kerja sebanyak 918,244 jiwa dan yang bekerja sebesar 699.520 orang, dan rasio penduduk yang bekerja sebanyak 0,76%

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2020 sebesar 98,79%, dan pada tahun 2021 sebesar 86,94% (atau turun 11,85%). Sehingga masalah angkatan kerja yang perlu mendapat perhatian besar adalah soal penyerapan kerja. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro.



Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari sasaran Meningkatkan dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan dengan dukungan program:

- 1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Perencanaan Tenaga Kerja;
- 3) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 4) Penempatan Tenaga Kerja; dan
- 5) Hubungan Industrial.

Permasalahan:

- a. Terbatasnya kesempatan kerja yang disebabkan oleh: (i) ketidakseimbangan antara kesempatan kerja yang ada dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan; dan (ii) Penyerapan angkatan kerja yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah;
- b. Peluang kerja belum bisa menampung kebutuhan pencari pekerjaan;
- c. Hambatan budaya (feodalisme), masyarakat cenderung kepada pekerjaan kantoran (pegawai negeri, dll) sebagai pekerjaan prestisius, sehingga mematikan kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan;
- d. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
- e. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang diakibatkan angkatan kerja baru, tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia;
- f. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok-kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
- g. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;



- h. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja;
- i. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja;
- j. Belum tersedianya database ketenagakerjaan.

Solusi :

- a. Membuka peluang kerja seluas-luasnya untuk menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan;
- b. Menghilangkan hambatan budaya (feodalisme), bahwa semua lapangan kerja adalah pekerjaan prestisius, sehingga akan membuka ruang kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
- d. Mengoptimalkan pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok–kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
- e. Mengoptimalkan pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja.
- f. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak–hak pekerja;
- g. Mengoptimalkan proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja; dan
- h. Merintis database ketenagakerjaan secara *online*.



30. Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan;



Perlindungan tenaga kerja sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro. Tidak saja memberi rasa nyaman bagi pekerja, tetapi juga menjaga ketahanan daerah. Sehingga perlunya perlindungan tenaga kerja akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan** disajikan pada Tabel 3.70.

Tabel 3.70.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%) (10)=(7)/(9)*100
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	86,81	71,48	91,6	88,2	59,91	67,93	25,5	231,76

Sumber: DISPERNAKER, Update per 2022.

Berdasarkan Tabel 3.70, sebagaimana tersebut di atas pada tahun 2020 jumlah peserta Program BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 51.892 peserta dan jumlah pekerja atau buruh sebanyak 120.343 orang atau sebesar 43,12%. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah peserta BPJS menjadi sebanyak 74.273 peserta dan jumlah pekerja atau buruh 123.979 orang atau sebesar 59,91%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari sasaran **Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan** didukung dengan program:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Perencanaan Tenaga Kerja;
3. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Penempatan Tenaga Kerja; dan
5. Hubungan Industrial.

Permasalahan:

1. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja;
2. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja;
3. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok-kelompok pekerja/buruh melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
4. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;

Solusi :

- a. Menghilangkan hambatan budaya (feodalisme), bahwa semua lapangan kerja adalah pekerjaan prestisius, sehingga akan membuka ruang kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan dan wajib difasilitasi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Mengoptimalkan pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok – kelompok pekerja/buruh melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif;
- c. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja; dan
- d. Mengoptimalkan proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja.

31. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian;

Sektor perindustrian merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, serta menumbuhkan daya saing daerah.

Upaya yang dilakukan untuk: **Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Industri** diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan perindustrian.

Adapun capaian Sasaran **Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Sektor Perindustrian** sebagaimana Tabel 3.71.

Tabel 3.71.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	27,55	37,00	37,00	35,2	35,2	100	35,2	100
2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	2,5	7,6	3,54	7,50	7,90	105,33	7,5	160

Sumber: DISPERNAKER, Update per Januari 2022.

1. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

Komponen pembentuk PDRB, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB pada tahun pada tahun 2020 sebesar 37,00%, sumbangan ini ditunjang dari nilai investasi sebanyak 66.100.000.000US\$. Dan nilai PMDN sebanyak Rp.698.896.464.253,-. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 35,2% ditunjang dari nilai PMA 19.794.968 US\$, dan PMDN sebanyak Rp.1.377.467.139.785,-



2. Persentase IKM yang Memiliki Daya Saing

Pada tahun 2020 jumlah IKM sebanyak 8.335 IKM dan mempunyai daya saing mencapai 3,54 %, sedangkan pada tahun 2021 jumlah IKM menjadi sebanyak 8.344 IKM dan mempunyai daya saing 7,86%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020 program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran *Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Industri* diantaranya dengan program:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan
3. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Permasalahan :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor IKM; dan
- d. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perindustrian unggulan Kabupaten Klaten;

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar; dan
- d. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha IKM.



32. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat;



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Pemerintah kabupaten/kota diwajibkan melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Sementara ini kewajiban yang harus diperhatikan terkait prasarana jalan adalah: Total panjang jalan di Kabupaten Klaten yang termasuk ke dalam kategori jalan negara 45,272 km, jalan provinsi sepanjang 34,238 km dan jalan kabupaten sepanjang 769,63 km. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan adalah aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan.

Luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 1.608 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Secara kewenangan, ada 2 (dua) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Dengan pembagian kewenangan itu, maka pengelolaan irigasi dilakukan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Klaten maupun yang bersumber dari dana desa. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Disamping itu Pemerintah kabupaten diwajibkan pula serius untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat** disajikan pada Tabel 3.72.

Tabel 3.72.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya
Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana
Dasar Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Indeks layanan infrastruktur	26,27	60,87	60,87	40,81	40,38	98,95	40,81	98,95

Sumber: DPUPR, Update per Januari 2022.

Capaian kinerja Indeks Layanan Insfrastruktur pada tahun 2021 sebesar 40,38% dan pada tahun 2020 sebesar 60,87%. Mengalami penurunan sebesar 20,49%, hal ini dikarenakan anggaran untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase *direfocusing*.

Program pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat, diantaranya:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
6. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
7. Pengembangan Permukiman;
8. Penataan Bangunan Gedung;
9. Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
10. Penyelenggaraan Jalan;
11. Pengembangan Jasa Konstruksi;

Permasalahan :

- a. Infrastruktur jalan dan jembatan banyak dalam kondisi rusak, sebagai akibat karena tonase dan kelas jalan, kurangnya pemeliharaan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan;
- b. Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;



- c. Belum optimalnya fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase);
- d. Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah;
- e. Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM; dan
- f. Belum optimalnya kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

Solusi :

- a. Peningkatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana jalan dan jembatan;
- b. Pemenuhan secara bertahap kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
- c. Optimalisasi fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase);
- d. Optimalisasi kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah;
- e. Sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) untuk mengawasi pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah secara ketat; dan
- f. Peningkatan kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.



33. Sasaran *Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan;*



Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan** disajikan pada Tabel 3.73.

Tabel 3.73.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	36,04	45,87	69,83	57,52	87,01	151,27	57,52	151,27

Sumber: DINAS PERHUBUNGAN, Update per Januari 2022.

Pencapaian indikator tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan meningkat dari tahun lalu (tahun 2020) 69,83% menjadi 87,01% pada tahun 2021. Capaian kinerja ini didukung adanya kinerja anggaran dan tingkatan efektifitas pelaksanaan kegiatan selama ini.

Pencapaian indikator tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan sebagaimana tersebut di atas, didukung jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada Tabel 3.74.



Tabel 3.74.
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)
Tahun 2017-2021

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Mobil Barang	9.622	8.878	8.591	8.072	8.018
02 Mobil Bus					
* Umum	397	384	408	391	205
<i>Bus Besar</i>	65	97	88	91	20
<i>Bus Sedang</i>	261	248	268	215	145
<i>Bus Kecil</i>	71	39	52	85	40
* Bukan Umum	105	111	117	97	332
03 Kendaraan Khusus/Alat Berat	6	10	21	7	7
Jumlah	10.527	9.383	9.137	8.567	8562

Sumber : DINAS PERHUBUNGAN, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.74. sebagaimana tersebut di atas, jumlah sarana angkutan (umum dan pribadi) pada tahun 2020 sebanyak 8.567 sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi 8.562. Data terminal angkutan penumpang umum pada tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.75.

Tabel 3.75.
Data Terminal Angkutan Penumpang Umum
Di Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Terminal	Alamat	Type	Luas
1	2	3	4	5
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	C	1950 m ²
2	Cawas	Cawas, Klaten	C	3120 m ²
3	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	C	2729 m ²
4	Buntalan	Buntalan, Klaten Tengah, Klaten	A	25840 m ²
5	Buntalan	Buntalan, Klaten Tengah, Klaten	B	8545 m ²
6	Manisrenggo	Manisrenggo, Klaten	C	1668 m ²

Sumber : DINAS PERHUBUNGAN, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.75. sebagaimana tersebut di atas, jumlah terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 6 (enam) lokasi untuk mendukung transportasi darat.



Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan, dilaksanakan dengan program:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
2. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Permasalahan:

- a. Perlengkapan Jalan Terpasang belum Optimal;
- b. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di bidang angkutan (ijin trayek, laik jalan dan angkutan galian Golongan C);
- c. Rendahnya kesadaran pemilik KBWU untuk mengujikan kendaraannya;
- d. Masih minimnya jumlah Traffic Light ATCS yang telah terkoneksi dengan *CC Room*;
- e. Belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Restribusi Daerah;
- f. Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas daerah perbatasan yang masih belum optimal; dan
- g. Ketertiban Administrasi dan Teknis di Pengujian kendaraan bermotor yang justru dikeluhkan masyarakat dan berbanding negatif terhadap retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Solusi:

Dari permasalahan yang dihadapi diatas, secara garis besar solusi terhadap permasalahan utama, diantaranya:

1. Meningkatkan tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan; dan
2. Mengoptimalkan kualitas pelayanan perhubungan.



34. Sasaran Meningkatkan Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman;



***Menghadapi** tantangan dalam rangka peningkatan prasarana dasar permukiman khususnya kawasan permukiman padat, maka harus ditempuh dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar permukiman yang ada di lingkungannya, dengan demikian sumber daya manusia di tingkat Pemerintahan desa dan kelurahan secara bertahap ditingkatkan kemampuannya, selain berkonsentrasi mengurus masalah administrasi Pemerintahan juga mampu memberdayakan masyarakat.*

Keseluruhan lahan yang ada, tidak mungkin untuk dibangun sebagai kawasan permukiman, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Klaten harus melakukan pembatasan kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan. Sementara ini tercatat sebanyak 379.404 unit rumah, dengan perincian: untuk tempat tinggal sebanyak 307.713 unit, campuran sebanyak 48.532 unit, dan bukan tempat tinggal sebanyak 23.159 unit.

Adapun capaian sasaran Meningkatkan Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman sebagaimana Tabel 3.76.

Tabel 3.76.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Indeks Kualitas
Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks kualitas perumahan dan kawasan pemukiman	57,71	53,76	74,05	74,4	74,4	100	74	100

Sumber: DISPERAKIM, Update per Januari 2022.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman** di Kabupaten Klaten yang pergerakannya relatif lambat. Hal ini disebabkan karena, 1). Penanganan air minum layak, penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak sangat tergantung pada sumber pendanaan dari APBN. Sementara itu jumlah rumah tangga 182.324 unit, 2) penanganan kawasan kumuh perkotaan, sementara ini hanya bergerak di 2 (2 desa) titik sasaran dengan cakupan luasan 34,47 Ha. 3). Penanganan RTLH hanya bergerak pada kisaran 1087 unit pertahun, padahal jumlah RTLH masih sebanyak 24.775 unit. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah Penanganan RTLH sebanyak 3.158 unit.

Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran: **Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman** terdiri dari 8 (delapan) program, diantaranya:

- a. Pengembangan Perumahan;
- b. Kawasan Permukiman;
- c. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; dan
- d. Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Permasalahan :

- a. Banyaknya rumah tidak layak huni, dan merata di setiap kecamatan;



- b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat;
- c. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
- d. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum); dan
- e. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan.

Solusi :

- a. Percepatan penanganan pembangunan rumah tidak layak huni;
- b. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum) layak melalui pelaksanaan Program Kotaku; dan
- d. Percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan dengan mengerakkan partisipasi masyarakat lewat CSR.

35. Sasaran *Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Konsep Tata Ruang;*



Peningkatan efektivitas Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang dimaksud adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi dasar rencana. Hal inilah yang menjadi pijakan pengendalian dan pemanfaatan ruang.

Adapun capaian sasaran: [Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan konsep tata ruang](#) sebagaimana Tabel 3.77.

Tabel 3.77.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Konsep Tata Ruang

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Ketaatan terhadap RTRW	78,86	78,98	79,6	80	80,5	100,63	80,00	100,63

Sumber: DPUPR, Update per Januari 2022.

Kebijakan, rencana dan atau program (KRP) yang disusun harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, juga selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup, untuk mengimplementasikan hal ini pada tahun 2019 ketaatan terhadap RTRW mencapai 78,98%, dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 79,6%. Hal ini disebabkan karena adanya upaya untuk mewujudkan konsistensi untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Konsekuensi logis dari persoalan tersebut, KRP harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga pemanfaatan dan pengendalian ruang merupakan upaya yang terstruktur, dan sebagai terobasan dan memastikan bahwa pada setiap tahap awal penyusunan KRP sudah memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: [Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Konsep Tata Ruang](#) dilaksanakan melalui Program:

1. Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;
2. Penataan Ruang; dan
3. Perencanaan Ruang.



Permasalahan :

- a. Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilaksanakan secara konsisten, hal ini disebabkan karena belum lengkapnya piranti peraturan penunjang;
- d. Belum kuatnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian *insentif-desinsentif* serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- e. Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat tentang RTRW; dan
- f. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Solusi :

- a. Optimalisasi Kinerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara konsisten, dan tidak tebang pilih; dan
- d. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif-desinsentif serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.



36. Sasaran *Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup*;



Sebagai upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, target indikator sasaran digunakan sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan diantaranya: indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakan hukum lingkungan. Masih rendahnya indeks kualitas air salah satu penyebabnya adalah tingginya pencemaran air oleh limbah domestik.

Adapun capaian sasaran: *Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup* disajikan pada Tabel 3.78.

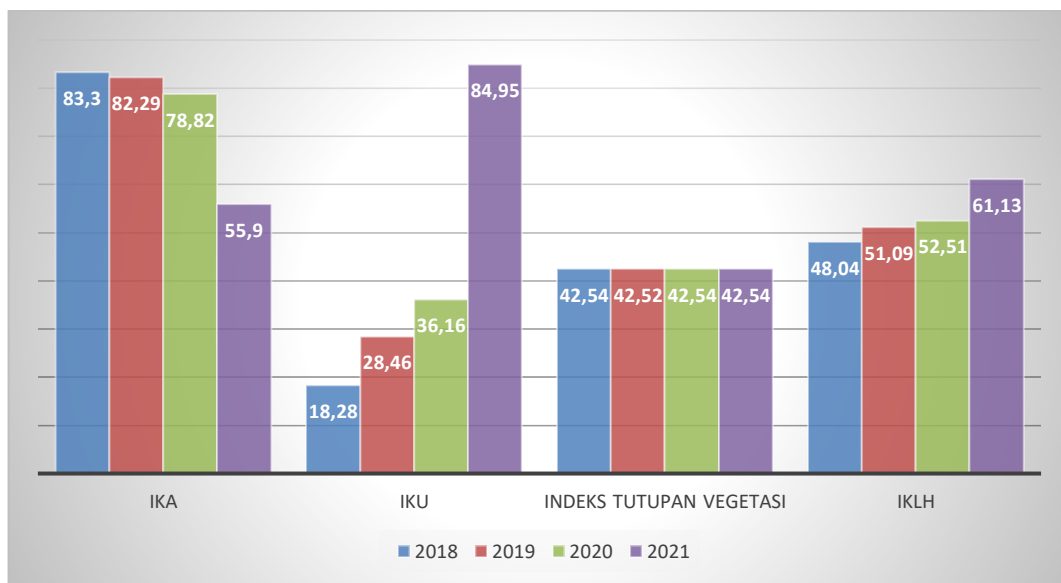
Tabel 3.78.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks kualitas air	16,00	28,46	36,16	40,46	55,9	138,16	40,46	138,16
2	Indeks kualitas udara	60,00	82,29	76,82	84,46	84,95	100,58	84,46	100,58
3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	34,14	83,3	42,54	58,60	42,54	72,59	58,60	72,59

Sumber: DINAS LH,, Update per Januari 2022.

Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2021 sebesar 55,9, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 84,95, dan Indeks tutupan vegetasi/lahan sebesar 42,54. Uji sampling udara menggunakan *metode pasive sampler* dimana keakuratan lebih baik dan lebih mewakili uji kualitas udara di Kabupaten Klaten, pengambilan uji dilakukan selama 24 jam dengan pelaksanaan 2 kali dalam setahun pada 4 titik (kawasan padat penduduk, transportasi, industri dan perkantoran).

Pengambilan uji sampling kualitas air sungai dilakukan hanya beberapa titik menyesuaikan anggaran dan karena SDM yang terbatas serta antrian pada laboratorium lingkungan yang terakreditasi sangat panjang maka tahun 2019 ini hanya dapat dilakukan sekali dengan pengambilan sampling pada 26 titik dari 7 sungai yang ada di Kabupaten Klaten dari target 10 sungai. Adapun sungai yang dapat dipantau mutu airnya dengan pengambilan sample adalah sebagai berikut : Sungai Rowo Jombor, Sungai Modin, Sungai Soran, Sungai Pusur, Sungai Merbung, Sungai Kacang Ijo, dan Sungai Kroman. Ditambah hasil uji dari BKSDA sebanyak 3 sungai yaitu Sungai Dengkeng, Sungai Jebol dan Sungai Pusur. (DAS Bengawan Solo). Berdasarkan capaian IKA, IKU, dan Indeks tutupan vegetasi/lahan selama tahun 2018-2021 capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) disajikan pada Grafik 3.16.



Sumber: DINAS LH, Update per Januari 2022.

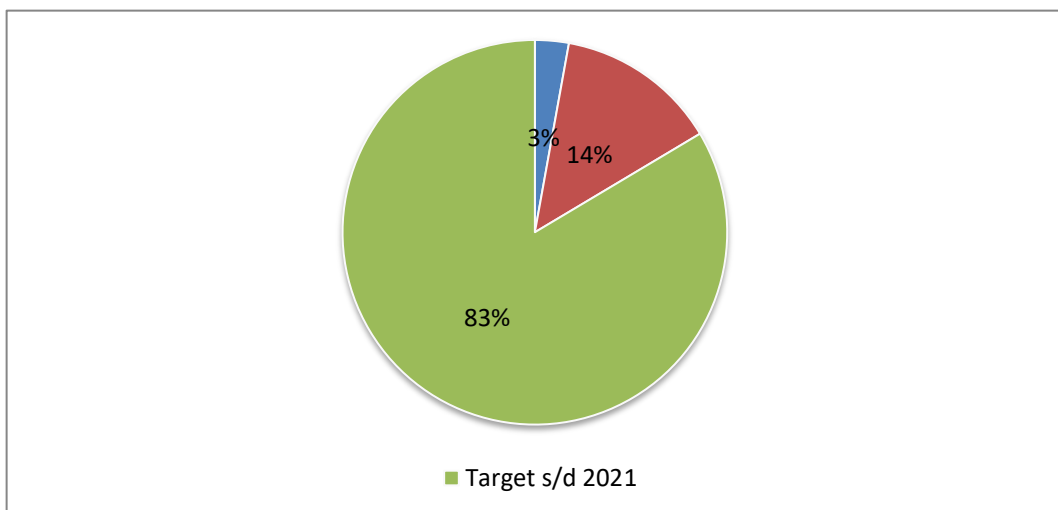
Grafik 3.16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2018-2021

Berdasarkan Grafik 3.16. sebagaimana di atas terlihat bahwa indeks air dibanding tahun lalu mengalami peningkatan sejumlah 0,28 poin dan indeks udara mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebanyak 20,9 poin. Kedua indeks tersebut diatas yaitu indeks kualitas air dan udara apabila digabung dengan indeks tutupan vegetasi/tutupan lahan dimana indeks tutupan lahan/vegetasi Kabupaten Klaten tahun 2021 sebesar 42,54 menjadi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan hasil

perhitungan 61,13. Meningkat dibandingkan tahun lalu dimana IKLH Kabupaten Klaten 51,84, meskipun masih jauh dari target yang diharapkan akan tetapi telah terlihat jelas mengalami progres kenaikan. Dengan adanya komitmen semua pihak instansi terkait diharapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten pada akhirnya sesuai dengan apa yang ditargetkan/diharapkan.

Pada tahun 2021 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dari target 100% terealisasi 100%. Data perusahaan yang wajib AMDAL sejumlah 5 (Sari Husada, double track, jalan tol, 2 sutet) dan telah dilaksanakan monitoring/pengawasannya.

Perhitungan penegakan hukum lingkungan berdasarkan data jumlah aduan yang masuk kepada Pemda dan diteruskan ke DLHK kemudian ditindaklanjuti sehingga aduan/masalah lingkungan yang ada di masyarakat Kabupaten Klaten dapat terfasilitasi atau terselesaikan. Adapun data tahun 2021 sebanyak 3 perusahaan yang melakukan pelanggaran dan telah diberikan sanksi. Hasil tahun 2021 lebih baik dari pada tahun 2020 dimana jumlah kasus perusahaan tahun 2020 sebanyak 18 kasus sedang tahun 2021 sebanyak 3 kasus.



Sumber: DINAS LH, Update per Januari 2022.

Grafik: 3.17. Capaian Konservasi Penghijauan Daerah Sumber Mata Air Kabupaten Klaten Tahun 2018-2019 dan Target sampai tahun 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup** dilaksanakan dengan program:



1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
3. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH;
4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
5. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
6. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

Permasalahan:

1. Belum sinerginya antar pelaku pemangku kepentingan dalam mengelola lingkungan hidup; dan
2. Tingginya tingkat pencemaran limbah domestik.

Solusi:

Kewenangan dalam pengendalian IPAL domestik bukan menjadi kewenangan Dinas LHK melainkan Perwaskim sehingga diharapkan kedepan adanya program dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi permasalahan pencemaran limbah air domestik di sungai.

37. Sasaran Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana;



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan perlunya pengaturan yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Pasal 1 butir 10 UU PPLH).

Sehingga potensi dampak dan/atau resiko lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi. Dampak dan/atau resiko lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau



program, oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 dikategorisasikan, antara lain sebagai potensi: meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan, keanekaragaman hayati, banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat, dan/atau meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Berbagai hal tersebut di atas, perlu ada upaya pengurangan kerentanan resiko bencana dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk upaya tersebut perlunya penguatan masyarakat dengan menciptakan desa tangguh bencana dengan berbagai instrumen yang diperlukan.

Adapun capaian sasaran: **Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana** sebagaimana Tabel 3.79.

Tabel 3.79.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9) *100
1	Kelas Indeks Kapasitas Bencana	0	Sedang	Sedang (123,20)	Sedang (119)	Sedang (99,24)	83,39	Sedang	Sedang

Sumber: BPBD, Update per Januari 2022.

Pada tahun 2021 upaya untuk mewujudkan desa tangguh bencana belum belum optimal, sementara ini baru diupayakan dengan rintisan “**Desa Paseduluran**” dan Kabupaten Tangguh Bencana, serta untuk mendukung pencapaian sasaran: **Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana** di Kabupaten Klaten dengan upaya penguatan mitigasi bencana.



Kondisi kebencanaan yang wajib diperhatikan, diantaranya:

- a. Bencana Banjir, dimana Kecamatan Cawas dan Karangdowo merupakan wilayah yang paling sering terkena banjir. Wilayah di Kabupaten Klaten yang termasuk dalam daerah rawan banjir adalah wilayah yang berada di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Wilayah tersebut meliputi sebagian Kecamatan Prambanan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Kalikotes, Cawas, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Pedan, Ceper dan Trucuk. Rawan bencana lainnya yang ada di Kabupaten Klaten adalah gempa bumi dan tanah longsor.
- b. Gempa bumi, Wilayah di Kabupaten Klaten termasuk daerah rawan gempa bumi dengan klasifikasi rendah, menengah hingga tinggi. Sebagian besar wilayah termasuk dalam klasifikasi rendah dan menengah. Di sebagian wilayah Kecamatan Polanharjo, Delanggu, Juwiring dan Wonosari termasuk daerah rawan bencana gempa bumi tinggi.
- c. Rawan bencana tanah longsor/ gerakan tanah yang ada di Kabupaten Klaten terdiri dari gerakan tanah sangat rendah hingga tinggi. Gerakan tanah tinggi berada di Kecamatan Kemalang yang merupakan wilayah terdekat dengan Gunung Merapi. Sedangkan untuk gerakan tanah sedang berada di sebagian wilayah Kemalang, Bayat dan Gantiwarno.
- d. Selain kejadian bencana di atas, di Kabupaten Klaten juga terdapat wilayah yang berada di lereng gunung api yaitu Gunung Merapi. Beberapa wilayah di Kabupaten Klaten yang berada di sekitar lereng gunung api termasuk dalam kawasan rawan bencana erupsi gunung api. KRB III merupakan kawasan yang letaknya berdekatan dengan sumber bahaya Gunungapi Merapi. Jika Gunungapi Merapai mengalami erupsi maka pada kawasan ini sering dilanda awan panas, aliran lava, guguran batu, dan lontaran batu (pijar) sehingga kawasan ini memiliki ancaman resiko tinggi. KRB II merupakan kawasan yang berpotensi terlanda dua hal, yaitu aliran massa berupa awan panas, aliran lava, dan lahar dan lontaran berupa jatuhnya piroklastik lebat dan lontaran batu (pijar).

Pada tahun 2021 program yang dilaksanakan untuk sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana dengan program Penanggulangan Bencana.



Permasalahan :

1. Masih rendahnya perencanaan berbasis migasi bencana; dan
2. Sulitnya persyaratan dan dukungan pembiayaan Kabupaten Tangguh Bencana.

Solusi :

Berdasarkan perkembangan Indeks Risiko Bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi melalui arah kebijakan:

1. Mengurangi risiko bencana; dan
2. Meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan Daerah;
 - b. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan
 - c. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.

38. Sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi;



Memperhatikan luas wilayah 65.556 ha (655,56 km²) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, sementara ini diukur dari jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk baru pada kisaran 89,83 dengan rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk pada kisaran angka 2,49, dan cakupan penegakan Perda baru mencapai 90,91 hal ini disebabkan karena luasan wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Linmas. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusivitas daerah.

Menciptakan kondusivitas Daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten diupayakan dengan mengurangi kompleksitas masalah kehidupan sosial budaya dengan

membangun kesadaran kolektif tentang perlunya: 1. *Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*, 2. *Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik*, 3. *Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, 4. *Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial*.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi** sebagaimana Tabel 3.80.

Tabel 3.80.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Demokrasi	69,75	72,17	72,22	75,7	75,43	99,64	75,70	99,64

Sumber: BAKESBANGPOL, Update per Januari 2022.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek, diantaranya: 1) kebebasan sipil, 2) hak-hak politik, dan 3) lembaga demokrasi. Penetapan besaran IDI ditetapkan dengan skala nilai 0-100. Penetapan nilai IDI di Kabupaten Klaten mengikuti angka Provinsi Jawa Tengah, karena melakukan pengukuran dan penghitungan Provinsi. Adapun capaian IDI Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sebesar 70,85, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 72,17.

Pengukuran atas indeks komposit pembentuk IDI pada tahun 2020, diperoleh dari komponen: 1) kebebasan sipil (skor 78,43), 2) hak-hak politik dan lembaga demokrasi (skor 67,91), dan 3) lembaga demokrasi (skor 90,50).

Berdasarkan capaian IDI, selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kategori baik (indeks > 80), kategori sedang (indeks 60-80), dan kategori buruk (indeks < 60). Oleh karena itu pencapaian



IDI pada tahun 2019 angka sementara (sama dengan tahun 2018) memperoleh skor 72,17 dengan kategori sedang. Sedangkan pada tahun 2021 capaian IDI mendapat Skor 75,43.

Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatnya: **Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi** diantaranya:

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
4. Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Permasalahan:

- a. Masih munculnya berbagai penyakit masyarakat;
- b. Adanya ancaman pergerakan terorisme yang berkembang di Klaten; dan
- c. Masih rendahnya kualitas politik masyarakat.

Solusi :

- a. Pengendalian dan pencegahan dini munculnya berbagai penyakit masyarakat; dan
- b. Pembinaan kualitas politik masyarakat yang bermartabat dan kepribadian Indonesia.

39. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya;



Ukuran keberhasilan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya diantaranya diukur dengan indikator Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan). Pada tahun 2020

tercatat sebanyak 391 desa, dan 10 kelurahan, dengan jumlah kecamatan 10 merupakan target sasaran pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya melalui lembaga desa untuk menuju ketahanan desa dan kemandirian desa.

Adapun capaian sasaran: [Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya](#) disajikan pada Tabel 3.81.

Tabel 3.81.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	16	58	61	100	85,50	85,50	100	85,50

Sumber: DISPERMADES, Update per Januari 2022.

Berdasarkan capaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya pada tahun 2020 per kelompok rata-rata anggotanya sebanyak 61 atau naik sebanyak 3 dibanding tahun 2019, sedangkan pada tahun 2021 per kelompok rata-rata anggotanya sebanyak 85,50.



Apabila per kelompok rata-rata anggotanya sebanyak 85,50 dan diakumulasi dengan jumlah desa/kelurahan sudah merupakan modal sosial untuk melestarikan adat dalam pengembangan kehidupan sosial yang memadai sampai tingkat kabupaten. Tinggal bagaimana pembinaan dan fasilitasi kegiatan dapat dilakukan dengan baik.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang didukung dengan program, diantaranya:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
3. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya untuk menjaga keutuhan suatu bangsa;
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya;
- c. Belum adanya sarana informasi Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya; dan
- b. Peningkatan sarana informasi Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.



40. Sasaran Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;



Ukuran keberhasilan Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diantaranya diukur dengan indikator Indeks ketertiban masyarakat. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 391 desa, dan 10 kelurahan, dengan jumlah kecamatan 10 merupakan target sasaran Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Adapun capaian sasaran: Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disajikan pada Tabel 3.82.

Tabel 3.82.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Ketertiban Masyarakat	90	96	98	100	100	100	100	100

Sumber: SATPOL PP DAN DAMKAR, Update per Januari 2022.

Berdasarkan capaian Pemeliharaan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana Tabel 3.86. di atas, memperhatikan luas wilayah 65.556 ha (655,56km²) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, sementara ini diukur dari jumlah Linmas per jumlah 10.000 baru pada kisaran 89,83 dengan rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk sudah mencapai kisaran angka 2,49, dan cakupan penegakan Perda pada tahun 2018 mencapai 90,91% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 92,42% (dari

sebanyak 1,254 kasus penegakan Perda dan yang diselesaikan sebanyak 1.159 kasus yang diselesaikan) hal ini disebabkan karena luasan wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Linmas. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusivitas daerah.

Jenis kegiatan untuk mendukung pencapaian urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan yang dilaksanakan diantaranya: koordinasi pengamanan wilayah, optimalisasi peran Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Toma/ga dan lembaga lainnya, Penegakan Perda, Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Hal tersebut juga diharapkan mampu untuk mencegah, menekan, dan/atau menyelesaikan terjadinya konflik sosial maupun konflik yang dilatarbelakangi masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Berbagai permasalahan yang dihadapi bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan, diantaranya:

1. Penyakit Masyarakat

Data yang tersaji tentang berbagai penyakit masyarakat didapatkan berdasarkan Hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), data tersebut adalah mengenai data pelacuran dan peredaran minuman keras/beralkohol. Salah satu jenis penyakit masyarakat yang menonjol yaitu kasus pelacuran dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 kasusnya bersifat fluktuatif, data kondisinya disajikan pada Tabel 3.83.



Tabel 3.83.
Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan
Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban					
			PGOT		PSK /WT S	Pasangan Tidak Resmi	Anjal/punk	
			Pria	Wanita			Pria	Wanita
1	2017	15	15	8	6	58	12	14
2	2018	15	8	6	10	78	18	7
3	2019	20	12	5	12	37	38	8
4	2020	16	17	15	6	54	31	17
5	2021	21	31	10	9	53	12	4

SANKSI

- Bagi WTS/PSK dan Anjal wanita langsung dikirim ke Barehsos WANODYATAMA Surakarta selama 6 bulan.
- Bagi Anjal pria dikirim ke PPSA Mandiri Semarang.
- Bagi PGOT yang terjaring diserahkan ke Rumah Singgah Klaten guna assesment dan tindak lanjut.
- Bagi Pasangan tidak resmi diwajibkan wajib lapor pembinaan sebanyak 20 kali di SATPOL PP.

Sumber: SATPOL PP DAN DAMKAR, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.85. sebagaimana tersebut di atas, trend pelanggaran Peraturan Daerah khususnya masalah penyakit masyarakat semakin besar jumlahnya dibandingkan jumlah pelanggaran Peraturan Daerah secara umum, hal ini disebabkan:

- a. Tingkat kesadaran warga masyarakat yang rendah;
- b. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah dimaksud sampai kepedesaan/pelosok;
- c. Persaingan ekonomi dan gaya hidup kekinian mendorong masyarakat dan remaja melakukan perbuatan yang cenderung kriminal dan mengganggu ketertiban umum; dan
- d. Penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan daerah belum mampu membuat efek jera para pelanggar.

Berikut Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/Beralkohol selama tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.84.



Tabel 3.84.
Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan
Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban			
			Ciu	Vodka	Anggur putih	Anggur merah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2017	3	50 liter	48 botol	4 dus	6 dus
2	2018	0	0	0	0	0
3	2019	2	0	24 botol	7 botol	14 botol
4	2020	4	0	45 botol	18 botol	138 botol
5	2021	1	0	47 botol	0	44 botol
SANKSI						
- Barang bukti miras diserahkan ke Polres guna pemusnahan terpadu;						
- Para pelaku pelanggaran dilakukan tipping oleh Penyidik Polres Klaten.						

Sumber: SATPOL PP DAN DAMKAR, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.84. sebagaimana tersebut di atas, minuman keras/beralkohol yang ditemukan berdasarkan hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) jumlahnya juga bersifat fluktuatif. Hal ini tergantung pada situasi sosial budaya masyarakat yang sering kali menjadi baluran tindak kriminal yang mengiringinya.

2. Ancaman Terorisme

Adanya Ancaman Terorisme, Konflik SARA (baik Vertikal maupun Horizontal) dan gerakan yang bersifat radikalisme yang kadang bersifat laten serta kenakalan remaja masih sering terjadi. Kondisi permasalahan ketentraman umum selama tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.85.

Tabel 3.85.
Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum
Tahun 2017-2021

No.	Jenis Permasalahan	Tahun (Jumlah Kejadian)				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ancaman Terorisme	-	-	1	-	1
2.	Konflik Sara	3	1	1	8	-
3.	Gerakan Radikalisme	9	2	1	-	-
4.	Kenakalan remaja	3	4	1	-	8

Sumber: BAKESBANGPOL Update per Januari 2022.



Berdasarkan Tabel 3.85. sebagaimana tersebut di atas jenis permasalahan ketentraman umum di Kabupaten Klaten secara umum mengalami penurunan. Ancaman terorisme hanya terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1 (satu) kasus. Konflik sara sering kali terjadi karena dipicu hal-hal yang sifatnya sepele, tetapi bisa berkembang menjadi besar karena unsur provokasi. Begitu juga dengan gerakan radikalisme, namun dari tahun ke tahun angka kejadiannya bisa ditekan karena intensifnya kegiatan forum kerukunan umat beragama untuk meminimalisir permasalahan ketentraman umum.

3. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dirumuskan: *Jumlah kriminalitas tertangani/jumlah penduduk X 10.000 (Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)* maka diperoleh data angka kriminalitas sebagai berikut:

- a. Tahun 2017 : 3,25
Jumlah kriminalitas tertangani 424 kasus dibagi jumlah penduduk 1.304.519 jiwa dikali 10.000.
- b. Tahun 2018 :1,89.
Jumlah kriminalitas tertangani 248 kasus dibagi jumlah penduduk 1.314.781 jiwa dikali 10.000
- c. Tahun 2019 : 2,73
Jumlah kriminalitas tertangani 361 kasus dibagi jumlah penduduk 1.323.609 jiwa dikali 10.000
- d. Tahun 2020 : 1,19
Jumlah kriminalitas tertangani 158 kasus dibagi jumlah penduduk 1.330.802 jiwa dikali 10.000.
- e. Tahun 2021 : 1,80
Jumlah kriminalitas tertangani 230 kasus dibagi jumlah penduduk 1.276.030 jiwa dikali 10.000.

Angka Kriminalitas belum bisa ditekan, hal ini disebabkan beberapa permasalahan, diantaranya: 1). Bentuk dan modus kejahatan (tindak pidana) pun terus berkembang, sehingga penanganannya pun harus beda. 2). Selain itu meningkatnya tindak kriminal disebabkan persoalan seperti, ekonomi, sosial, konflik dan rendahnya kesadaran hukum, kemajuan teknologi informasi yang mendorong terjadinya bentuk-bentuk tindak yang didasari atau



pun tidak. 3). Selain itu rendahnya ketaatan pelaksanaan terhadap Perda/Perbup karena kurangnya sosialisasi, dan terbatasnya sumber daya manusia aparatur penegak Perda/Perbup.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** yang didukung dengan program Pemeliharaan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk menjaga keutuhan suatu bangsa;
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- c. Belum adanya sarana informasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan masyarakat lebih senang mengkonsumsi berita *hoax* sebagai komoditas politik.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- b. Peningkatan sarana informasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas untuk melawan berita *hoax*.



41. Sasaran Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak;



FAN Forum Anak Nasional

Peningkatan kapasitas perempuan, dan perlindungan anak merupakan salah satu tujuan/goals dari pembangunan berkelanjutan (SDGs). Penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata, serta besarnya jumlah jiwa sudah barang tentu akan terkait dengan masalah pangan, gizi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan khusus anak menjadi hal krusial yang harus diwujudkan untuk melindungi anak. Sehingga perlunya penguatan kelembagaan anak, perlunya hak sipil dan kebebasan, serta perlindungan khusus terhadap tumbuh kembang anak perlu menjadi perhatian serius. Data menunjukkan 14,47 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kelompok sangat rawan pangan (asupan kalori <1.400 Kkal/orang/hari), 5,38 persen prevalensi gizi kurang hal ini menunjukkan bahwa foodborne disease merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu diantisipasi bagi tumbuh kembang anak.

Secara khusus, peningkatan kapasitas perempuan diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), dan Indeks Pembangunan Gender (IDG). Sedangkan kondisi umum pencapaian dan permasalahan yang dihadapi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Klaten, diantaranya terkait : (1). Penguatan kelembagaan, (2). Hak sipil dan kebebasan, (3). Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (4). Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (5). Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kreatif, serta (6). Perlindungan khusus.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak** disajikan pada Tabel 3.86.

Tabel 3.86.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya
Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,95	60,25	72,35	60,37	69,42	114,99	60,37	114,99
2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya	Madya (650)	Madya (650)	Nindya 750	Madya 650	86,67	Nindya (750)	86,67

Sumber: DISSOSP3APPKB, Update per Januari 2022.

Catatan: capaian tahun 2020 angka sementara, karena rilis data belum keluar.

Indikator kinerja keberhasilan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG);

Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang cukup. Peningkatan ini disebabkan adanya komitmen pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, hanya saja peningkatan ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yang optimal. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.87.

Tabel 3.87.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IPG	96,54	96,62	96,62	96,17	96,17

Sumber : DISSOSP3APPKB, Update per Januari 2022.

Catatan: *) angka sementara

Berdasarkan Tabel 3.87. sebagaimana tersebut di atas, selama dua tahun terakhir IPG tidak mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 96,17% dan pada tahun 2021 sementara tetap 96,17%. Perlunya peningkatan kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan melalui penguatan lembaga P2TP2A, dan dukungan penganggaran responsif gender diharapkan akan meningkatkan IPG.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama tahun 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan meskipun pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan. Peningkatan ini disebabkan adanya komitmen pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Perkembangan Indeks komposit pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.88.

Tabel 3.88.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Periode 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	6,00	6,00	18	18	18
2	Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	43,65	52,71	55,73	60,72	60,72
3	Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja (%)	37,76	37,77	37,81	37,72	37,72
4	IDG	59,60	60,25	72,35	69,42	69,42

Sumber : DISSOSP3APPKB, Update per Januari 2022.
Catatan: *) angka sementara.

Berdasarkan Tabel 3.88. sebagaimana tersebut di atas bisa dilihat perkembangan Indeks komposit pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama tahun 2016-2020 bersifat relatif fluktuatif, hal ini dikarenakan budaya *patriarki* yang masih kuat. Hal ini termanifestasi dalam bentuk *stereotype*, marginalisasi, subordinasi, tindak kekerasan dan beban ganda



perempuan, dan adanya deskriminasi pada upah pekerja perempuan di sektor non formal. Khusus Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%) pada tahun 2019 angkanya mencapai 18% (atau 9 perempuan dari total anggota DPRD sebanyak 50 orang).

3. Peran Perempuan dalam Pemerintahan

Partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari posisi perempuan dalam jabatan eksekutif dan legislatif selama tahun 2017-2021 relatif stagnan, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan untuk menduduki posisi jabatan eksekutif dan legislatif. Perkembangan keterwakilan peran perempuan dalam jabatan pemerintahan, dan Lembaga Perwakilan Rakyat selama tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.89.

Tabel 3.89.

Keikutsertaan Perempuan di dalam Jabatan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

No.	Jenis Jabatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Eksekutif (%)	56,6	57	59,7	14,35	30
2	Legislatif (%)	$(3/50) = 6,00$	$(3/50) = 6,00$	$(9/50) = 18$	$(9/50) = 18$	$(9/50) = 18$

Sumber: DISSOSP3APPKB, Update per Januari 2022 .

Berdasarkan Tabel 3.89. sebagaimana tersebut di atas, keterlibatan perempuan di lembaga legislatif pada tahun 2017-2018, dan tahun tahun 2019-2021 stagnan karena masih dalam satu periode DPRD hasil Pemilu tahun 2014 dan tahun 2019. Hanya dalam jabatan eksekutif mulai tahun 2020 persentasenya penurunan, hal ini seiring dengan kebutuhan, serta tuntutan kualitas dan kemampuan perempuan dalam mengisi formasi jabatan publik.

4. Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak dan perempuan ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian terhadap kasus kekerasan



yang berbasis gender dan anak disebabkan karena secara intensif telah dilakukan sosialisasi tentang hukum dan peraturan lainnya berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Tabel 3.90.

Tabel 3.90.
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2017-2021

Tahun	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Traficking		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2017	9	6	3	5	0	12	0	7	1	0	43
2018	7	8	2	5	0	22	1	6	0	0	51
2019	6	7	9	3	5	15	4	8	0	0	57
2020	4	11	1	8	0	13	0	3	0	0	40
2021	10	4	4	6	2	16	0	0	0	0	42

Sumber: DISSOSP3APPKB, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3.90. sebagaimana tersebut di atas, selama dua tahun terakhir (tahun 2020-2021) jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) mengalami peningkatan sebesar 2 kasus dari tahun 2020 sebesar 40 kasus menjadi 42 kasus di tahun 2021, hal ini disebabkan belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak dalam menghadapi kekerasan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Peningkatan Kapasitas Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Klaten didukung dengan program:

1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
3. Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; dan
4. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.



Permasalahan :

- a. Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak;
- b. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai.

Solusi :

- a. Peningkatan kebijakan pembangunan yang berspektif perempuan dan anak;
- b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Peningkatan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
- d. Peningkatan sistem kesejahteraan dan perlindungan anak.

42. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan;



Ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas layanan perhubungan diantaranya diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan, terkait dengan aspek keselamatan, keamanan, kemudahan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan angkutan serta kepuasan bagi pengguna layanan perhubungan.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan** disajikan pada Tabel 3.91.

Tabel 3.91.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks kepuasan layanan perhubungan	75,99	79,02	79,95	81,08	80,65	99,47	81,08	99,47

Sumber: Dinas Perhubungan, Update per Januari 2022.

Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Berdasarkan capaian Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan sebagaimana Tabel 3.91. di atas, ditunjang adanya ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik. Jumlah sarana angkutan (*Umum dan Pribadi*) disajikan pada Tabel 3.92.

Tabel 3.92.
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Mobil Barang	9.622	8.878	8.591	8.072	8.018
02 Mobil Bus					
* Umum	397	384	408	391	205
<i>Bus Besar</i>	65	97	88	91	20
<i>Bus Sedang</i>	261	248	268	215	145
<i>Bus Kecil</i>	71	39	52	85	40
* Bukan Umum	105	111	117	97	332

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
03 Kendaraan Khusus/Alat Berat	6	10	21	7	7
Jumlah	10.527	9.383	9.137	8.567	8562

Sumber : Dinas Perhubungan, Update per Januari 2022.

Disamping Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) yang tercatat, juga dimiliki terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 6 (enam) lokasi untuk mendukung transportasi darat. Data terminal angkutan penumpang umum pada tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.93.

Tabel 3.93.
Data Terminal Angkutan Penumpang Umum
di Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Terminal	Alamat	Type	Luas
1	2	3	4	5
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	C	1950 m ²
2	Cawas	Cawas, Klaten	C	3120 m ²
3	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	C	2729 m ²
4	Buntalan	Buntalan, Klaten Tengah, Klaten	A	25840 m ²
5	Buntalan	Buntalan, Klaten Tengah, Klaten	B	8545 m ²
6	Manisrenggo	Manisrenggo, Klaten	C	1668 m ²

Sumber : Dinas Perhubungan, Update per Januari 2022.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan yang didukung dengan program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Permasalahan :

- Tingginya mobilitas penduduk, diperlukan sarana perhubungan massal yang terjangkau dan mudah. Namun banyak kondisi angkutan umum yang sudah tidak laik jalan;
- Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan pemenuhan layanan perhubungan; dan
- Belum optimalnya sarana informasi layanan perhubungan yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.



Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait layanan perhubungan ; dan
- b. Peningkatan sarana informasi layanan perhubungan yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

43. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat;



Ukuran keberhasilan meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat diukur dengan indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 391 desa, dan 10 kelurahan, dengan jumlah kecamatan sebanyak 26 merupakan target sasaran Pelayanan Perijinan Satu Pintu dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menuju ketahanan desa dan kemandirian desa, serta daya saing Daerah.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat** disajikan pada Tabel 3.94.

Tabel 3.94.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan	84,50	80,52	78,37	80	81,20	101,50	80,00	101,50

Sumber: DPMPTSP, Update per Januari 2022.

Berdasarkan tanggapan penggunaan layanan ketika disurvei secara mandiri oleh Dinas Penanaman Modal, dan Perijinan Satu Pintu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 81,20 (artinya kategori baik). Perolehan indeks ini didasarkan atas penilaian atas 8 (delapan) unsur pelayanan, diantaranya: a. Persyaratan, b. Prosedur, c. Waktu pelayanan, d. Biaya/tarif, e. Produk layanan, f. Kompetensi pelaksana, g. Perilaku pelaksana, h. Maklumat pelayanan, dan i. Penanganan pengaduan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat yang didukung dengan program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah.

Permasalahan :

- a. Belum ada jaminan kepastian dan kenyamanan berinvestasi;
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan pemenuhan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat; dan
- c. Belum optimalnya sarana informasi layanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Percepatan realisasi pelaksanaan Tugas Satgas Percepatan Realisasi Investasi; dan
- b. Penyusunan rencana Aksi Daerah Percepatan Investasi Daerah.



44. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas;



Ukuran keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat diantaranya diukur pada layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat sebanyak 827.614 orang yang belum memiliki Akta Lahir, dan penduduk yang belum mempunyai e-KTP Elektronik sebanyak 13.527 orang. Kondisi kepemilikan e-KTP dari tahun ke tahun bertambah sering dengan penerapan Single Identity Number program e-KTP.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas** sebagaimana Tabel 3.95.

Tabel 3.95.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9) *100
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat thd layanan administrasi	Sdh	91,77	Sdh (81,6)	Sdh	91,50	91,50	sdh	Sdh

Sumber: DISDUKCAPIL, Update per Januari 2022.

Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu : (i) Pendaftaran Penduduk, (ii) Pencatatan Sipil, dan (iii) Pengelolaan Informasi Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dengan produk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan (SKK).



Pencatatan Sipil dengan produk Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akte Pengangkatan Anak dan Akte Pengakuan /Pengesahan Anak. Pengelolaan Informasi Kependudukan dengan produk data/informasi kependudukan yang berupa olahan proses dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Perkembangan jumlah pelayanan akte di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.96.

Tabel 3.96.

Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

No	Jenis Akte	2017	2018	2019	2020	2021*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelahiran	23.256	27.755	26.582	19.511	21.012
2	Kematian	1.400	2.116	1.800	2,922	13.021
3	Perkawinan	450	473	472	397	563
4	Perceraian	58	71	76	166	52

Sumber : DISDUKCAPIL, Update per Januari 2022.

Catatan : *) Data Semester I -2021

Berdasarkan Tabel 3.96. sebagaimana tersebut di atas, untuk mewujudkan penerapan *Single Identity Number* program **e-KTP** sampai dengan tahun 2021 tercatat penduduk yang belum ber-KTP sebanyak 13.527 orang. Kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang belum memiliki kartu identitas (baik kartu identitas dalam bentuk akte lahir dan Kartu Tanda Penduduk) dalam kurun waktu tahun 2017-2021 cenderung menurun, hal ini dapat dilihat dari Tabel 3.98. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan secara signifikan. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang belum memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.97.

Tabel 3.97.

Penduduk Kabupaten Klaten yang Belum Ber-Akte Lahir dan KTP Elektronik Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Belum Memiliki Akte Lahir	Belum Memiliki KTP Elektronik
1	2017	894.986	91.538
2	2018	877.190	71.223
3	2019	850.325	55.921
4	2020	827.614	19.522
5	2021	Na	13.527

Sumber : DISDUKCAPIL, Update per Januari 2022.



Berdasarkan Tabel 3.97. sebagaimana tersebut di atas jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang belum memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik tahun 2017–2020 cenderung turun, hal ini disebabkan karena validasi data kependudukan untuk mewujudkan penerapan *Single Identity Number* program [e-KTP](#).

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan.
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dan
- c. Belum adanya sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan administrasi kependudukan; dan
- b. Peningkatan sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

45. Sasaran *Pengembangan Ketrasmigrasian*;



Ukuran keberhasilan pengembangan ketrasmigrasian diukur dengan indikator *Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi. Selama tahun 2017-2021 sasaran transmigrasi di daerah: Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra, namun mulai tahun 2017-2019 tinggal Sumatra saja yang menjadi tujuan transmigrasi.*

Adapun capaian sasaran: [Pengembangan Ketrasmigrasian](#) disajikan pada Tabel 3.98.

Tabel 3.98.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Pengembangan Ketransmigrasian

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	-64,62	5,2	5,2	42,20	-18,18	-43,29	42	

Sumber: DISPERNAKER, Update per Januari 2022.

Ukuran keberhasilan peningkatan besaran minat transmigrasi diukur dari jumlah peserta transmigrasi yang terdaftar pada tahun 2019 sebanyak 56 jiwa (22 KK), sedangkan yang diberangkatkan pada tahun 2019 sebanyak 44 jiwa (14 KK). Pada tahun 2020 jumlah peserta transmigrasi yang terdaftar sebanyak 11 KK dan jumlah peserta transmigrasi yang terdaftar pada tahun 2021 sebanyak 9 KK, sehingga persentase besaran peningkatan minat transmigrasi sebesar -18,18%. Akan tetapi pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada pemberangkatan transmigrasi dikarenakan masih dalam situasi pandemi.

Adapun peta penyebaran penempatan transmigrasi menurut daerah penempatan tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.99.

Tabel 3.99.
Realisasi Penempatan Transmigrasi Umum Menurut Daerah
Penempatan Tahun 2017-2021

TAHUN	Sumatera		Kalimantan		Sulawesi	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017	4	13	-	-	-	-
2018	7	28	-	-	-	-
2019	14	44	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sumber : DISPERNAKER, Update per Januari 2022.



Berdasarkan Tabel 3.99. sebagaimana tersebut di atas, pengiriman transmigrasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini dikarenakan berkurangnya kuota penempatan transmigran asal Kabupaten Klaten yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah. Selama ini penempatan transmigrasi Kabupaten Klaten masih tergantung dengan *quota* dan anggaran dari Provinsi Jawa Tengah.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran pengembangan ketransmigrasian yang didukung dengan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Permasalahan :

- a. Minimnya minat calon transmigrasi, sekalipun fasilitasi dan pembekalan dari pemerintah cukup;
- b. Penempatan calon transmigrasi itupun harus Provinsi yang menentukan quotanya.
- c. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan penjaringan sampai penempatan transmigrasi; dan
- d. Belum optimalnya sarana informasi layanan ketransmigrasian yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait layanan ketransmigrasian; dan
- b. Peningkatan sarana informasi layanan ketransmigrasian yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

3.3 Akuntabilitas Anggaran*)

Potensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp.2.532.484.633.385,- (*dua trilyun lima ratus tiga puluh dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh delapan lima rupiah*), dan terealisasi sebesar Rp.2.554.737.164.586,- (*dua trilyun lima ratus lima puluh empat milyar tujuh ratus*

tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp.277.915.340.915,- (*Dua ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah*), dan teralisasi sebesar Rp.300.023.154.495,- (*tiga ratus milyar dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*), atau melampaui target sebanyak Rp.22.107.813.580,- (*dua puluh dua milyar seratus tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah*).

1.2. Pendapatan Transfer

Dana Perimbangan pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp.2.130.432.992.470,- (*dua trilyun seratus tiga puluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*), dan terealisasi sebesar Rp.2.131.117.520.091,- (*dua trilyun seratus tiga puluh satu milyar seratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh ribu sembilan puluh satu rupiah*) atau melampaui target sebanyak Rp.684.527.621,- (*enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*).

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp.124.136.300.000,- (*seratus dua puluh empat milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*), dan terealisasi sebesar Rp.123.596.400.000,- (*seratus dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*) atau tercapai 99,57%



2. Belanja Daerah

Mengingat potensi pendapatan dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, namun Belanja Daerah pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp.2.949.643.677.710,28 (*dua trilyun sembilan ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh koma dua puluh delapan rupiah*), dan terserap sebanyak Rp.2.451.359.511.433,- (*dua trilyun empat ratus lima puluh satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada tahun 2021 sebesar Rp.1.962.849.239.087,28,- (*satu trilyun sembilan ratus enam puluh dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh koma dua puluh delapan rupiah*), dan terealisasi sebanyak Rp.1.576.325.205.324,- (*satu trilyun lima ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah*). Atau terserap 80,31%

2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp.238.674.307.650,- (*dua ratus tiga puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah*), dan terealisasi sebanyak Rp.183.640.811.349,- (*seratus delapan puluh tiga milyar enam ratus empat puluh juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*). Atau terserap 76,94%

2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp.72.557.615.273,- (*tujuh puluh dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*), dan terealisasi sebanyak Rp.18.625.036.003,- (*delapan belas milyar enam ratus*



dua puluh lima juta tiga puluh enam ribu tiga rupiah).

Atau terserap 25,67%

2.4. Belanja Transfer

Belanja Tidak Transfer pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp.675.562.515.700,- (enam ratus tujuh puluh lima milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh puluh rupiah), dan terealisasi sebanyak Rp.672.768.458.757,- (enam ratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). Atau terserap 25,67%

Untuk menjaga keseimbangan sistem penganggaran daerah langkah yang diperlukan adalah menyusun kebijakan pembiayaan daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp.440.659.044.325,28,- (*empat ratus empat puluh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima koma dua puluh delapan rupiah*).
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2021 sebanyak Rp.23.500.000.000,- (*dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah*).



Tabel 3.100.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	55	97,84	177,89	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	90,28	91,98	101,88	743.905.040.676	05.929.768.491	81,452
		Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	85	88,70	93,36	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/Paket A	98,25	91,65	93,28	50.237.726.000	43.458.335.621	86,55
								APM SD/MI/Paket A	87,64	83,91	95,74			
								Angka Pputus Sekolah (APS) SD/MI	0,01	0,02	200,00			
								Angka Kelulusan SD/MI	99,07	100	100,94			
								APKSMP/MTs/paket B	91,73	98,62	107,51			
								APM SMP/MTs/Paket B	69,02	72,11	104,48			
								Angka Melanjutka	89,08	91,98	103,26			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								n (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK						
								Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	0,03	0,05	166,67			
								Angka kelulusan SMP/MTs	98,19	100	101,84			
								Jumlah anak umur 0 6 tahun yang mengikuti program PAUD	44244	43158	97,55			
								APK PAUD	93,19	79,4	85,20			
								Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,75	99,6	99,85			
							Pengembangan Kurikulum	Angka Pputus Sekolah (APS) SD/MI	0,01	0,02	200,00	370.526.000	242.466.350	65,44
								Angka Kelulusan SD/MI	99,07	100	100,94			
								Angka Melanjutka	89,08	91,98	103,26			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								n (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK						
								Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	0,03	0,05	166,67			
								Angka kelulusan SMP/MTs	98,19	100	101,84			
								Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,75	99,6	99,85			
							Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	88,97	89,79	100,92	34.276.430.000	33.045.274.950	96,41
								Persentase Kepala Sekolah SD/MI yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	99,07	98,97	99,90			
								Persentase Kepala Sekolah	94,35	99,22	105,16			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								SMP/MTs yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah						
								Rasio guru terhadap murid jenjang SD/MI	01:15	01:13	97,33			
								Rasio guru terhadap murid jenjang SMP/MTs	01:15	01:15	100,00			
							Pengembangan Bahasa dan Sastra	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,75	99,6	99,85	25.000.000	22.810.000	91,24
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	Kasus kematian Ibu	Kasus	14	45	321,43	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase urusan pemerintahan bidang kesehatan yang ditunjang	100	100	100,00	348.772.956.771	266.875.180.065	76,52
		Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,07	10,54	104,67	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan	100	77	77,00	162.830.335.599	101.301.009.001	62,21

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	perorangan dan masyarakat terpenuhi						
		Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,61	1,56	96,89	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	90	99	110,00	20.679.904.277	12.017.290.190	58,11
		Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,7	0,93	132,86	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	90	92	102,22	625.009.000	370.856.275	59,34
							Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100	100	100,00	229.152.000	161.534.900	70,49
3	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitannya oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,62	76,86	100,31								

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	89	97,27	109,29	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga bencana yang ditunjang	100	100	100	6.234.634.822	5.726.726.342	91,85
		Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	100	100	100	Pemberdayaan Sosial	Persentase keluarga miskin, penyandang disabilitas dan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten (TKSK, Pendamping PKH, Karang Taruna, CSR dan lembaga kesejahteraan	99	99	100	1.181.373.608	1.074.832.862	90,98

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								an sosial) yang diberdayakan.						
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	12,9	13,19	102,24	Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandang pengemis di luar Panti dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	30	30	100	2.218.145.128	1.992.210.739	89,81
							Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat layanan rehaabilitasi sosial	30	30	100	185.144.000	180.409.822	97,44
							Penanganan Bencana	Persentase korban bencana	30	30	100	763.730.000	721.410.950	94,46

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								dan kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus						
							Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase peziarah yang mendapat pelayanan di taman makam pahlawan nasional Kabupaten	30	30	100	35.000.000	30.956.535	88,45
5	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR	Angka	2,1	1,6	76,19	Pengendalian Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,9	-4,12	-457,78	342.190.000	328.633.275	96,04
							Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Peserta KB Aktif	70	70,3	100,43	8.423.530.270	3.861.288.476	45,84
							Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga Pra Sejahtera	28	Na	Na	840.120.236	446.743.556	53,18
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10	17	170,00	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase meningkatnya hasil pembinaan	5	5	100	308.151.000	296.588.152	96,25



No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemuda dan Olahraga.							kepemudaa n						
		Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	28	560,00	Pengembang an Kapasitas Daya Saing Keolahragaa n	Persentase meningkat nya hasil pembinaan dan pengemban gan olahraga	10	10	100	1.291.527.00 0	1.284.395.1 52	99,45
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggar aan Pagelaran Seni dan Budaya	%	5	16,67	333,33	Pengembang an Kebudayaan	Persentase kebudayaa n yang dikembang kan	100	100	100,0 0	702.718.000	698.376.165	99,38
		Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10	0	0	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarika n	100	100	100,0 0	126.500.000	123.903.908	97,95
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Persentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5	-83	-1667	Pembinaan Perpustakaa n	Persentase kenaikan kunjungan masyarakat	1	-83	-8334	61.159.680	154.149.453	95,65

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	87,36	78,06	89,35	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota	100	100	100	5.397.083.500	4.950.108.269	91,72
							Kepegawaian Daerah	Persentase layanan sumber daya aparatur	96	95,11	99,07	1.803.207.510	1.441.765.942	79,96
								persentase pembinaan disiplin ASN	100	103,03	103,03			
								Persentase informasi kepegawaian yang akurat	100	101,2	101,2			
								Persentase pengembangan aparatur	100	90,93	90,93			
							Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti Diklat	100	155,86	155,86	1.297.900.490	1.293.183.045	99,64
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP (4)	WTP (4)	100,00	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah	100	100	100	20.776.592.974	18.158.405.107	87,40

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								an Kabupaten /Kota						
							Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan keuangan pemerintah Daerah disusun tepat waktu	2	2	100	751.569.543. 704	93.899.852. 410	92,33
								Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaa an APBD yang disampaika n paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir	5	5	100			
								Persentase penyerapa n belanja Daerah	84	84,53	100,6 3			
							Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tanah Pembab yang bersertifika t	53,59	59,94	111,8 5	3.225.622.95 0	2.561.087.5 78	79,40

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kenaikan PAD	7,54	-4,44	- 58,92	3.055.846.15 3	2.186.190.0 27	71,54
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	90	81,82	90,91	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unsur pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD yang ditunjang	100	94,34	94,34	40.150.748.0 00	35.788.060. 003	89,13
							Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase DPR yang terdukung pelaksanaan tugas dan fungsinya	100	96,97	96,97	7.360.512.00 0	11.769.303. 223	67,79
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	100	100	Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	100	1.573.403.00 0	1.358.579.0 12	86,35
								Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	100			
								Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	93,49	93,49			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100	97,47	97,47			
								Persentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah	90	Na	#VALUE!			
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi dan ketepatan waktu perencanaan	100	100	100	893.079.000	757.953.294	84,87
							Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	100	1.573.403.000	1.358.579.012	86,35
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	1,68	33,60	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100	100	100	3.589.225.820	3.572.713.641	99,54
							Pengelolaan Arsip	Persentase peningkatan SKPD dan	5	2	34	8.801.000	8.738.500	99,29

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip secara standar						
							Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase kenaikan koleksi arsip terakuisisi	3	1,68	56,1	95.323.840	93.326.833	97,91
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	100	100	100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota	100	100	100,00	4.280.486.989	3.744.553.205	87,48
							Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	0				
							Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa profesional, transparan dan akuntabel	100	100	100,00	3.918.136.966	3.416.167.404	87,19



No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata Kader Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	100	85,50	85,50	685.934.800	652.986.640	95,20
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Maturitas SPIP	Tingkat	3	3	100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase urusan bidang pemerintahan yang ditunjang	100	100	100	11.464.121.000	8.957.999.000	78,14
		Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3	3	100	Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan kapabilitas APIP	3	3	100	916.015.000	324.527.000	35,43
							Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan level maturitas SPIP	3	3	100	2.791.273.000	1.841.674.000	65,98
		Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	68(B)	62,07 (B)	88,67	Administrasi Umum Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	95,45	95,45	2.007.876.027	1.780.386.925	88,67

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,05	3,2109	103,58	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,1	3,2109	103,58	224.429.436	205.240.220	91,45
							Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dukungan pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100	90,07	90,07	72.204.145.442		
							Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase dukungan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	100	9.200.000		
							Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase dukungan pelaksanaan Program Pemberdayaan	100	94,93	94,93	7.334.774.903		

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Masyaraka t Desa dan Kelurahan						
							Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase dukungan pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	95,70	95,70	4.539.483.746		
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase dukungan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	81,54	81,54	779.456.700		
							Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dukungan pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	87,43	87,43	4.706.276.659		
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90	90	100	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase koordinasi penataan peraturan perundang - undangan, bantuan hukum	90	90	100,00	812.245.500	599.980.040	73,87

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								dan HAM serta pendokumentasian dan informasi produk hukum						
		Indeks Kabupaten peduli HAM	%	90	95,7	106,33								
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90	96	106,67	Administrasi Umum (Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) Kab/Kota	Persentase urusan pemerintah daerah bagian pembangunan	100	90	90,00	1.392.445.812	809.102.781	58,11
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	100	100	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pengadaan barang dan jasa	100	100	100	447.964.000	380.592.000	84,96
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	100	100	100	Administrasi Umum (Penunjang Urusan Pemerintahan)	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi keprotokolan dan	100	100	100	5.127.119.000	4.812.807.000	93,87

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							n Daerah) Kab/Kota	komunikas i pimpinan						
		Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	100	100	100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase urusan Pemerintah Daerah Dinas Komonikasi Informatika yang ditunjang	100	100	100	7.513.091.153	6.643.885.534	88,43
		Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	100	100	100	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi Pemerintah Daerah Dinas Komonikasi Informatika yang sampai ke publik	56,5	262,2	464,07	1.069.787.000	959.560.615	89,70
							Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase persediaan infrastruktur teknologi dan komonikasi	80	99	124	4.735.640.900	4.661.718.652	98,44
							Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik Dinas Informatika yang tersedia	100	100	100,00	57.996.000	50.266.000	86,67
							Penyelenggaraan Persandian Untuk	Persentase pengamanan informasi persandian	27	121	448,15	88.040.000	86.395.650	98,13

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pengamanan Informasi	yang terimplemen tasi						
21	Meningkatnya fasilitas dan pengawalan kebijakan bidang perekonomian	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)	2,58	73,71	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah Daerah	100	100	100			
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	Persentase keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95	95	100	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	2.960.926.412	2.707.077.613	91,43
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,4	10,87	86,27	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi tembakau rajang	1092	1567,45	143,54	1.376.335.135	1.165.837.700	84,71
								Produksi tembakau asepan	946	1270,83	134,34			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas padi	64,01	65,58	102,45	8.707.076.400	8.428.086.500	96,80
							Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	populasi ternak sapi	117.492	112.517	95,77	572.935.200	451.112.472	78,74
								produksi daging sapi	3.211	2.268	70,63			
							Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Produktivitas padi	64,01	65,58	102,45	365.730.962	330.684.628	90,42
							Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani madya dan utama	34	8,33	24,50	763.220.000	513.499.275	67,28
							Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	537	311,82	58,07	20.000.000	18.020.000	90,1
							Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	28315	30.109,31	106,34	1.498.280.000	1.390.347.834	92,80
							Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan tabur benih ikan (<i>Restocking</i>) perairan umum	8	8	100,00	37.000.000	33.380.000	90,22
							Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi ikan	20,41	20,28	99,36	56.250.000	45.729.900	81,30

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota	100	80	80	34.377.081.630	27.734.986.961	80,68
							Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	93,25	91	97,59	667.450.000	528.211.900	79,14
							Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	93,25	91	97,59	756.501.136	630.964.150	83,41
							Penanganan Kerawanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	93,25	91	97,59	31.000.000	28.859.800	93,10
							Pengawasan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	93,25	91	97,59	40.000.000	24.974.300	62,44
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan	Persentase desa yang memiliki LEM, LED	%	58	57,69	99,47	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan	100	100	100,00	4.280.486.989	3.744.553.205	87,48

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	dan Posyantek					Kabupaten/ Kota	Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota						
							Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	0				
							Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa profesional, transparan dan akuntabel	100	100	100,00	3.918.136.966	3.416.167.404	87,19
							Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata Kader Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	100	85,50	85,50	685.934.800	652.986.640	95,20

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25	3,22	12,87	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase urusan pemerintah bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga yang ditunjang	100	100	100,00	6.058.958.782	5.464.213.506	90,18
							Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase meningkatnya produktivitas nilai tambah dan daya saing sektor pariwisata	16	16	100,00	3.290.264.984	3.125.755.478	95,00
							Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya kunjungan, lama tinggal dan tingkat belanja wisatawan	5	5	100,00	100.000.000	98.593.810	98,59
							Pengembang an Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual							

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pengembang an Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas daya manusia dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang terlaksana	5	5	100,00	521.302.016	485.130.700	93,06
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,38	19,98	103,10	Pnunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota	100			20.747.679.575		
		Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	15	12	80	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		0					
							Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	80,97	39,74	49,08	400.000.000	122.554.636	30,64
								Persentase pertumbuhan koperasi	0,45	0,14	31,11			
							Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi							

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengurus koperasi terlatih	25,84	25,84	100,00	390.304.000	353.647.900	90,61
							Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi							
							Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPIPIRT dan halal	0,647	0,16	24,73	40.000.000	27.392.500	68,48
							Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	0,5	0,1	20,00	150.000.000	126.079.000	84,05
							Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar pemda yang direvitalisasi	4,00	2,00		2.776.461.000	2.540.810.300	91,51
								Persentase PKL dan asongan yang terbina	73,16	4,95				
							Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pendapatan pasar terhadap PAD	1,59	1,98		30.000.000	23.512.100	78,37
							Pengembangan Ekspor							

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase cakupan pelayanan alat UTTP (Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya)	75	62,11	82,81	185.000.000	152.498.400	82,43
							Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi produk UMKM	70	17,00		40.000.000		-
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase inovasi yang diterapkan	%	100	85,3	85,3	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti lomba Krenova	35	35	100	452.710.000	417.169.664	92,15
								Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	22	29	131,82			
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA) :					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota	80	84	105	2.932.708.962	2.434.429.107	83,01

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		PMDN	%	483	8	1,66	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi	80	0	0	-	-	
		PMA	%	294	231	78,57	Promosi Penanaman Modal	Persentase Potensi investasi yang siap ditawarkan	80	94	117,5	241.020.000	225.824.000	93,70
		Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA) :					Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pelayanan penanaman modal	80	80	100	120.285.000	96.219.500	79,99
		PMDN	%	2,5	97	3880	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian penanaman modal	80	66	82,5	558.567.000	368.589.000	65,99
		PMA	%	2,55	319	12509,80	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	80	81	101,25	100.000.000	80.619.000	80,62
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,08	0,76	70,37	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah	100	100	100	4.993.356.210	4.276.504.863	85,64

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								an Kabupaten /Kota						
		Angka partisipasi angkatan kerja	%	69	68,94	126,00	Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kesesuaian Renja dengan RKT	80	0	0	135.000.000	108.394.300	80,29
							Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase jumlah yang mendapat pelatihan dengan pendaftar pelatihan	75	80	106,67	1.180.933.200	953.908.350	80,78
							Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	70	15,87	22,67	91.610.000	48.361.000	52,79
							Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian hubungan industrial	90	100	111,11	349.410.000	177.771.400	50,88
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	88,2	59,91	67,93								
31	Meningkatnya nilai tambah, sektor	Kontribusi sektor	%	35,2	35,2	100	Perencanaan dan	Persentase perencanaan	4	5,8	145	1.945.333.000	1.470.374.600	75,58

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	industri terhadap PDRB					Pembanguna n Industri	n pembangu nan industri						
		Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	7,5	7,9	105,33								
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	40,81	40,38	98,95	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuha n kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100,0 0	56.994.898.6 58	50.739.784. 648	89,03
							Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pengelolaa n sumber daya air yang terbangun	100	100	100,0 0	14.227.331.0 00	12.052.283. 717	84,71
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	<i>Persentase sistem penyediaan air minum yang memadai</i>	100	92,5	92,50	4.461.094.25 4	3.777.359.3 00	84,67
							Pengembang an Sistem dan Pengelolaan Persampaha n Regional	persentase layanan pengelolaa n persampaha n	17,92	17,92	100,0 0	15.432.879.8 60	13.991.761. 718	90,66
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase layanan air limbah IPLT	98,12	85,86	87,51	200.000.000	185.682.500	92,84

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang memadai	100	100	100,00	2.862.146.000	2.737.992.437	95,66
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	100	0	0			#DIV/0!
							Pengembangan Permukiman							
							Penataan Bangunan Gedung	Persentase penataan bangunan gedung	100	100	100,00	50.888.932.300	47.838.969.471	94,01
							Penataan Bangunan dan Lingkungannya	persentase cakupan perencanaan penataan ruang	100	0	0,00			
							Penyelenggaraan Jalan	persentase jalan dalam kondisi mantap	86,52	86,52	100,00	76.094.271.000	53.769.494.429	70,66
							Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan dan pengembangan kualitas jasa konstruksi	100	100	100,00	10.000.000	7.445.000	74,45

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraa n angkutan	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubung an	Tingkat	57,52	87,01	151,27	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase urusan Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan yang ditunjang	100	91,67	91,67	6.673.444.037	5.908.445.346	88,54
							Penyelenggar aan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat pelayanan infrastruktur perhubung an	57,52	87,01	151,27	2.586.940.000	2.490.117.313	96,26
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Indeks	74,4	74,4	100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuha n Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota	100	100	100,00	8.986.500.000	7.507.115.361	83,54
							Pengembang an Perumahan	Persentase pengembangan perumahan Kabupaten Klaten	100	100	100,00	942.900.000	147.685.921	15,66
							Kawasan Permukiman	Persentase penataan kawasan kumuh	100	0,14	0,14	19.900.000	2.590.000	13,02
							Perumahan dan Kawasan	Persentase rumah tidak layak	94,03	97	103,16	2.809.017.000	2.704.530.000	96,28

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Permukiman Kumuh	huni yang tertangani						
							Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perentase prasarana sarana dan utilitas umum terbangun (lokasi perumahan terbangun)	100	100	100,00	268.190.000	99.628.520	37,15
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	%	80	80,50	100,63	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang	100	100	100,00	2.115.000.000	1.487.918.691	70,35
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	40,46	55,9	138,16	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota	100	100	100	3.818.415.454	3.327.292.914	87,14
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,46	84,95	100,58	Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100	0	0	0	0	0

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Indeks Tutupan Vegetasi (lahan)	Indeks	83,3	42,54	51,07	Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air	100	100	100	1.530.687.000		96,17
								Cakupan pemantauan kualitas udara	100	100	100			
								Presentase kampung iklim yang terbentuk	20	20	100			
							Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH publik yang dikelola dengan baik	100	100	100	607.299.000		94,46
							Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3	100	100	100	1.576.000.000		84,01
							pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	100	100	100	150.000.000		85,44

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Lingkungan Hidup (PPLH)	yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota						
							Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100	0	0	-	-	0,00
								Persentase saka kalpataru yang dibina	100	0	0	0	0	0
							Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat /Sekolah/ Dunia	3	3	100	277.056.500	236.935.999	85,52

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten						
								Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten	100	100	100			
							Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani	100	0	0	0	0	0
							Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani	74,09	61	82,33	4.603.789.280	4.436.287.163	96,36
								Persentase jumlah sampah yang berkurang	26	27,14	104,38			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan risiko bencana	Kelas Indeks Kapasitas Bencana	Kelas Indeks	Sedang (119)	Sedang (99,24)	83,39	Penanggulangan Bencana	Terwujudnya pengurangan kerentanan risiko bencana	0,92	0,92	100	2.622.139.400	2.266.493.856	86,44
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Indeks Demokrasi	Indeks	75,7	75,43	99,64	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota	100	100	100	2.903.620.641	2.002.461.684	68,96
							Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase urusan bidang ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang dilaksanakan di daerah	100	100	100	41.260.000	35.181.000	85,27
							Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui	Persentase peran partai politik yang	100	100	100	1.100.957.700	1.100.047.500	99,92

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	didukung daerah						
							Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	100	100	100	427.500.000	399.861.000	93,53
							Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase ketahanan ekonomi sosial masyarakat yg dibina dan dikembangkan di daerah	100	100	100	42.150.000	42.144.400	99,99
							Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase pelaksanaan kualitas dan fasilitas penanganan konflik di daerah	100	100	100	292.470.140	186.193.900	63,66
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan	Klpk	100	85,50	85,50	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan	Rata-rata Kader Lembaga Kemasyarakatan dan	100	85,50	85,50	685.934.800	652.986.640	95,20

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)					Masyarakat Hukum Adat	kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)						
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Indeks Ketertiban Masyarakat	Indeks	100	100	100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota	100	84,1	84,1	7.115.489.685	6.238.882.377	87,68
							Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum yang terkondisikan	100	97,9	97,9	2.816.256.000	2.737.935.102	97,22
							Penanggulangan Bencana	Cakupan penanganan bencana yang tertangani	100	100	100	31.214.000	31.214.000	100,00
							Pencegahan, Penanggulangan Penyelamata	Persentase penanggulangan kebakaran	100	99	99	840.917.000	836.022.676	99,42

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							n Kebakaran dan Non Kebakaran	yang tertangani						
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,37	69,42	114,99	Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	96,72		0,00	25.000.000	24.814.666	99,26
		Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nidya (750)	Madya (650)	86,67		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	60,37	69,42	114,99			
							Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	1,35	0,0036	0,27	203.399.000	26.928.750	13,24
							Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio kekerasan terhadap perempuan	1,35	0,0036	0,27	45.000.000	44.999.736	100,00
							Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang mampu mengelola data dan informasi gender dan anak yang berkelanjutan	30	30	100,00	12.953.436	12.953.436	100,00
							Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tahapan Kabupaten Layak Anak	Nidya (750)	Madya (650)	86,67	156.866.564	156.675.500	99,88
							Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan	4,8	0,0075	0,16	238.684.000	62.061.350	26,00



No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								terhadap anak						
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	Indeks	81,08	80,65	99,47	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan	57,52	87,01	151,27	2.586.940.000	2.490.117.313	96,26
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan	Indeks	80	81,2	101,50	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	80	81	101,25	100.000.000	80.619.000	80,62
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks	Sdh		91,50	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil terpenuhi	100	100	100,00	8.821.917.601	7.288.073.726	82,61
							Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk	100	100	100,00	605.708.000	586.385.920	96,81
							Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil terlayani	100	100	100,00	266.883.000	257.189.114	96,37

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Pencapaian Indikator Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Satuan	Renca na	Realisa si	%		Indikator	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		0	0				
							Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan profil kependudukan	100	100	100,00	64.000.000	60.525.250	94,57
45	Pengembangan ketransmigrasian	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	40	0	0	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase jumlah masyarakat yang disosialisasikan terhadap program Trasmigrasi	40	0	0	105.000.000	21.332.100	20,32
Jumlah Anggaran Prioritas I (program untuk membiayai visi dan misi Bupati)									210.441	204.171	97,16	2.801.619.326.546	2.237.876.356.736	79,88
Jumlah Belanja Operasi												1.962.849.239.087,28	1.576.325.205.324	80,31
Jumlah Belanja Modal												238.674.307.650	183.640.811.349	76,94
Jumlah Belanja Tidak Terduga												72.557.615.273	18.625.036.003	25,67
Jumlah Belanja Transfer												675.562.515.700	672.768.458.757	99,59
Jumlah Total Belanja Daerah									-	-	-	2.949.643.677.710,28	2.451.359.511.433	83,11



3.4 Efektifitas Sumber Daya

Untuk mengukur sejauh mana tingkat efektifitas sumber daya pelaksanaan pembangunan Daerah, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2021, diantaranya mencakup: 1) tingkat efisiensi penggunaan anggaran, dan 2) efektifitas penggunaan sumber daya aparatur. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.4.1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 ditetapkan 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 61 (enam puluh satu) indikator yang sifatnya progresif, dan 6 (enam) indikator yang sifatnya represif.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan RPJMD, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tahun 2021, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 330 program dengan 700 kegiatan dan subkegiatan 1777. Realisasi fisik tercapai 96% dari target rencana 98%. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.2.949.643.677.710,- dan terserap sebesar Rp.2.493.406.881.542,- (atau 84,53%). Secara rinci tingkat pencapaian efektifitas sumber daya antara sasaran dan realisasi keuangan dapat disajikan pada Tabel 3.101.

Tabel 3.101.
Tingkat Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	177,89	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	101,88	605.929.768.491	81,452	Efisiensi
		Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	93,36	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/Paket A	%	93,28	43.458.335.621	86,55	Efisiensi
						APM SD/MI/Paket A	%	95,74			
						Angka Pputus Sekolah (APS) SD/MI	%	200,00			
						Angka Kelulusan SD/MI	%	100,94			
						APKSMP/MTs/paket B	%	107,51			
						APM SMP/MTs/Paket B	%	104,48			
						Angka Melanjutkan	%	103,26			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						(AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK					
						Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	%	166,67			
						Angka kelulusan SMP/MTs	%	101,84			
						Jumlah anak umur 0 6 tahun yang mengikuti program PAUD	%	97,55			
						APK PAUD	%	85,20			
						Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,85			
					Pengembangan Kurikulum	Angka Pputus Sekolah (APS) SD/MI	%	200,00	242.466.350	65,44	
						Angka Kelulusan SD/MI	%	100,94			
						Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	103,26			
						Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	%	166,67			
						Angka kelulusan SMP/MTs	%	101,84			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,85			
					Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	100,92	33.045.274.950	96,41	
						Persentase Kepala Sekolah SD/MI yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	99,90			
						Persentase Kepala Sekolah SMP/MTs yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	105,16			
						Rasio guru terhadap murid jenjang SD/MI	%	97,33			
						Rasio guru terhadap murid jenjang SMP/MTs	%	100,00			
					Pengembangan Bahasa dan Sastra	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,85	22.810.000	91,24	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	Kasus kematian Ibu	Kasus	321,43	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan pemerintahan bidang kesehatan yang ditunjang	%	100,00	266.875.180.065	76,52	Efisiensi
		Angka Kematian Bayi	Angka	104,67	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat terpenuhi	%	77,00	101.301.009.001	62,21	Tidak efisiensi
		Angka kematian Balita	Angka	96,89	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%	110,00	12.017.290.190	58,11	Efisiensi
		Prevalensi gizi buruk (BB/U)	Angka	132,86	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	%	102,22	370.856.275	59,34	Efisiensi
					Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	100,00	161.534.900	70,49	Efisiensi

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
3	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	Usia Harapan Hidup	Th	100,31							
4	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	109,29	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga bencana yang ditunjang	%	100	5.726.726.342	91,85	Efisiensi
		Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	100	Pemberdayaan Sosial	Persentase keluarga miskin, penyandang disabilitas dan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten (TKSK, Pendamping PKH, Karang Taruna, CSR dan lembaga	%	100	1.074.832.862	90,98	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						kesejahteraan sosial) yang diberdayakan.					
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	102,24	Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandang pengemis di luar Panti dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	%	100	1.992.210.739	89,81	
					Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat layanan rehaabilitasi sosial	%	100	180.409.822	97,44	
					Penanganan Bencana	Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus	%	100	721.410.950	94,46	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase peziarah yang mendapat pelayanan di taman makam pahlawan nasional Kabupaten	%	100	30.956.535	88,45	
5	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR	%	76,19	Pengendalian Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	-457,78	328.633.275	96,04	Efisiensi
					Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Peserta KB Aktif	%	100,43	3.861.288.476	45,84	
					Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga Pra Sejahtera	%	Na	446.743.556	53,18	
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	170,00	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase meningkatnya hasil pembinaan kepemudaan	%	100	296.588.152	96,25	Efisiensi
		Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	560,00	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase meningkatnya hasil pembinaan dan pengembangan olahraga	%	100	1.284.395.152	99,45	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	333,33	Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	%	100,00	698.376.165	99,38	Efisiensi
		Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	0	0	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	100,00	123.903.908	97,95	Tidak efisiensi
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Persentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	-1667	Pembinaan Perpustakaan	Persentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	-8334	154.149.453	95,65	Tidak efisiensi
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	89,35	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	100	4.950.108.269	91,72	Efisiensi
					Kepegawaian Daerah	Persentase layanan sumber daya aparatur	%	99,07	1.441.765.942	79,96	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						persentase pembinaan disiplin ASN	%	103,03			
						Persentase informasi kepegawaian yang akurat	%	101,2			
						Persentase pengembangan aparatur	%	90,93			
					Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti Diklat	%	155,86	1.293.183.045	99,64	
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	100,00	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	100	18.158.405.107	87,40	Efisiensi
					Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan keuangan pemerintah Daerah disusun tepat waktu	%	100	693.899.852.410	92,33	
						Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan paling lambat 6 bulan setelah	%	100			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						tahun anggaran berakhir					
						Persentase penyerapan belanja Daerah	%	100,63			
					Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tanah Pemkab yang bersertifikat	%	111,85	2.561.087.578	79,40	
					Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kenaikan PAD	%	-58,92	2.186.190.027	71,54	
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	90,91	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unsur pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD yang ditunjang	%	94,34	35.788.060.003	89,13	Efisiensi
					Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase DPR yang terdukung pelaksanaan tugas dan fungsinya	%	96,97	11.769.303.223	67,79	
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	%	100	1.358.579.012	86,35	Efisiensi
						Tersedianya dokumen RKPD	%	100			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						yang ditetapkan dengan Perkada					
						Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	93,49			
						Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	%	97,47			
						Persentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah	%	#VALUE!			
					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi dan ketepatan waktu perencanaan	%	100	757.953.294	84,87	
					Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	%	100	1.358.579.012	86,35	
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	33,60	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	%	100	3.572.713.641	99,54	Tidak efisiensi
					Pengelolaan Arsip	Persentase peningkatan SKPD dan	%	34	8.738.500	99,29	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip secara standar					
					Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase kenaikan koleksi arsip terakuisisi	%	56,1	93.326.833	97,91	
							%				
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	100,00	3.744.553.205	87,48	efisiensi
					Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	%				
					Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa profesional, transparan dan akuntabel	%	100,00	3.416.167.404	87,19	
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata Kader Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam	%	85,50	652.986.640	95,20	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)					
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Level	100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan bidang pengawasan yang ditunjang	%	100	8.957.999.000	78,14	Efisiensi
		Level Kapabilitas APIP	Level	100	Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan kapabilitas APIP	%	100	324.527.000	35,43	
					Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan level maturitas SPIP	%	100	1.841.674.000	65,98	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Skor	88,67	Administrasi Umum Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,45	1.780.386.925	88,67	
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD)	Skor	103,58	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	103,58	205.240.220	91,45	Efisiensi

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	90,07			
					Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase dukungan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100			
					Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase dukungan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	94,93			
					Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase dukungan pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	95,70			
					Penyelenggaraan Urusan	Persentase dukungan	%	81,54			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Pemerintahan Umum	pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
					Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dukungan pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	87,43			
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	100	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase koordinasi penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM serta pendokumentasian dan informasi produk hukum	%	100,00	599.980.040	73,87	Efisiensi
		Indeks Kabupaten peduli HAM	%	106,33			%				

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	106,67	Administrasi Umum (Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) Kab/Kota	Persentase urusan pemerintah daerah bagian pembangunan	%	90,00	809.102.781	58,11	Efisiensi
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pengadaan barang dan jasa	%	100	380.592.000	84,96	Efisiensi
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	100	Administrasi Umum (Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) Kab/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi keprotolan dan komunikasi pimpinan	%	100	4.812.807.000	93,87	Efisiensi
		Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan Pemerintah Daerah Dinas Komonikasi Informatika yang ditunjang	%	100	6.643.885.534	88,43	
		Persentase pelayanan keprotokolan	%	100	Pengelolaan Informasi dan	Persentase informasi Pemerintah	%	464,07	959.560.615	89,70	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
		kegiatan kepala daerah			Komunikasi Publik	Daerah Dinas Konomikasi Informatika yang sampai ke publik					
					Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase persediaan infrastruktur teknologi dan komonikasi	%	124	4.661.718.652	98,44	
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik Dinas Informatika yang tersedia	%	100,00	50.266.000	86,67	
					Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase pengamanan informasi persandian yang terimplementasi	%	448,15	86.395.650	98,13	
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan bidang perekonomian	Tingkat Inflasi YoY	%	73,71	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah Daerah	%	100			
							%				
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	Persentase keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	100	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	2.707.077.613	91,43	Efisiensi

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
							%				
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	86,27	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi tembakau rajang	%	143,54	1.165.837.700	84,71	Efisiensi
						Produksi tembakau asepan	%	134,34			
					Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas padi	%	102,45	8.428.086.500	96,80	
					Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	populasi ternak sapi	%	95,77	451.112.472	78,74	
						produksi daging sapi	%	70,63			
					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Produktivitas padi	%	102,45	330.684.628	90,42	
					Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani madya dan utama	%	24,50	513.499.275	67,28	
					Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	%	58,07	18.020.000	90,1	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	%	106,34	1.390.347.834	92,80	
					Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan tabur benih ikan (Restocking) perairan umum	%	100,00	33.380.000	90,22	
					Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi ikan	%	99,36	45.729.900	81,30	
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	80	27.734.986.961	80,68	
					Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	%	97,59	528.211.900	79,14	
					Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	%	97,59	630.964.150	83,41	
					Penanganan Kerawanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	%	97,59	28.859.800	93,10	
					Pengawasan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	%	97,59	24.974.300	62,44	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	%	99,47	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	100,00	3.744.553.205	87,48	Efisiensi
					Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	%				
					Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa profesional, transparan dan akuntabel	%	100,00	3.416.167.404	87,19	
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata Kader Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	85,50	652.986.640	95,20	
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai	Persentase Peningkatan	%	-368,70	Penunjang Urusan	Persentase urusan	%	100,00	5.464.213.506	90,18	Tidak efisiensi

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
	Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	PAD dari sektor Pariwisata			Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	pemerintah bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga yang ditunjang					
					Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase meningkatnya produktivitas nilai tambah dan daya saing sektor pariwisata	%	100,00	3.125.755.478	95,00	
					Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya kunjungan, lama tinggal dan tingkat belanja wisatawan	%	100,00	98.593.810	98,59	
					Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		%				
					Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas daya manusia dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang terlaksana	%	100,00	485.130.700	93,06	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	103,10	Pnunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%				Efisiensi
		Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	80	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		%				
					Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	49,08	122.554.636	30,64	
						Persentase pertumbuhan koperasi	%	31,11			
					Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		%				
					Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengurus koperasi terlatih	%	100,00	353.647.900	90,61	
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		%				
					Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPIPIRT dan halal	%	24,73	27.392.500	68,48	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	%	20,00	126.079.000	84,05	
					Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar pemda yang direvitalisasi	%		2.540.810.300	91,51	
						Persentase PKL dan asongan yang terbina	%				
					Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pendapatan pasar terhadap PAD	%		23.512.100	78,37	
					Pengembangan Ekspor		%				
					Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase cakupan pelayanan alat UTPP (Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya)	%		152.498.400	82,43	
					Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi produk UMKM	%			-	
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase inovasi yang diterapkan	%	85,3	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti lomba Krenova	%	100	417.169.664	92,15	Tidak Efisiensi

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	%	131,82			
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	105	2.434.429.107	83,01	Tidak Efisiensi
		PMDN	%	1,66	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi	%	0	-		
		PMA	%	78,57	Promosi Penanaman Modal	Persentase Potensi investasi yang siap ditawarkan	%	117,5	225.824.000	93,70	
		Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):			Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pelayanan penanaman modal	%	100	96.219.500	79,99	Efisiensi
		PMDN	%	3880	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian penanaman modal	%	82,5	368.589.000	65,99	
		PMA	%	12509,80	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi	%	101,25	80.619.000	80,62	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						penanaman modal					
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	Rasio penduduk yang bekerja	%	70,37	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	100	4.276.504.863	85,64	Efisiensi
		Angka partisipasi angkatan kerja	%	126,00	Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kesesuaian Renja dengan RKT	%	0	108.394.300	80,29	
					Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase jumlah yang mendapat pelatihan dengan pendaftar pelatihan	%	106,67	953.908.350	80,78	
					Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	22,67	48.361.000	52,79	
					Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian hubungan industrial	%	111,11	177.771.400	50,88	
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS	%	67,93							

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
		Ketenagakerjaan									
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	100	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase perencanaan pembangunan industri	%	145	1.470.374.600	75,58	Efisiensi
		Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	105,33							
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	98,95	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	50.739.784.648	89,03	Efisiensi
					Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pengelolaan sumber daya air yang terbangun	%	100,00	12.052.283.717	84,71	
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase sistem penyediaan air minum yang memadai	%	92,50	3.777.359.300	84,67	
					Pengembangan Sistem dan Pengelolaan	persentase layanan	%	100,00	13.991.761.718	90,66	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Persampahan Regional	pengelolaan persampahan					
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase layanan air limbah IPLT	%	87,51	185.682.500	92,84	
						<i>Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang memadai</i>	%	100,00	2.737.992.437	95,66	
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	<i>Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase</i>	%	0		#DIV/0!	
					Pengembangan Permukiman		%				
					Penataan Bangunan Gedung	<i>Persentase penataan bangunan gedung</i>	%	100,00	47.838.969.471	94,01	
					Penataan Bangunan dan Lingkungannya	persentase cakupan perencanaan penataan ruang	%	0,00			
					Penyelenggaraan Jalan	persentase jalan dalam kondisi mantap	%	100,00	53.769.494.429	70,66	
					Pengembangan Jasa Konstruksi	<i>Persentase peningkatan dan pengembangan kualitas jasa konstruksi</i>	%	100,00	7.445.000	74,45	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Skor	151,27	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan yang ditunjang	%	91,67	5.908.445.346	88,54	Efisiensi
					Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan	%	151,27	2.490.117.313	96,26	
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks	100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	100,00	7.507.115.361	83,54	Efisiensi
					Pengembangan Perumahan	Persentase pengembangan perumahan Kabupaten Klaten	%	100,00	147.685.921	15,66	
					Kawasan Permukiman	Persentase penataan kawasan kumuh	%	0,14	2.590.000	13,02	
					Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	103,16	2.704.530.000	96,28	
					Peningkatan Prasarana,	Perentase prasarana	%	100,00	99.628.520	37,15	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	sarana dan utilitas umum terbangun (lokasi perumahan terbangun)					
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	%	100,63	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang	%	100,00	1.487.918.691	70,35	
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	138,16	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	100	3.327.292.914	87,14	Efisiensi
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	100,58	Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	0	0	0	
		Indeks Tutupan Vegetasi (lahan)	Indeks	51,07	Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air	%	100	1.472.109.724	96,17	
						Cakupan pemantauan kualitas udara	%	100			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						Presentase kampung iklim yang terbentuk	%	100			
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH publik yang dikelola dengan baik	%	100	573.660.122	94,46	
					Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3	%	100	1.323.964.000	84,01	
					pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	128.156.749	85,44	
					Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan	Persentase kelompok masyarakat	%	0	-	0,00	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	(KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup					
					Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat /Sekolah/Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	%	100	236.935.999	85,52	
						Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten	%	100			
					Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani	%	82,33	4.436.287.163	96,36	
						Persentase jumlah sampah yang berkurang	%	104,38			



No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan risiko bencana	Kelas Indeks Kapasitas Bencana	Indeks	83,39	Penanggulangan Bencana	Terwujudnya pengurangan kerentanan risiko bencana	%	100	2.266.493.856	86,44	Tidak Efisien
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Indeks Demokrasi	Indeks	99,64	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	100	2.002.461.684	68,96	Esiensi
					Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase urusan bidang ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang dilaksanakan di daerah	%	100	35.181.000	85,27	
					Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peran partai politik yang didukung daerah	%	100	1.100.047.500	99,92	



No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	100	399.861.000	93,53	
					Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase ketahanan ekonomi sosial masyarakat yg dibina dan dikembangkan di daerah	%	100	42.144.400	99,99	
					Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase pelaksanaan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik di daerah	%	100	186.193.900	63,66	
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	85,50	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata Kader Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	85,50	652.986.640	95,20	Tidak Efektif

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Indeks Ketertiban Masyarakat	Indeks	100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	84,1	6.238.882.377	87,68	Efisiensi
					Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum yang terkondisikan	%	97,9	2.737.935.102	97,22	
					Penanggulangan Bencana	Cakupan penanganan bencana yang tertangani	%	100	31.214.000	100,00	
					Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase penanggulangan kebakaran yang tertangani	%	99	836.022.676	99,42	
							%				
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	114,99	Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	%	0,00	24.814.666	99,26	Efisiensi
		Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	86,67		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	%	114,99			



No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	%	0,27	26.928.750	13,24	
					Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio kekerasan terhadap perempuan	%	0,27	44.999.736	100,00	
					Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang mampu mengelola data dan informasi gender dan anak yang berkelanjutan	%	100,00	12.953.436	100,00	
					Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tahapan Kabupaten Layak Anak	%		156.675.500	99,88	
					Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap anak	%	0,16	62.061.350	26,00	
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	Indeks	99,47	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan	%	151,27	2.490.117.313	96,26	Efisien
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Nilai Survai Kepuasan Masyarakat	Indeks	101,50	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	%	101,25	80.619.000	80,62	Efisien

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks	91,50	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil terpenuhi	%	100,00	7.288.073.726	82,61	Tidak efisien
					Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk	%	100,00	586.385.920	96,81	
					Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil terlayani	%	100,00	257.189.114	96,37	
					Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan profil kependudukan	%	100,00	60.525.250	94,57	
45	Pengembangan ketrasmigrasian	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	0	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase jumlah masyarakat yang disosialisasikan terhadap program Trasmigrasi	%	0	21.332.100	20,32	Tidak efisien

Berdasarkan Tabel 3.101, untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya dengan membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran dengan realisasi pencapaian serapan anggaran indikator kinerja program. Apabila realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran lebih besar daripada realisasi serapan anggaran pencapaian indikator kinerja sasaran, maka dinyatakan efisien. Begitu juga sebaliknya, apabila realisasi

pencapaian indikator kinerja sasaran lebih kecil daripada realisasi serapan anggaran pencapaian indikator kinerja sasaran, maka dinyatakan tidak efisiensi. Atas dasar pengukuran tersebut, dari 45 (empat puluh lima) dengan sebanyak 67 indikator sasaran diperoleh hasil yang efisiensi sebanyak 59 (atau 88,06 %) indikator dan yang tidak efisiensi sebanyak 8 (atau 11,94%) indikator.

3.4.2. Efektifitas Sumber Daya

Pengertian efektif adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); dapat membawa hasil; berhasil guna. Menurut [2], efektivitas adalah suatu keadaan dimana kemampuan suatu sistem sesuai dengan keinginan pengguna. Menurut [3] efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Menurut Richard Steer dalam [4], efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum. Efektivitas diukur dengan menggunakan standar sesuai dengan acuan Litbang Depdagri (1991) seperti pada Tabel 3.102.

Tabel 3.102

Efektifitas Sumber Daya

No	Rasio Efektifitas	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)
1	< 40	Sangat Tidak Efektif
2	40 – 59,99	Tidak Efektif
3	60 – 79,79	Efektif
4	> 80	Sangat Efektif

Sumber: Litbang Depdagri (1991).

Sehingga untuk mengukur tingkat sumber daya berdasarkan capaian indikator sasaran strategis tahun 2021 dengan mengacu Tabel 3.101 tentang Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021, dapat disajikan pada Tabel 3.103.



Tabel 3.103
Tingkat Efektifitas Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	55,00	97,84	177,89	Sangat efektif
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	95,00	88,70	93,36	Sangat efektif
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu	Kasus	14	45	321,43	Tidak efektif
		2.2	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,07	10,54	104,67	Tidak efektif
		2.3	Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,61	1,56	96,89	Efektif
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,7	0,93	132,86	Tidak efektif
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) (3.1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)/TFR	Indeks	2,10	1,6	76,19	Efektif
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitian oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	4.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,62	76,12	99,35	Sangat efektif
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	5.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	89	97,27	109,29	Sangat efektif
		5.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	100	100	100	Sangat efektif
		5.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	12,9	13,19	102,24	Tidak efektif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10	17	170,00	Sangat efektif
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	28	560,00	Sangat efektif
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	5	16,67	333,33	Sangat efektif
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10	0	0	Sangat tidak efektif
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5	-83	-1667	Sangat tidak efektif
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	87,36	78,06	89,35	Sangat efektif
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP (4)	WTP (4)	100	Sangat efektif
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	90	81,82	91,11	Sangat efektif
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	100	100	Sangat efektif
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	13.1	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	1,68	33,60	Sangat tidak efektif
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang	14.1	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang	%	100	100	100	Sangat efektif



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	profesional, transparan dan akuntabel		profesional, transparan dan akuntabel					
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP	Tingkat	3	3	100	Sangat efektif
		15.2	Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3	3	100	Sangat efektif
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	70 (BB)	62,07 (B)	88,67	Sangat efektif
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,1	3,2109	103,58	Sangat efektif
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90	100	111,11	Sangat efektif
		17.2	Indeks Kabupaten Peduli HAM	%	90	95,7	106,33	Sangat efektif
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90	96	106,667	Sangat efektif
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	100	100	Sangat efektif
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	98	98	100	Sangat efektif
		20.2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	100	100	100	Sangat efektif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	100	100	100	Sangat efektif
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)	2,58	73,71	Efektif
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95	95	100	Sangat efektif
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,6	10,87	86,27	Sangat efektif
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	%	58	57,69	99,47	Sangat efektif
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25	3,22	12,87	Sangat tidak efektif
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,38	19,98	103,10	Sangat efektif
		26.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	15	12	80	Sangat efektif
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	100	85,3	85,3	Sangat efektif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Tingkat Capaian	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):						
			PMDN	%	483	8	1,66	Sangat tidak efektif	
			PMA	%	294	231	78,57	Efektif	
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):						
			PMDN	%	2,5	97	3880,00	Sangat efektif	
			PMA	%	2,55	319	12509,80	Sangat efektif	
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,08	0,76	70,37	Efektif	
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69	86,94	126,00	Sangat efektif	
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	88,20	59,91	67,93	efektif	
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	35,2	35,2	100,00	Sangat efektif	
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	7,50	7,9	105,33	Sangat efektif	
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	40,81	40,38	98,95	Sangat efektif	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	57,52	87,01	151,27	Sangat efektif
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Indeks	74,40	74,40	100	Sangat efektif
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	80,00	80,50	100,63	Sangat efektif
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	40,46	55,9	138,16	Sangat efektif
		36.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,46	84,95	100,58	Sangat efektif
		36.3	Indeks Tutupan Vegetasi (lahan)	Indeks	58,60	42,54	51,07	Tidak efektif
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks Kapasitas Bencana	Indeks	Sedang 119	Sedang 99,24	83,39	Sangat efektif
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks Demokrasi	Indeks	75,7	75,43	99,64	Sangat efektif
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	100	85,50	85,50	Sangat efektif
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks Ketertiban Masyarakat	Indeks	100	100	100	Sangat efektif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,37	69,42	114,99	Sangat efektif
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nidya 750	Madya 650	86,67	Sangat efektif
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	Indeks	81,08	80,65	99,47	Sangat efektif
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan	Indeks	80	81,2	101,50	Sangat efektif
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks	Sdh	91,5	91,5	Sangat efektif
45	Pengembangan ketransmigrasian	45.1	Persentase Besaran Peningkatan Minat Transmigrasi	%	42,00	0	0	Sangat tidak efektif

Berdasarkan tabel 3.103 dapat disimpulkan tingkat efektifitas sumber daya, dengan perincian: 1. Sangat tidak efektif sebanyak 9 (atau 13,43%), 2. Tidak efektif sebanyak 1 (1,49%), 3. Efektif sebanyak 6 (atau 8,96%), dan 4. Sangat efektif sebanyak 51 (atau 76,12%).



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Sehingga LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2021 secara umum merupakan gambaran penyelenggaraan pemerintah berazaskan: tanggung jawab, kesinambungan dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, partisipatif, kearifan lokal dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran 67 (*enam puluh tujuh*) yang terdiri dari: 60 (*enam puluh*) indikator yang sifatnya progresif, dan 7 (*tujuh*) indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. Indikator Progresif, dengan hasil :

- a. Sebanyak 42 (empat puluh dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 62,69% dengan Kriteria **Sangat Tinggi**;
- b. Sebanyak 9 (sembilan) atau sebanyak 13,43% dengan Kriteria **Tinggi**;
- c. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 4,48% dengan kriteria **Sedang**;
- d. Sebanyak 0 (nol) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 0% dengan kriteria Rendah; dan
- e. Sebanyak 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 8,96% dengan Kriteria **Sangat Rendah**.

B. Indikator Regresif, dengan hasil :

Indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria **Tercapai (Berhasil Menekan)**, atau interval nilai realisasi kinerja skala $99,9 \leq$ sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 4,48%, diantaranya:

1. Angka Kematian Balita;
2. Tingkat Inflasi YoY; dan
3. Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*)/TFR.

Sedangkan yang **Tidak Tercapai**, atau interval nilai realisasi kinerja skala ≥ 100 sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 5,97%, diantaranya:

1. Kasus kematian Ibu;
2. Angka Kematian Bayi; dan
3. Prevalensi gizi buruk (BB/U); dan
4. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Selanjutnya untuk mengimplementasikan sasaran jangka menengah Daerah, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun berkenaan, dan ditindaklanjuti dengan penetapan APBD tahun 2021 dengan sebanyak 330 program (berdasarkan jumlah program yang ada OPD) dengan 700 kegiatan dan sub kegiatan 1777. Realisasi fisik tercapai 96% dari target rencana 98%. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.2.949.643.677.710,- dan terserap sebesar Rp. 2.493.406.881.542,- (atau 84,53%).

Evaluasi atas data pendukung beserta berbagai permasalahan yang muncul dari setiap sasaran strategis perlu diantisipasi. Sebagaimana hasil menunjukkan berdasar tingkat efisiensi sumber daya diperoleh hasil: Jumlah sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi tinggi sebanyak 28 sasaran (atau 62,22% dari sebanyak 45 (empat puluh lima) dengan sebanyak 67 indikator sasaran diperoleh hasil yang efisiensi sebanyak



59 (atau 88,06%) indikator dan yang tidak efisiensi sebanyak 8 (atau 11,94%) indikator.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

- a. Memedomani ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 hasil LKjIP tahun berkenaan wajib dipakai sebagai *bahan penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, program* terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah).
- b. Berpedoman pada pencapaian kinerja sasaran tahun 2021, kiranya yang menjadi penekanan dan perhatian pada tahun 2022, diantaranya:
 - a) Mengupayakan penurunan angka kemiskinan sesuai target RPJMD;
 - b) Mengupayakan derajat Kesehatan, khususnya ibu, bayi dan gizi;
 - c) Menurunkan persentase penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS),
 - d) Mendorong pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,43% dan menekan inflansi pada angka 3,5 (\pm 1)%
 - e) Meningkatkan Rasio daya serap tenaga kerja PMDN, seiring dengan meningkatnya nilai investasi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu, maupun yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021 diucapkan terima kasih, dengan harapan semoga mampu mewujudkan **Visi Daerah : Maju, Mandiri dan berdaya saing.**

Klaten, 28 Januari 2022
BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI, S.M.



LAMPIRAN I

Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Klaten Tahun 2021

1. Piagam Penghargaan dari PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap kepada Damkar Kabupaten Klaten sebagai Juara I Firefighting Video Competition. (27/02/2021)
2. Piagam Penghargaan Becus Award 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai Pemerintah Daerah dengan Penyampaian Laporan Pemanfaatan DBHCHT paling Tertib. (25/03/2021)
3. Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten dengan Inovasi TITIP BANDAKU (titip Berkas Arsip Digitalku) sebagai TOP 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
4. Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Pemerintah kabupaten Klaten sebagai Peringkat VII Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 Kategori "Sangat Memuaskan". (18/05/2021)
5. Piagam Penghargaan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada Satuan Polisi Pamong Praja Klaten atas Kesigapan Dalam Penanganan dan Pengamanan Bencana Kebakaran Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. (28/06/2021)
6. Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah kepada SMP Negeri 2 Klaten Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. (04/10/2021)
7. Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah kepada SMP Negeri 1 Prambanan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. (04/10/2021)
8. Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah kepada SMP Negeri 2 Karangnongko Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. (04/10/2021)
9. Piagam Penghargaan dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah kepada Satpol PP Kabupaten Klaten sebagai Juara III Lomba Inovasi Satpol PP. (29/10/2021)
10. Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten sebagai Juara II Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. (01/11/2021)

11. Piagam Penghargaan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sebagai Juara 1 Lomba Film Edukasi Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional Ke 57 Judul Film : Kebal Virus. (12/11/2021).
12. Piagam Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Ketahanan Pangan kepada Kabupaten Klaten sebagai Juara III Lomba Kreasi Pangan Lokal Tahun 2021. (29/11/2021).
13. Piagam Penghargaan dari Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Klaten sebagai Peyaji Terbaik I pada Kegiatan Fasilitasi Forum Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten/Kota (Kawasan) dan Wilayah KSPP melalui event Bersama “SOLO RAYA”.
14. Sertifikat dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menetapkan Lurik Klaten sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia. (07/12/2021)
15. Natamukti Award 2021 Gladly Presented to Kabupaten Klaten from Indonesia Council for Small Business



PIAGAM PENGHARGAAN

No - P-011/E14000/2021-50



PT PERTAMINA (PERSERO) RU IV CILACAP

Dengan ini memberikan penghargaan kepada

DAMKAR KABUPATEN KLATEN

sebagai

JUARA I

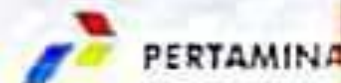
FIREFIGHTING VIDEO COMPETITION

DALAM RANGKA MEMPERINGATI BULAN K3 NASIONAL TAHUN 2021
PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT IV CILACAP

Cilacap, 27 Februari 2021

General Manager

M. JOKO PRANOTO





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH BEA DAN CUKAI JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B SURAKARTA



PIAGAM PENGHARGAAN

BECUS AWARDS 2021

Diberikan kepada :

Pemerintah Kabupaten Klaten

sebagai Pemerintah Daerah dengan Penyampaian
Laporan Pemanfaatan DBHCHT Paling Tertib.

Karanganyar, 25 Maret 2021
Kepala Kantor







GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0017905/2020

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 002.5/64 Tahun 2020 tentang Top 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Diberikan kepada:

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten

Dengan inovasi:

**TITIP BANDAKU
(TITIP BERKAS ARSIP DIGITALKU)**

Sebagai:

**TOP 10 KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020.**





ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AK.03/42/2021

memberikan

Penghargaan

kepada

Kabupaten Klaten

Kategori “Sangat Memuaskan” Sebagai Peringkat VII Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2020

Jakarta, 18 Mei 2021

Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN

PIAGAM PENGHARGAAN

NO: UP.02.01/537-33.10/VI/2021

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
MEMBERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA:

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KLATEN

ATAS KESIGAPAN DALAM PENANGANAN DAN PENGAMANAN
BENCANA KEBAKARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN

Klaten, 28 Juni 2021

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Klaten



Drs. Agung Taufik Hidayat, M.M.
NIP. 196709071993031005



GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0013008

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660-1/31 Tahun 2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Sekolah Adiwiyata dan Pelaksana Terbaik Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

Diberikan kepada :

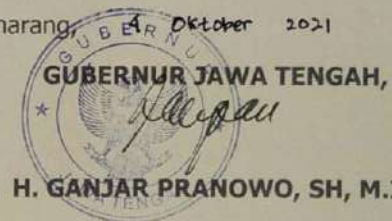
SMP NEGERI 2 KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN, KABUPATEN KLATEN

sebagai :

SEKOLAH ADIWIYATA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021



Semarang, 4 Oktober 2021



H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP



GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5 / 0013008

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor *660-1/31 Tahun 2021* tanggal *4 Oktober 2021* tentang Sekolah Adiwiyata dan Pelaksana Terbaik Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

Diberikan kepada :

**SMP NEGERI 1 PRAMBANAN
KECAMATAN PRAMBANAN, KABUPATEN KLATEN**

sebagai :

**SEKOLAH ADIWIYATA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021**



Semarang, *4 Oktober 2021*

GUBERNUR JAWA TENGAH,

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP



GOVERNOR OF JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0015008

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor **660-1/31 Tahun 2021** tanggal **4 Oktober 2021** tentang Sekolah Adiwiyata dan Pelaksana Terbaik Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

Diberikan kepada :

**SMP NEGERI 2 KARANGNONGKO
KECAMATAN KARANGNONGKO, KABUPATEN KLATEN**

sebagai :

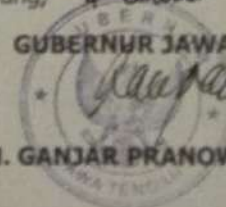
**SEKOLAH ADIWIYATA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021**



Semarang, **4 Oktober 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA TENGAH**

DIAGRAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada :

SATPOL PP KABUPATEN KLATEN

sebagai

JUARA III

Lomba Inovasi Satpol PP

“Peran Satpol PP dalam Penanganan Covid-19 di Jawa Tengah Tahun 2021”

Semarang, 29 Oktober 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA TENGAH**



Drs. BUDIANTO E P, M.Si

Pembina Utama

NIP. 19611006 198703 1 003



GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0015071

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 002.5/56 TAHUN 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pemenang Lomba Bidang Kearsipan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

Diberikan kepada:

**Dinas Arsip Dan Perpustakaan
Kabupaten Klaten**

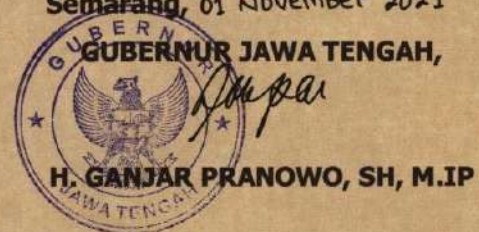
sebagai :

JUARA II

**Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Terbaik
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021**



Semarang, 01 November 2021



Jateng
gayeng



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN**

Memberikan

PIAGAM PENGHARGAAN

Kepada

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

Sebagai

**JUARA 1 LOMBA FILM EDUKASI KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021
DALAM RANGKA HARI KESEHATAN NASIONAL KE 57
JUDUL FILM : KEBAL VIRUS**

Semarang, 12 November 2021
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah


dr. YULIANTO PRABOWO, M. Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19620720 198803 1 010





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 045/1262

Diberikan Kepada:

Kabupaten Klaten

Sebagai:

JUARA III

Lomba Kreasi Pangan Lokal Tahun 2021 yang diselenggarakan tanggal 29 November 2021
di Gedung Monumen PKK

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. AGUS WARIYANTO, S.IP., M.M.

Pembina Utama Madya
NIP. 19640801 198712 1 001



Jateng
gayeng

pesona
indonesia

Piagam Penghargaan

NO. 556 / 3992

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :

Kabupaten Klaten

Penyaji Terbaik I

Pada Kegiatan Fasilitasi Forum Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten/Kota (Kawasan)
dan Wilayah KSPP Melalui Event Bersama "SOLO RAYA"



Drs. SINOENG N RACHMADI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19691231 199402 1 006

MTRAAA0178

Nomor: 0017/F4/KB.04.04/2021



Sertifikat

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Menetapkan

LURIK KLATEN

dari Provinsi Jawa Tengah
sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Jakarta, 7 Desember 2021

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.



natamukti
AWARD 2021

Gladly Presented to

KABUPATEN KLATEN

Jakarta, 9 December 2021

Dr. Jacky Mussry

President Indonesia Council for Small Business

Hermawan Kartajaya

Incoming Chair, International Council for Small Business
Chairman, Asia Council for Small Business (ACSB)
Co-Founder & Chairman, Indonesia Council for Small Business

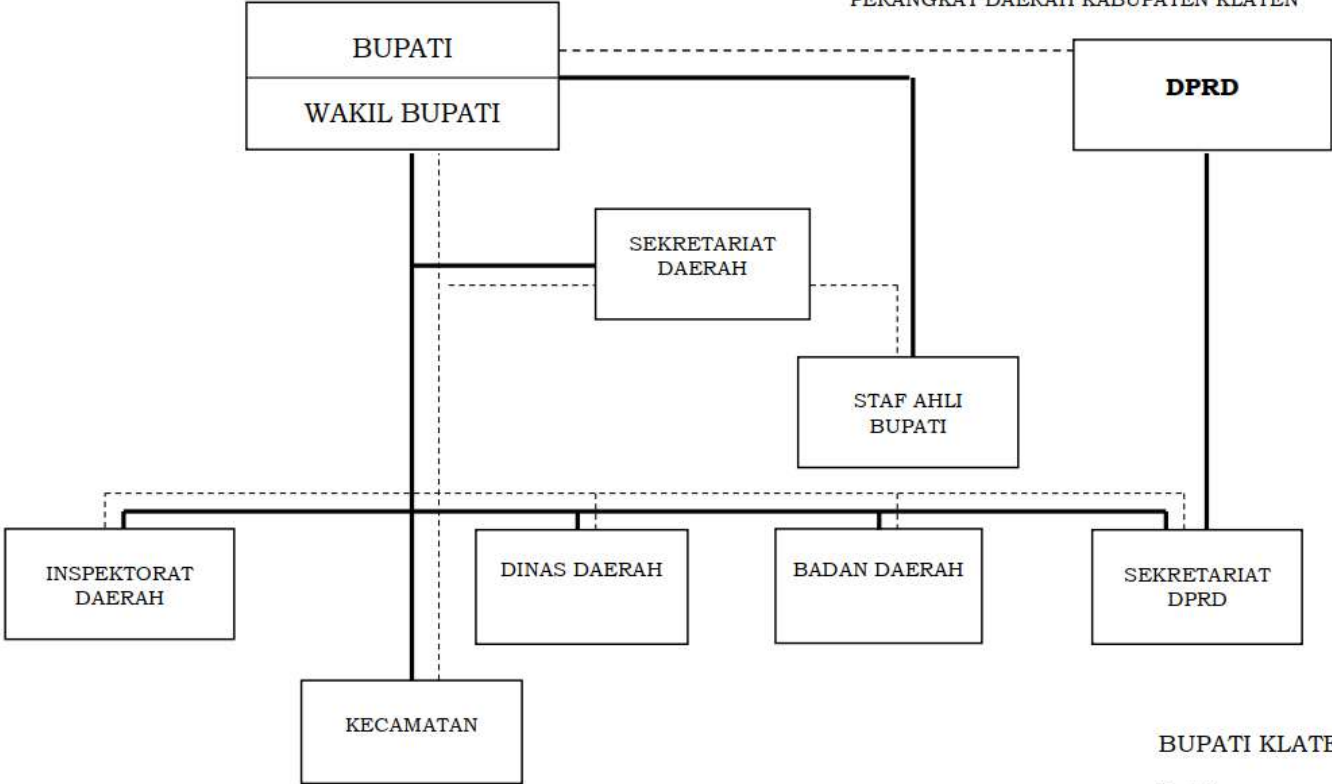
LAMPIRAN II

Struktur Pemerintah Kabupaten Klaten

SALINAN

BAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN



Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

BUPATI KLATEN,
Cap ttd
SRI MULYANI